

Sebuah laporan bentuk pertanggung jawaban kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi tahun anggaran 2018 dalam mencapai target kinerja pembangunan, menciptakan tata kelola migas yang sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat, serta melaksanakan tugas dan fungsi secara akuntabel, dan transparan

LAPORAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL MIGAS

TAHUN 2018

Tim Penyusun

Pelindung	: Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
Pengarah	: - Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi - Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi - Direktur Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi - Direktur Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi - Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi
Penanggung Jawab	: Kepala Bagian Rencana dan Laporan
Editor	: Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Laporan
Tim Penyusun	: Wulan Sitarahmi, Edward Gorasinatra, Aghnia Granittia Bakhri, Dimas Ovan, Eka Ramona Silalahi, Tafaqquh Fiddin, Syarifudin Setiawan, Farhan, Nadia Laila, Meta Indah Ariastuti, Dian Apriyani, Sinta Raeshanti, Novita Maryana, Andriany Nirmalakrisna, Mochamad Imron, Siti Nurbayanah, Teni Wijayanti, Kusmiyanto, Alfin Ali, Sarah Alsa

Ringkasan Eksekutif

Tahun 2018 merupakan tahun “panen” di sub sektor migas. Beberapa upaya yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah, atau dalam hal ini Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi di tahun-tahun sebelumnya dapat diraih di tahun 2018. Beberapa kebijakan seperti *Gross Split* mulai menampakkan hasilnya. Penandatanganan wilayah kerja (WK) minyak dan gas bumi tercapai sebanyak 11 penandatanganan dengan 6 penandatanganan Kontrak Kerja Sama (KKS) dari hasil lelang di tahun 2018 dan 5 penandatanganan KKS dari hasil lelang di 2017. Selain itu, iklim investasi di tahun 2018 cukup mendukung usaha migas dengan harga minyak bumi sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan tahun. Sebagai dampaknya, beberapa indikator kinerja dapat tercapai dengan hasil yang memuaskan. Sebanyak 13 dari 22 indikator kinerja utama Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi tahun 2018 berhasil dicapai di tahun 2018 dengan rerata persentase capaian mencapai 97%. Capaian ini merupakan suatu keberhasilan tersendiri, terutama apabila dibandingkan dengan capaian lima tahun sebelumnya.

Kata Pengantar



Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun 2018 dapat tersusun. Laporan ini merupakan bagian dari upaya Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara akuntabel serta dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun 2018 merupakan catatan dan gambaran atas capaian kinerja Pemerintah di sub sektor minyak dan gas bumi untuk mencapai target yang telah ditetapkan di tahun anggaran 2018. Menyadari bahwa Laporan Kinerja

merupakan bagian penting dalam proses perencanaan pembangunan dan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya di sub sektor migas, laporan ini disusun menggunakan data-data sub sektor migas eksisting disertai dengan analisis kinerja sehingga mempermudah para pembacanya memahami dan menilai kinerja Pemerintah, atau dalam hal ini Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

Besar harapan kami bahwa dengan disusunnya Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun 2018, tersedia umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja bagi seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, serta tersedia dokumen pertanggungjawaban kinerja Pemerintah yang dapat diakses oleh rakyat sesuai dengan semangat keterbukaan informasi publik. Adapun masukan dan saran perbaikan yang bersifat membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan dimasa yang akan datang.

Jakarta, Februari 2019
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi

Djoko Siswanto



Daftar Isi

1	Pendahuluan.....	9
1.1	Latar Belakang.....	9
1.2	Sekilas Mengenai Direktorat Jenderal Migas.....	9
1.3	Kilas Balik Pengelolaan Sub Sektor Migas 2018.....	14
2	Rencana Kinerja.....	17
2.1	Rencana Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi 2018 dalam Kerangka Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025.....	17
2.2	Rencana Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi 2018 dalam Kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.....	19
2.3	Rencana Strategis Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi 2015-2019.....	21
2.4	Perjanjian Kinerja Minyak Dan Gas Bumi 2018.....	26
3	Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Migas 2018.....	29
3.1	Optimalisasi Penyediaan Energi.....	29
3.1.1	Lifting minyak bumi.....	29
3.1.2	Lifting gas bumi.....	35
3.1.3	Penandatanganan Wilayah Kerja Migas Konvensional.....	39
3.1.4	Penandatanganan Wilayah Kerja Migas Non Konvensional.....	52
3.1.5	Cadangan Minyak Bumi.....	58
3.1.6	Cadangan Gas Bumi.....	59
3.2	Meningkatkan Alokasi Domestik.....	61
3.2.1	Persentase Alokasi Gas Domestik.....	61
3.2.2	Fasilitasi Pembangunan FSRU/Regasifikasi <i>On-Shore</i> /Terminal LNG.....	67
3.3	Meningkatkan Akses Infrastruktur Migas.....	68
3.3.1	Volume BBM Bersubsidi (APBN 2018).....	68
3.3.2	Produksi BBM dari Kilang Dalam Negeri.....	70
3.3.3	Kapasitas Kilang BBM Dalam Negeri.....	73
3.3.4	Kapasitas Terpasang Kilang LPG.....	74
3.3.5	Volume LPG Bersubsidi (APBN 2018).....	77
3.3.6	Jumlah Wilayah Dibangun Jaringan Gas Kota dan Jumlah Rumah Tangga Tersambung Gas Kota.....	80
3.3.7	Pembangunan Infrastruktur Sarana Gas Kota.....	86
3.4	Mengoptimalkan Penerimaan Negara dari Sub Sektor Migas.....	88

3.4.1	Penerimaan Negara dari Sub Sektor Migas (APBN 2018)	88
3.5	Meningkatkan Investasi Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	92
3.5.1	Jumlah Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Sub Sektor Minyak dan Gas Bumi Sesuai Program Legislasi Nasional	92
3.5.2	Investasi Sub Sektor Minyak dan Gas Bumi	93
3.6	Terwujudnya Lindung Lingkungan Keselamatan Operasi dan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi	98
3.6.1	Jumlah perusahaan yang melaksanakan keteknikan yang baik.....	98
3.6.2	Jumlah Perusahaan Hulu Migas Yang Kegiatan Operasinya Tidak Terjadi Kecelakaan Fatal	101
3.6.3	Jumlah Perusahaan Hilir Migas Yang Kegiatan Operasinya Tidak Terjadi Kecelakaan Fatal	104
3.7	Akuntabilitas Keuangan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi 2018.....	106
3.8	Analisis Efisiensi Kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi 2018.....	110
3.8.1	Efisiensi Anggaran	111
3.8.2	Efisiensi Tenaga	112
3.8.3	Efisiensi Waktu	114
3.9	Analisis Efektivitas Kinerja Direktorat Jenderal Migas Tahun 2018	115
4	Penutup	117

Daftar Tabel

Diagram 1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan s.d Februari 2019	11
Diagram 2. Jumlah Pegawai Ditjen Migas s.d Februari 2019 Berdasarkan Jenis Kelamin	12
Diagram 3. Proporsi Jumlah Pegawai Ditjen Migas s.d Februari 2019 Berdasarkan Jenis Kelamin	12
Diagram 4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan s.d Februari 2019	13
Diagram 5. Alokasi Anggaran Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun 2018	14
Diagram 6. Hasil interpretasi isu pengelolaan migas sesuai RPJP 2005-2025	19
Diagram 7. Strategi Perencanaan Pembangunan Nasional Sesuai RPJP 2005-2025.....	20
Diagram 8. Target Renstra Produksi/Lifting Migas 2015-2019.....	23
Diagram 9. Target Renstra Produksi/Lifting Migas 2015-2019.....	23
Diagram 10. Renstra Alokasi Gas Bumi 2015-2019	24
Diagram 11. Target Renstra Terkait Penerimaan Migas 2015-2019	25
Diagram 12. Kuota BBM dan LPG 3 Kg Sesuai Renstra 2015-2019.....	26
Diagram 13. Realisasi lifting minyak bumi 2018	30
Diagram 14. Realisasi lifting minyak bumi 2018 Berdasarkan KKKS.....	31
Diagram 15. Lifting Minyak Bumi Sampai Dengan Pertengahan Desember 2018.....	32
Diagram 16. Persentase Capaian Target <i>Lifting</i> Minyak Bumi Sampai Dengan September 2018 .	33
Diagram 17. Persentase capaian realisasi <i>lifting</i> minyak bumi dari target APBN 2018	34
Diagram 18. Realisasi <i>lifting</i> gas bumi 2018 berdasarkan KKKS.....	36
Diagram 19. Share <i>lifting</i> gas bumi 2018 berdasarkan KKKS	37
Diagram 20. <i>Lifting</i> gas bumi 2012-2018	37
Diagram 21. Persentase Capaian Target <i>Lifting</i> Gas Bumi 2018	38
Diagram 22. Penawaran WK Migas Konvensional Tahap I Tahun 2018	42
Diagram 23. Penawaran WK Migas Konvensional Tahap II Tahun 2018	45
Diagram 24. Penawaran WK Migas Konvensional Tahap III Tahun 2018	46
Diagram 25. Statistik <i>Signature Bonus</i> Tahun 2013-2018	48
Diagram 26. Statistik Penandatanganan KKS Baru 2013-2018	48
Diagram 27. Sensitivitas Penandatanganan KKS Terhadap Harga Minyak Mentah.....	49
Diagram 28. Peningkatan Minat Investasi Hulu Migas Pasca penerapan <i>Gross Split</i>	51
Diagram 29. Nilai Investasi Hulu Migas Tahun 2018	52
Diagram 30. Peta Penawaran Langsung WK Migas Non Konvensional 2018.....	53
Diagram 31. <i>Tender Schedule</i>	54
Diagram 32. Statistik Penawaran dan Penandatanganan WK Migas Non Konvensional	55
Diagram 33. Sensitivitas Capaian Penandatanganan WK MNK terhadap Harga Minyak Mentah ...	57
Diagram 34. Capaian Indikator Cadangan Minyak Bumi 2013-2018.....	59
Diagram 35. Capaian Indikator Cadangan Gas Bumi 2013-2018	60
Diagram 36. Realisasi Alokasi Gas Domestik 2003-2017.....	62
Diagram 37. Sebaran Pembangunan Jaringan Gas Bumi Untuk Rumah Tangga 2009 - 2018	63
Diagram 38. Penyerapan Gas Bumi untuk Jargas RT per Oktober 2018.....	64
Diagram 39. Sebaran SPBG di Indonesia	65
Diagram 40. Penyerapan Gas Bumi untuk SPBG per Oktober 2018	65
Diagram 41. Penyerapan Gas Bumi untuk Pupuk dan Petrokimia per Oktober 2018.....	66

Diagram 42. Realisasi BBM Bersubsidi dari Kuota APBN	68
Diagram 43. Realisasi BBM Bersubsidi Vs Capaian Kinerja	69
Diagram 44. Produksi BBM dari Kilang Dalam Negeri	70
Diagram 45. Kilang Minyak di Indonesia	74
Diagram 46. Realisasi Kapasitas Terpasang Kilang LPG	75
Diagram 47. Kapasitas Terpasang LPG 2018	77
Diagram 48. Realisasi LPG Tabung 3 Kg Terhadap Kuota APBNP	78
Diagram 49. Realisasi LPG 3 Kg vs capaian kinerja terhadap kuota.....	79
Diagram 50. Capaian Jumlah Sambungan Rumah Jargas Nasional	81
Diagram 51. Perkembangan dan Capaian Jargas melalui pendanaan APBN	81
Diagram 52. Pembangunan Jargas TA 2018	83
Diagram 53. Output Pembangunan Jaringan Gas Untuk Rumah Tangga Tahun 2018 (SR)*	84
Diagram 54. Target Pembangunan Jargas (SR) vs Alokasi Anggaran (Rp)	85
Diagram 55. % Capaian vs Realisasi Pembangunan Jaringan Gas Untuk Rumah Tangga (SR)	85
Diagram 56. Realisasi Penerimaan Negara dari Sub Sektor Migas (Rp.Miliar)	89
Diagram 57. Penerimaan negara vs ICP. Diagram ini menunjukkan bahwa kurva penerimaan negara sub sektor migas elastis kurva terhadap ICP	90
Diagram 58. Perbandingan rerata harga ICP, WTI dan Brent. Diagram ini menunjukkan bahwa rerata harga ICP per tahun hamper sama dengan rerata harga Brent dan WTI	90
Diagram 59. Pencapaian indikator penerimaan negara tahun 2018 telah melebihi target yang telah ditetapkan dalam APBN 2018 dan Rencana Strategis Ditjen Migas 2015-2019	91
Diagram 60. Realisasi Investasi Migas Tahun 2010 – 2018	94
Diagram 61. Realisasi Investasi Hulu Migas Tahun 2010 – 2018.....	95
Diagram 62. WP&B vs Realisasi Investasi.....	95
Diagram 63. Realisasi Investasi Hilir Migas Tahun 2010 – 2018	96
Diagram 64. Realisasi Investasi Hulu dan Hilir Migas vs ICP	97
Diagram 65. % Capaian Realisasi Investasi Migas vs ICP	98
Diagram 66. Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Keteknikan Yang Baik.....	100
Diagram 67. Kecelakaan Operasi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi 2014 – 2018	102
Diagram 68. Pagu Anggaran Vs Jumlah Indikator Kinerja Utama	107
Diagram 69. Realisasi Penyerapan Anggaran Direktorat Jenderal Migas 2014-2018	108
Diagram 70. Realisasi Anggaran Ditjen Migas Tahun 2018	109
Diagram 71. Persentase Realisasi Anggaran Ditjen Migas Tahun 2018 Per Komponen.....	109
Diagram 72. Struktur Anggaran Ditjen Migas 2018	110
Diagram 73. Struktur Realisasi Anggaran Ditjen Migas 2018.....	110
Diagram 74. Realisasi Anggaran v Capaian Kinerja	111
Diagram 75. Realisasi Anggaran (Rp) v Capaian Kinerja	112
Diagram 76. Jumlah Pegawai Ditjen Migas v Capaian IKU.....	114
Diagram 77. Persentase Rerata Capaian Per Indikator Kinerja	115
Diagram 78. Sensitivitas Persentase Capaian Terhadap Harga Minyak.....	116

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja merupakan bagian penting dalam tata kelola pemerintahan negara. Dalam Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, "Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran". Adapun dalam peraturan dimaksud, diatur tujuan laporan kinerja yang meliputi penyampaian informasi kinerja atas target kepada pemberi mandat dan sebagai bagian mekanisme untuk memperbaiki kinerja instansi secara berkesinambungan.

Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2018 dilakukan sebagai upaya evaluasi kinerja Ditjen Migas di tahun 2018 dan sebagai mekanisme *feedback* terhadap kebijakan perencanaan Ditjen Migas di tahun-tahun yang akan datang. Dengan adanya Laporan Kinerja Ditjen Migas 2018, diharapkan adanya evaluasi berkesinambungan atas kinerja di tahun 2018 yang dapat sebagai bekal pembelajaran dalam pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya, baik kegiatan yang tercakup dalam Perjanjian Kinerja maupun kegiatan strategis yang dilaksanakan secara sistematis dan spesifik pada tahun berjalan.

1.2 Sekilas Mengenai Direktorat Jenderal Migas

Dalam Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 Tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, diatur bahwa Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi memiliki tugas untuk "menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan minyak dan gas bumi". Selanjutnya, dalam pasal 129 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral disebutkan bahwa Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi bertugas "menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan minyak dan gas bumi".

Secara garis besar, sesuai dengan pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 dan pasal 130 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016, Ditjen Migas berwenang antara lain untuk:

- Merumuskan kebijakan sub sektor minyak dan gas bumi;
- Melaksanakan kebijakan sub sektor minyak dan gas bumi;
- Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria sub sektor minyak dan gas bumi;
- Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi sub sektor minyak dan gas bumi;
- Melaksanakan evaluasi dan pelaporan sub sektor minyak dan gas bumi;
- Melaksanakan administrasi Ditjen Migas; dan
- Melaksanakan fungsi lain yang diberikan Menteri

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengatur struktur organisasi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi yang terdiri dari enam unit eselon II yang terdiri dari:

- Sekretariat Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (SDM)
- Direktorat Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi (DMB)
- Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (DME)
- Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (DMO)
- Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi (DMI)
- Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi (DMT)

1.3 Kekuatan Pegawai Direktorat Jenderal Migas 2018

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang menjadi modal utama dalam suatu organisasi dan mempunyai jiwa kompleks/sangat pelik untuk dipahami. Oleh karena itu sumber daya manusia perlu dikelola secara profesional agar terwujud keseimbangan antara kebutuhan pegawai dengan tuntutan dan kemampuan organisasi. Keseimbangan tersebut merupakan kunci utama organisasi agar dapat berkembang secara produktif dan wajar. Kekuatan pegawai dalam sebuah lembaga seperti Direktorat Jenderal Migas, sangat penting posisinya dalam mengembangkan kemajuan lembaga. Kekuatan itu bisa diperoleh dari dalam diri pegawai ataupun diperoleh dari hasil pengembangan dalam organisasi, karena staf dari suatu institusi perlu didorong agar kompeten dalam melaksanakan tugas mereka.

Untuk pengembangan staf sebagai sebuah kekuatan pegawai diperlukan sebuah rencana institusional dalam hal ini Ditjen Migas dan sebuah proses analisis kebutuhan agar Ditjen Migas sebagai institusi mampu membuat produk regulasi dan/atau kebijakan yang mampu memberikan manfaat bagi negara maupun masyarakat (baik itu masyarakat umum sebagai konsumen dan badan usaha sebagai produsen) baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Harapannya Pemerintah secara umum maupun Kementerian ESDM cq. Ditjen Migas memberikan perhatian lebih kepada pengembangan sumber daya manusia, yang merupakan unsur penggerak utama dalam suatu lembaga seperti Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

Adapun kekuatan pegawai Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dapat dilihat dari diagram berikut ini:

Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

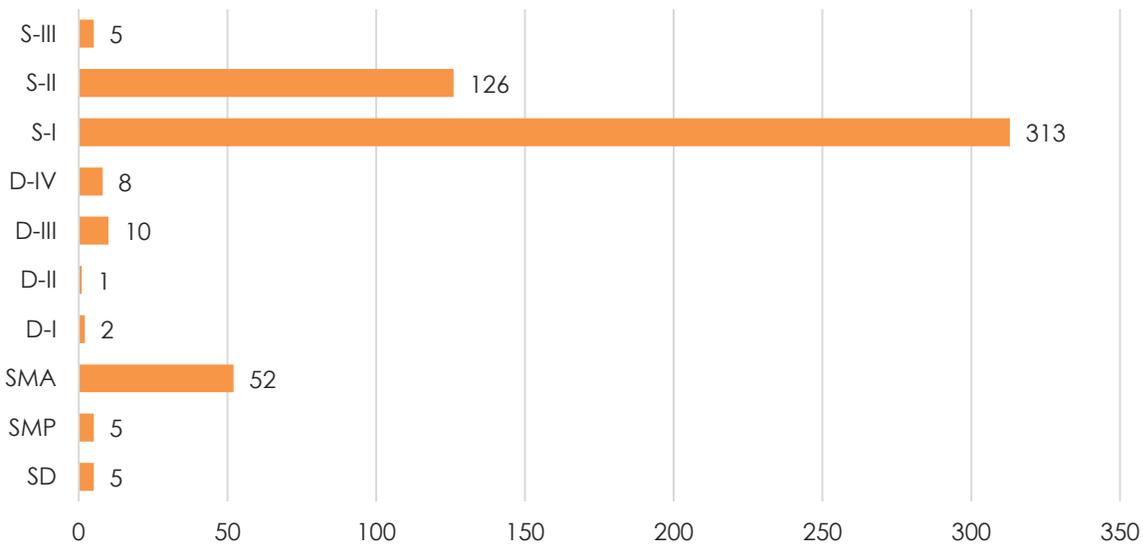


Diagram 1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan s.d Februari 2019

Berdasarkan latar belakang pendidikannya, jumlah pegawai Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi tahun 2018 sampai dengan Februari 2019 paling banyak terdiri dari sarjana strata-I dengan jumlah mencapai 313 pegawai. Selanjutnya, sebanyak 126 orang pegawai di Direktorat Jenderal Migas memiliki gelar strata-II dan sebanyak 5 orang pegawai merupakan lulusan strata-III dari perguruan tinggi. Banyaknya jumlah pegawai yang memiliki latar belakang lulusan perguruan tinggi merupakan kekuatan tersendiri bagi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dalam mencapai target kinerja Pemerintah, mengingat para pegawai merupakan pelaksana kegiatan dan penyusun kebijakan terkait instansi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

Jumlah Pegawai Ditjen Migas s.d Februari 2019 Berdasarkan Jenis Kelamin

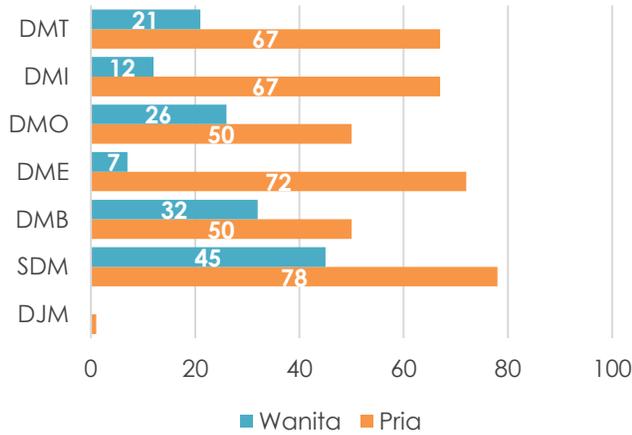


Diagram 2. Jumlah Pegawai Ditjen Migas s.d Februari 2019 Berdasarkan Jenis Kelamin

Proporsi Jumlah Pegawai Ditjen Migas Berdasarkan Jenis Kelamin

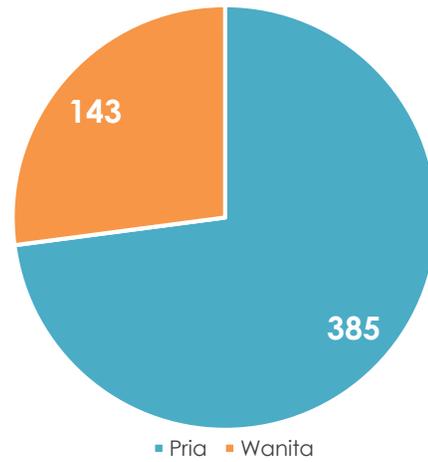


Diagram 3. Proporsi Jumlah Pegawai Ditjen Migas s.d Februari 2019 Berdasarkan Jenis Kelamin

Sedangkan apabila dilihat dari gender, sebagian besar pegawai di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi merupakan pegawai laki-laki. Hal ini juga dikarenakan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi banyak mempekerjakan sarjana lulusan teknik yang pada umumnya didominasi oleh laki-laki. Namun demikian, hal ini tidak membuat eksistensi pegawai perempuan dikesampingkan. Banyak pegawai perempuan di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi merupakan pegawai yang sangat kompeten dan ahli di bidang sub sektor minyak dan gas bumi. Selain itu, banyaknya kebijakan sub sektor minyak dan gas bumi berskala nasional yang erat kaitannya dengan isu gender menjadikan masukan, sumbangsih pengetahuan, dan partisipasi para pegawai perempuan menjadi sangat penting dalam proses *decision-making* dan proses perencanaan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Dengan kata lain baik pegawai laki-laki dan perempuan merupakan kekuatan tersendiri bagi kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

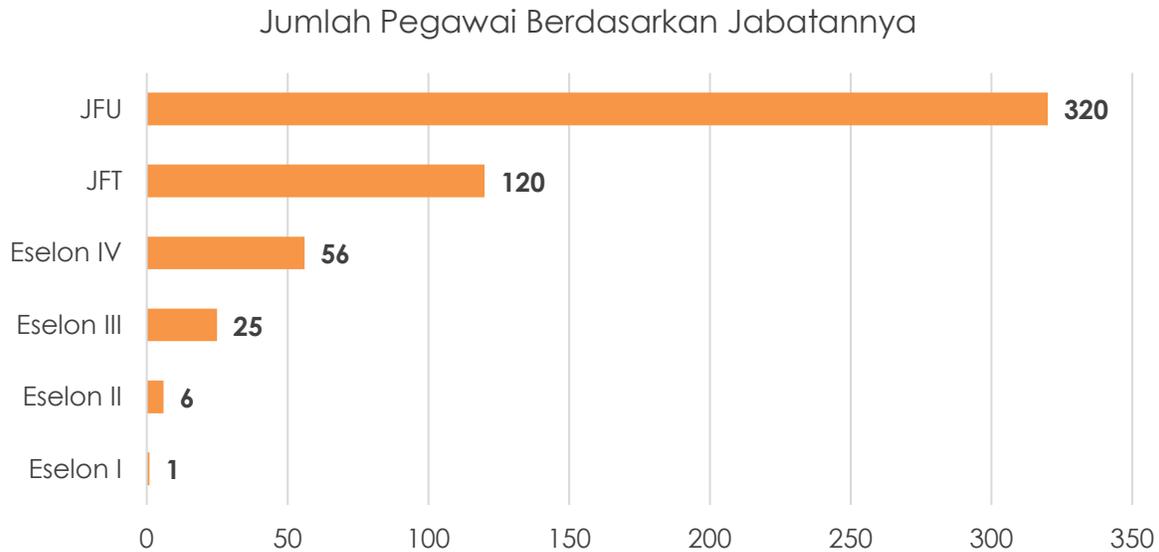


Diagram 4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan s.d Februari 2019

Sedangkan untuk distribusi jabatan pegawai di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, sebanyak 320 pegawai memiliki jabatan fungsional umum dan sebanyak 120 pegawai memiliki jabatan fungsional tertentu di tahun 2018 sampai dengan february 2019. Tingginya jumlah jabatan fungsional tertentu di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dapat dikatakan merupakan salah satu potensi bagi pengembangan pegawai berdasarkan keahlian dan profesionalitas. Dengan tingginya jumlah jabatan fungsional tertentu, maka diharapkan akan banyak pegawai di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi yang berkarir berdasarkan keahlian sehingga memperkuat kekuatan pegawai organisasi, meskipun tidak dipungkiri bahwa ini juga mendorong perlunya pengembangan kebijakan organisasi yang memungkinkan pengembangan kompetensi pegawai.

1.4 Alokasi Anggaran Direktorat Jenderal Migas 2018

Alokasi anggaran Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi tahun 2018 terdiri dari tiga komponen, yaitu belanja barang, belanja modal, dan belanja pegawai. Belanja modal yang dimaksud disini termasuk belanja modal jaringan, belanja modal peralatan mesin, belanja modal perencanaan dan pengawasan jaringan. Belanja barang yang termasuk disini antara lain adalah belanja konsultan, belanja perjalanan dinas, belanja jasa lainnya, belanja bahan, dll. Belanja pegawai termasuk antara lain belanja beban gaji dan belanja beban tunjangan kompensasi kerja PNS.

Alokasi Anggaran Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun 2018

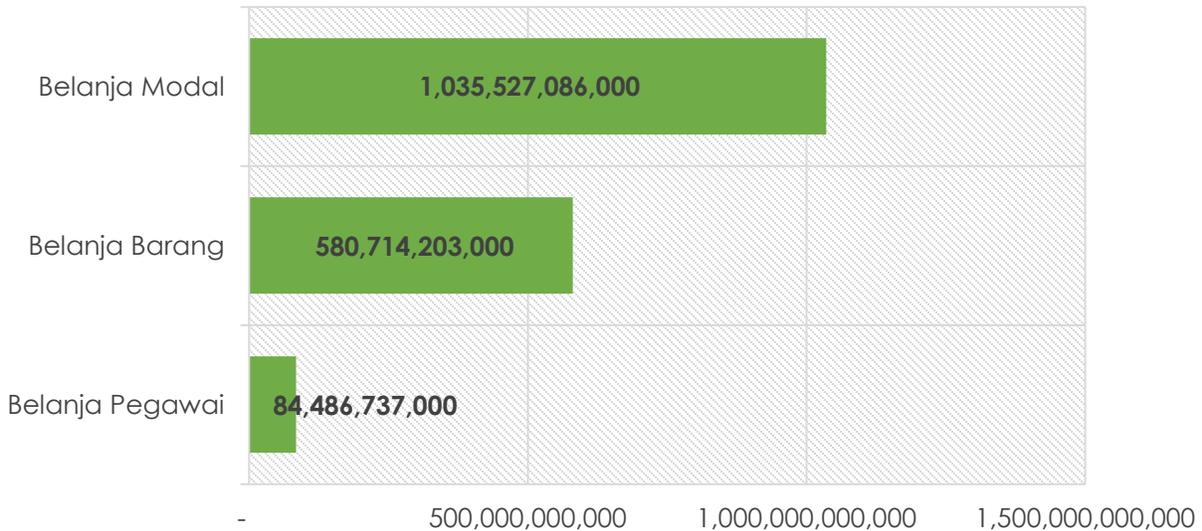


Diagram 5. Alokasi Anggaran Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun 2018

Dari ketiga belanja tersebut, maka total alokasi anggaran Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi tahun 2018 mencapai sebesar Rp. 1.700.728.026.000. Angka ini cukup kecil apabila dibandingkan dengan besaran target yang harus dicapai oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, mengingat bahwa anggaran untuk penerimaan negara bukan pajak tahun 2018 ditargetkan sebesar Rp. 55.085.507.000, besaran target investasi migas tahun 2018 adalah sebesar USD 15.42 miliar, serta besar penerimaan negara dari sub sektor minyak dan gas bumi adalah sebesar Rp. 118 triliun. Ini berarti bahwa alokasi anggaran yang ditetapkan harus dikelola secara efisien dan efektif guna mencapai target yang sesuai dengan Perjanjian Kinerja.

1.5 Kilas Balik Pengelolaan Sub Sektor Migas 2018

Tahun 2018 merupakan tahun “panen”. Hal ini dikarenakan di tahun ini, beberapa capaian yang telah diupayakan di tahun-tahun sebelumnya dapat diraih. Salah satu capaian yang diperoleh dari hasil dari upaya Direktorat Jenderal Migas di tahun-tahun sebelumnya adalah penandatanganan wilayah kerja (WK) minyak dan gas bumi sebanyak 11 penandatanganan dengan 6 penandatanganan Kontrak Kerja Sama (KKS) dari hasil lelang di tahun 2018 dan 5 penandatanganan KKS dari hasil lelang di 2017. Capaian dimaksud juga merupakan hasil dari

penerapan kebijakan *Gross Split* di Indonesia yang mulai diterapkan tahun 2017. Selain itu, tahun 2018 juga merupakan tahun dimana harga minyak bumi sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang menyebabkan beberapa indikator kinerja memiliki capaian yang sangat tinggi. Sebanyak 13 dari 22 indikator kinerja utama Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi tahun 2018 berhasil dicapai di tahun 2018 dengan rerata persentase capaian mencapai 97%. Bahkan, berdasarkan *track record* pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi di tahun-tahun sebelumnya, dapat dikatakan bahwa capaian kinerja tahun 2018 memberikan hasil yang sangat memuaskan mengingat hasilnya lebih tinggi dibanding dengan empat tahun sebelumnya.

Namun demikian hal ini tidak menjadikan pengelolaan minyak dan gas bumi kurang menantang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah, atau dalam hal ini Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi masih berupaya untuk memperkuat tata kelola migas nasional sesuai dengan prinsip ketahanan energi dan mandiri energi. Dari segi ketahanan energi, di tahun 2018, Pemerintah semakin menggalakkan pembangunan infrastruktur, yang salah satunya pembangunan infrastruktur migas. Tahun 2018, Pemerintah menargetkan terbangunnya Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga (Jargas), dengan target 78.315 Sambungan Rumah (SR), proyek percontohan untuk kendaraan gas alam terkonversi dan infrastruktur pengisian bahan bakar termasuk dukungan terhadap pengembangan lingkungan yang berkelanjutan, konversi BBM ke BBG untuk nelayan, dengan target 25.000 paket, serta konversi minyak tanah ke LPG Tabung 3 kg, dengan target 531.131 paket. Hal ini tentu saja menjadi amanah yang cukup besar bagi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi selaku Instansi Pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan pengelolaan sub sektor migas.

Dari sisi kemandirian energi, upaya meningkatkan kesempatan *stakeholder* dalam negeri untuk berperan aktif dan signifikan dalam pengelolaan sumber daya migas senantiasa dilakukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu capaian Pemerintah terkait dengan hal dimaksud adalah akuisisi Wilayah Kerja Rokan kepada Pertamina. Wilayah Kerja Rokan merupakan salah satu Wilayah Kerja migas yang bernilai strategis dengan luas Wilayah Kerja sebesar 6.453,6 kilometer persegi. Produksi minyak bumi dari Wilayah Kerja Rokan saat ini sekitar 200 ribu BOPD atau sekitar 26% dari total produksi nasional. Wilayah Kerja Rokan saat ini dikelola oleh Chevron Pacific Indonesia yang akan berakhir Kontrak Kerja Samanya pada tahun 2021. Pemerintah pada bulan Agustus 2018 telah menetapkan Pertamina untuk mengelola Wilayah Kerja Rokan mulai 9 Agustus 2021. Penetapan Pemerintah tersebut, berdasarkan berbagai pertimbangan antara lain Pemerintah menilai proposal Pertamina lebih baik daripada yang diusulkan oleh Chevron. Bonus tanda tangan yang ditawarkan oleh Pertamina adalah

sebesar US\$ 784 juta, sedangkan Komitmen Kerja Pasti 5 tahun pertama kontrak sebesar US\$ 500 juta dan diperkirakan selama 20 tahun Wilayah Kerja Rokan dikelola oleh Pertamina akan memberikan potensi pendapatan negara sekitar US\$ 57 miliar. Dengan dikelolanya Wilayah Kerja Rokan oleh Pertamina, secara keseluruhan mulai tahun 2021 diperkirakan Pertamina akan memberikan kontribusi sekitar 60% dari produksi minyak nasional.

Terlepas dari capaian yang diperoleh Pemerintah selama tahun 2018, tahun 2018 juga merupakan tahun pembelajaran bagi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi untuk pengelolaan sub sektor migas yang lebih baik di masa depan. Evaluasi dan monitoring senantiasa dilakukan selama perjalanan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi selama menjalankan tugas pokok dan fungsinya di tahun 2018 sebagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, adaptasi, dan sensitivitas Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi terhadap permasalahan di lapangan serta dinamika sub sektor minyak dan gas bumi. Tahun 2018 juga merupakan tahun dimana Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi semakin menggalakkan pembangunan sub sektor migas nasional secara efisien dan efektif melalui pemantauan dan pengawasan yang aktif, peningkatan jaringan dan kualitas layanan publik, serta peningkatan kinerja internal Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Dengan demikian, besar harapan bahwa tahun 2018 dapat menjadi langkah awal yang baik bagi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dalam melaksanakan tugas pembangunan bangsa dan negara di sub sektor migas di masa depan.

2 Rencana Kinerja

2.1 Rencana Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi 2018 dalam Kerangka Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025

Penyusunan rencana kinerja Ditjen Migas di tahun 2018 dilakukan berdasarkan kaedah perencanaan yang mengacu kepada dokumen perencanaan skala nasional yang meliputi perencanaan jangka panjang (Rencana Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025), perencanaan jangka menengah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, serta Rencana Strategis Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi 2015-2019.

Dalam dokumen-dokumen perencanaan dimaksud, pengelolaan energi, khususnya sub sektor migas menempati posisi yang cukup vital serta mendapat perhatian khusus dikarenakan dilema pemanfaatan migas yang penting namun harus mulai ditinggalkan. Dalam dokumen RPJP 2005-2025 disebutkan bahwa:

"Tantangan utama dalam penyediaan energi adalah meningkatkan kemampuan produksi minyak dan gas bumi yang sekaligus memperbesar penerimaan devisa, memperbanyak infrastruktur energi untuk memudahkan layanan kepada masyarakat, serta mengurangi ketergantungan terhadap minyak dan meningkatkan kontribusi gas, batubara, serta energi terbarukan seperti biogas, biomassa, panas bumi (geothermal), energi matahari, arus laut, dan tenaga angin" (RPJP 2004, hal. 33)

Dokumen tersebut menggarisbawahi bahwa ketergantungan Indonesia akan migas menjadi isu yang harus dihadapi dengan meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan dan gas bumi. Hal ini berarti bahwa Pemerintah harus berupaya untuk mengurangi penggunaan minyak bumi dengan sumber daya energi alternatif lainnya, meski harus tetap berupaya meningkatkan pengelolaan migas sebagai sumber daya energi serta sumber investasi, dan modal pembangunan bagi negara. Pengelolaan hasil dari sumber daya energi disebutkan dalam RPJP sebagai berikut:

"Sumberdaya alam yang tidak terbarukan, seperti bahan tambang, mineral dan sumberdaya energi, dikelola dan dimanfaatkan dengan diimbangi upaya reklamasi dan pencarian sumber alternatif atau bahan substitusi yang

terbarukan dan yang lebih ramah lingkungan. Hasil atau pendapatan yang diperoleh dari kelompok sumberdaya alam ini diarahkan untuk percepatan pertumbuhan ekonomi dengan diinvestasikan pada sektor-sektor lain yang produktif dan untuk upaya rehabilitasi, penyelamatan dan konservasi kawasan tertentu, serta untuk memperkuat pendanaan dalam rangka pencarian sumber-sumber alam alternatif" (RPJP 2004, hal. 42)

Selanjutnya, Pemerintah juga harus dihadapkan pada isu ketersediaan infrastruktur serta pengembangan dan inklusi masyarakat sebagai pengguna dan sumber daya manusia pengelola sumber energi yang menjadi tantangan pembangunan sektor energi nasional. Arah pembangunan energi ini kemudian dituangkan dalam RPJP dimana disebutkan bahwa:

"Pembangunan energi diarahkan pada penyediaan dan pemanfaatan sumberdaya energi; peningkatan prasarana dan sarana produksi; peningkatan fungsi kelembagaan; peningkatan mutu SDM dan penguasaan teknologi; serta peningkatan peran masyarakat dan kepedulian terhadap lingkungan dalam pemanfaatan energi" (RPJP 2004, hal. 40)

Tidak hanya dalam hal arah pembangunan sektor energi, RPJP 2005-2025 juga mengatur alokasi sumber daya energi, termasuk sumber daya migas dalam pemanfaatannya. Dokumen perencanaan jangka panjang dimaksud menekankan pemanfaatan sumber daya energi tak terbarukan, khususnya migas untuk dialokasikan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dengan harga yang terjangkau serta memenuhi kebutuhan industri berbasis hidrokarbon seperti petrokimia dan pupuk. Hal ini tertulis dalam RPJP 2005-2025 sebagai berikut:

"Pemanfaatan sumber daya energi yang tidak terbarukan, seperti minyak dan gas bumi, terutama diarahkan untuk memenuhi kebutuhan energi yang terjangkau masyarakat di dalam negeri dan untuk mendukung industri berbasis hidrokarbon, seperti industri petrokimia, industri pupuk dalam mendukung sektor pertanian di dalam negeri" (RPJP 2004, hal. 71)

Berdasarkan dokumen RPJP 2005-2025 sebagaimana dijelaskan sebelumnya, maka pengelolaan sektor migas dalam jangka panjang diupayakan untuk dapat menyentuh beberapa aspek vital seperti pemenuhan kebutuhan minyak bumi, peningkatan pemanfaatan gas, pengembangan infrastruktur migas, alokasi sumber daya migas, pengembangan sumber daya manusia, dan partisipasi publik.



Diagram 6. Hasil intepretasi isu pengelolaan migas sesuai RPJP 2005-2025

2.2 Rencana Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi 2018 dalam Kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019

Tahun 2018, Pembangunan Nasional oleh Pemerintah lebih ditekankan pada peningkatan daya saing kompetitif ekonomi nasional berbasis SDM, SDA, dan teknologi yang mumpuni. Sesuai dengan kaedah perencanaan nasional, rencana pengelolaan migas tahun 2018 sesuai dengan RPJP 2005-2025 dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Dengan demikian, ini berarti bahwa sesuai dengan RPJMN 2015-2019, pada tahun 2018 Pemerintah diharapkan untuk lebih memantapkan “pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat”. Berbeda dengan periode-periode lainnya selama 2005-2025, periode 2015-2019 ini pembangunan dilakukan dengan fokus kepada peningkatan keunggulan kompetitif pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan berbasis pilar SDA, SDM, dan

teknologi yang unggulan. Dengan kata lain, tersirat bahwa pengembangan SDA, SDM, dan teknologi diutamakan dalam strategi perencanaan pembangunan nasional dalam mencapai pembangunan bangsa di masa periode 2015-2019.

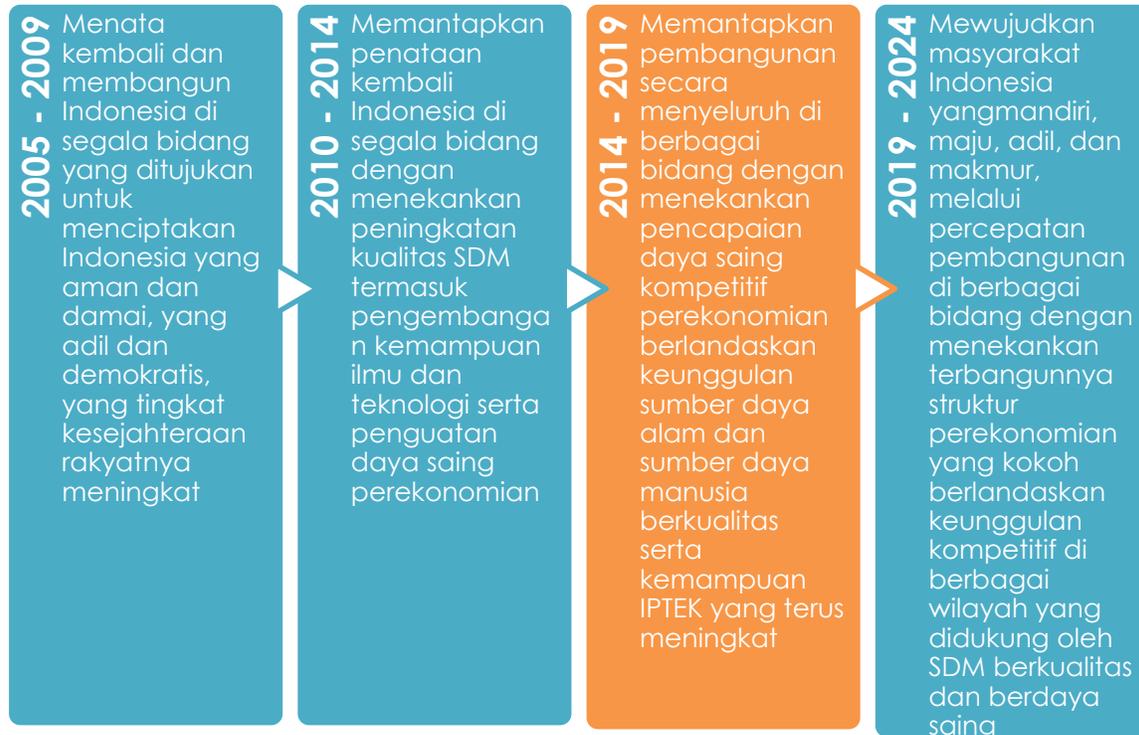


Diagram 7. Strategi Perencanaan Pembangunan Nasional Sesuai RPJP 2005-2025

2.3 Rencana Strategis Kementerian ESDM 2015-2019

Dalam RPJMN Tahun 2015-2019, sasaran strategis Kementerian ESDM terkait dengan Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan, yang didalamnya meliputi sasaran Kedaulatan Energi. Sasaran Kedaulatan Energi merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian ESDM dalam skala nasional. Target kinerja Kementerian ESDM tahun 2018 merupakan gambaran dari target yang telah ditetapkan dalam Renstra Kementerian ESDM tahun 2015-2019. Target dimaksud dituangkan menjadi indikator kinerja utama Kementerian ESDM. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pelaksanaannya di lapangan dilakukan penyesuaian sesuai dengan dinamika kebijakan, termasuk perubahan asumsi makro APBN, perubahan kebijakan nasional, dan perubahan amanat peraturan perundang-undangan terkait, serta kondisi sub sektor migas

yang berlaku. Adapun sasaran strategis Kementerian ESDM yang berkaitan dengan target Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Mengoptimalkan kapasitas penyediaan energi fosil
- 2) Meningkatkan alokasi energi domestik
- 3) Menyediakan akses dan infrastruktur energi
- 4) Mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor ESDM
- 5) Meningkatkan investasi sektor ESDM
- 6) Mewujudkan manajemen dan SDM yang profesional

Dalam perenapannya, selain sasaran strategis "Mewujudkan manajemen dan SDM yang profesional", kelima sasaran strageis Kementerian ESDM dicantumkan dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi tahun 2018.

2.4 Rencana Strategis Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi 2015-2019

Implementasi RPJMN 2015-2019 diterjemahkan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Migas 2015-2019 yang berisi target kinerja selama periode 2015-2019. Dalam hal ini, tahun anggaran 2018 merupakan tahun keempat sejak tema pembangunan RPJMN 2015-2019 mulai berlaku. Adapun target kinerja utama yang tercantum dalam Rencana Strategi 2015-2019 antara lain adalah sebagai berikut:

TUJUAN	Indikator Kinerja	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	
Terjaminnya pasokan migas dan bahan bakar domestik	Produksi/Lifting	Ribu boepd	2046	2030	1955	1915	1995	
	a. Produksi Minyak Bumi	Ribu bpd	825	830	750	700	700	
	b. Lifting Gas Bumi	Ribu boepd	1221	1150	1175	1200	1295	
		MMSCFD	6838	6440	6580	6720	7252	
	Penandatanganan KKS Migas	Kontrak	12	10	12	12	13	
	Rekomendasi Wilayah Kerja	Wilayah	39	39	40	41	41	
	Pemanfaatan Gas Bumi							
	a. Domestik	%	59	61	62	63	64	
	b. Ekspor	%	41	39	38	37	36	
	Akses dan Infrastruktur BBM							

TUJUAN	Indikator Kinerja	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
	a. Volume BBM bersubsidi	%	17.9	19.2	20.5	21.9	23.5
	b. Kapasitas Kilang BBM	%	1167	1167	1167	1167	1167
	Akses dan Infrastruktur Gas Bumi						
	a. Akses dan Infrastruktur Gas Bumi	Juta MT	5.77	6.11	6.48	6.87	7.28
	b. Pembangunan Jaringan Gas Kota (APBN)	Lokasi	2	2	2	2	2
	c. Konversi BBM ke BBG untuk transportasi (APBN)	SPBG	2	2	2	2	2
	d. Kapasitas Kilang Gas						
	– Kapasitas Terpasang Kilang LPG	Juta TON	4.6	4.62	4.64	4.66	4.68
	– Produksi LPG	Juta TON	2.39	2.41	2.43	2.43	2.43
	e. Pembangunan FSRU/Regasification	Unit	1	2	1	1	2
Terwujudnya peran penting subsektor migas dalam penerimaan negara	Penerimaan Negara Sektor Migas						
	a. Penerimaan Migas	Triliun Rp	139.38	202.47	105.9	209.33	293.79
Terwujudnya pengurangan beban subsidi BBM	Subsidi Bahan Bakar						
	a. Volume BBM Bersubsidi	Juta KL	17.9	17.9	17.9	17.9	17.9
	b. Volume LPG Bersubsidi	Juta Ton	5.77	6.11	6.48	6.87	7.28
Terwujudnya peningkatan investasi sektor migas	Investasi Subsektor Migas						
	a. Minyak dan Gas Bumi	Triliun Rp	23.67	25.23	26.8	28.36	29.93
Terwujudnya peningkatan peran sub sektor migas dalam pembangunan daerah	Dana Bagi Hasil						
	a. Minyak dan Gas Bumi	Triliun Rp	56.41	57.94	58.71	61.15	63.11

Target kinerja 2018 untuk *lifting*/produksi minyak dan gas bumi adalah sebesar 1900 MBOEPD yang terdiri dari 1200 MBOEPD untuk gas bumi dan 700 MBOPD untuk minyak bumi.

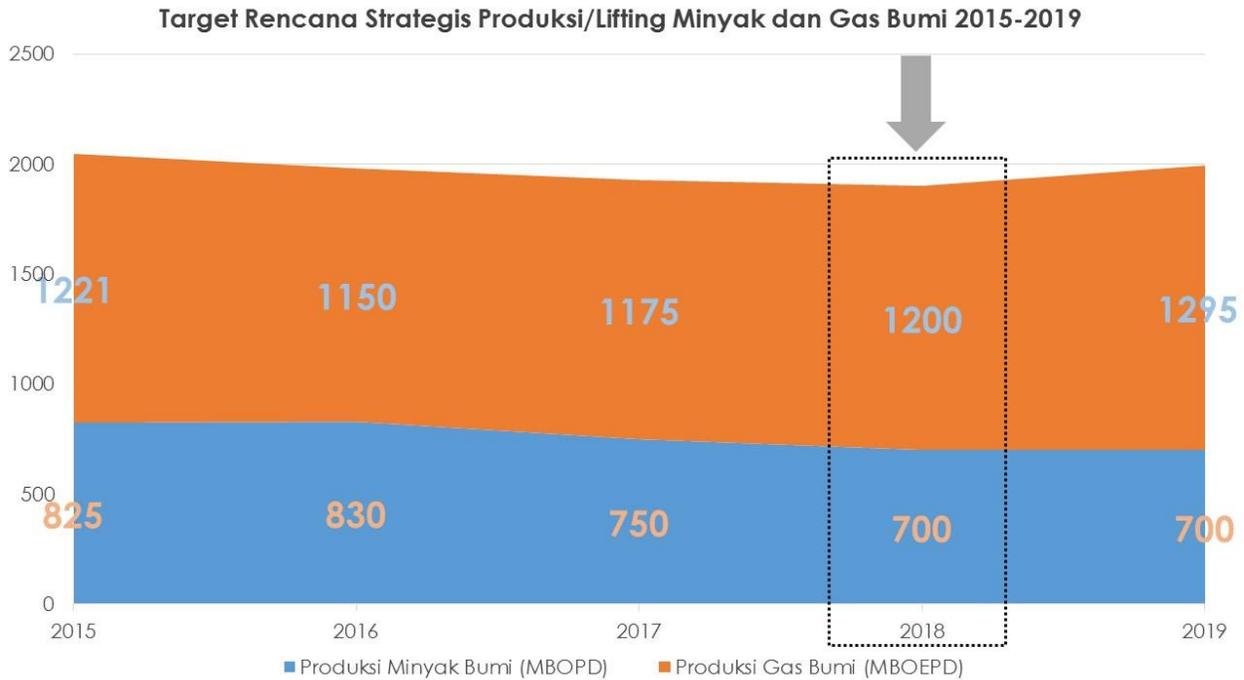


Diagram 8. Target Renstra Produksi/Lifting Migas 2015-2019

Sedangkan dari segi penandatanganan KKS dan rekomendasi wilayah kerja untuk tahun 2018 adalah sebanyak 41 rekomendasi dan 12 penandatanganan wilayah kerja. Angka ini sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan target di tahun-tahun sebelumnya yang hanya sebesar 40 rekomendasi dan 12 penandatanganan di tahun 2017.

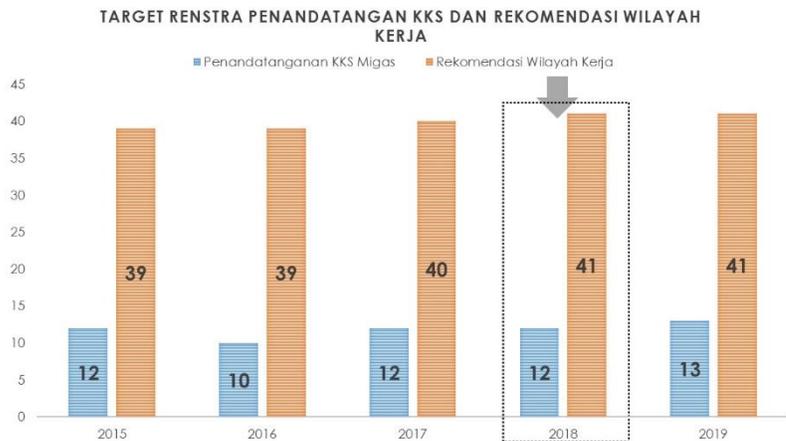


Diagram 9. Target Renstra Produksi/Lifting Migas 2015-2019

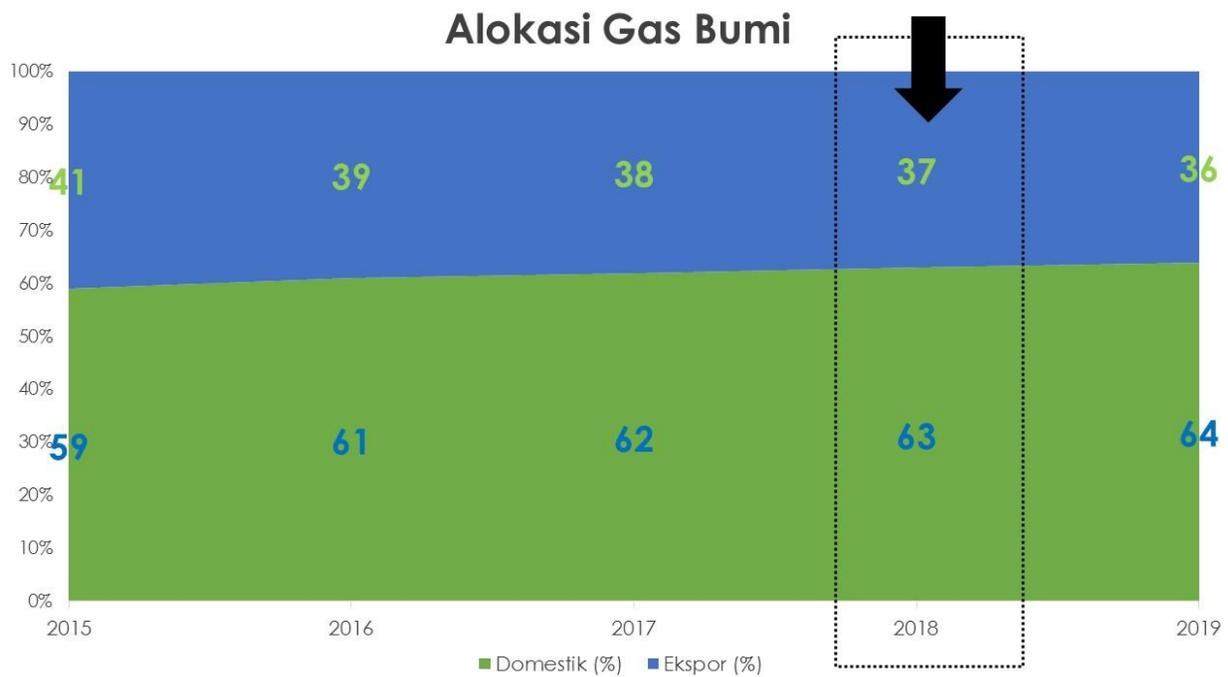


Diagram 10. Renstra Alokasi Gas Bumi 2015-2019

Dari segi alokasi gas bumi, tahun 2018 merupakan tahun dimana Pemerintah mengupayakan peningkatan persentase alokasi gas bumi dibandingkan tahun sebelumnya, dengan target alokasi sebesar 63%. Ini sesuai dengan semangat Pemerintah yang berupaya mengalokasikan gas bumi nasional untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sebagai modal pembangunan.

Terkait dengan infrastruktur, Pemerintah, atau dalam hal ini Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi menargetkan peningkatan akses dan infrastruktur gas bumi melalui pembangunan Jaringan Gas Kota, FSRU, SPBG, akses dan infrastruktur gas bumi, serta memberikan jaminan kapasitas kilang gas. Namun demikian, dalam perjalanannya, rencana strategis ini mengalami penyesuaian sesuai dengan kondisi dan kebijakan yang berlaku. Di tahun 2018, pembangunan SPBG tidak lagi menggunakan skema APBN melainkan menggunakan skema NEDO atau kerjasama dengan Jepang. Selain itu, di tahun 2016, penyaluran volume BBM bersubsidi dilakukan dengan prinsip tepat sasaran dan penghematan.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatkan akses dan	Akses dan Infrastruktur BBM						
	a. Volume BBM bersubsidi	%	17.9	19.2	20.5	21.9	23.5

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target				
infrastruktur migas	b. Kapasitas Kilang BBM	%	1167	1167	1167	1167	1167
	Akses dan Infrastruktur Gas Bumi						
	a. Akses dan Infrastruktur Gas Bumi	Juta MT	5.77	6.11	6.48	6.87	7.28
	b. Pembangunan Jaringan Gas Kota (APBN)	Lokasi	2	2	2	2	2
	c. Konversi BBM ke BBG untuk transportasi (APBN)	SPBG	2	2	2	2	2
	d. Kapasitas Kilang Gas						
	- Kapasitas Terpasang Kilang LPG	Juta TON	4.6	4.62	4.64	4.66	4.68
	- Produksi LPG	Juta TON	2.39	2.41	2.43	2.43	2.43
	e. Pembangunan FSRU/Regasification	Unit	1	2	1	1	2

Target penerimaan migas sebagaimana disebutkan dalam dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi 2015-2019 untuk tahun 2018 adalah sebesar 209.33 triliun rupiah. Namun dalam aplikasinya di lapangan, target penerimaan negara dari sub sektor migas 2018 yang digunakan adalah target APBN mengingat target APBN lebih sesuai dengan kondisi yang ada dan lebih update dengan harga minyak bumi eksisting.

TARGET RENSTRA TERHADAP PENERIMAAN MIGAS (TRILIUN RP.)



Diagram 11. Target Renstra Terkait Penerimaan Migas 2015-2019

Pada tahun 2018, Pemerintah menganggarkan subsidi BBM dan subsidi LPG 3 Kg yang ditujukan bagi masyarakat yang membutuhkan dengan kuota subsidi BBM sebesar 17.9 Juta kilo liter dan

volume LPG bersubsidi sebesar 6.48 Juta Ton. Adapun demikian, penyaluran dan penyediaan subsidi BBM dan LPG 3 Kg ini dilakukan dengan berdasarkan prinsip efisiensi dan penghematan sehingga kinerja pendistribusian dan penyediaan subsidi BBM dan LPG 3 kg dikatakan baik apabila subsidi diberikan secara tepat sasaran dan tidak melebihi kuota.

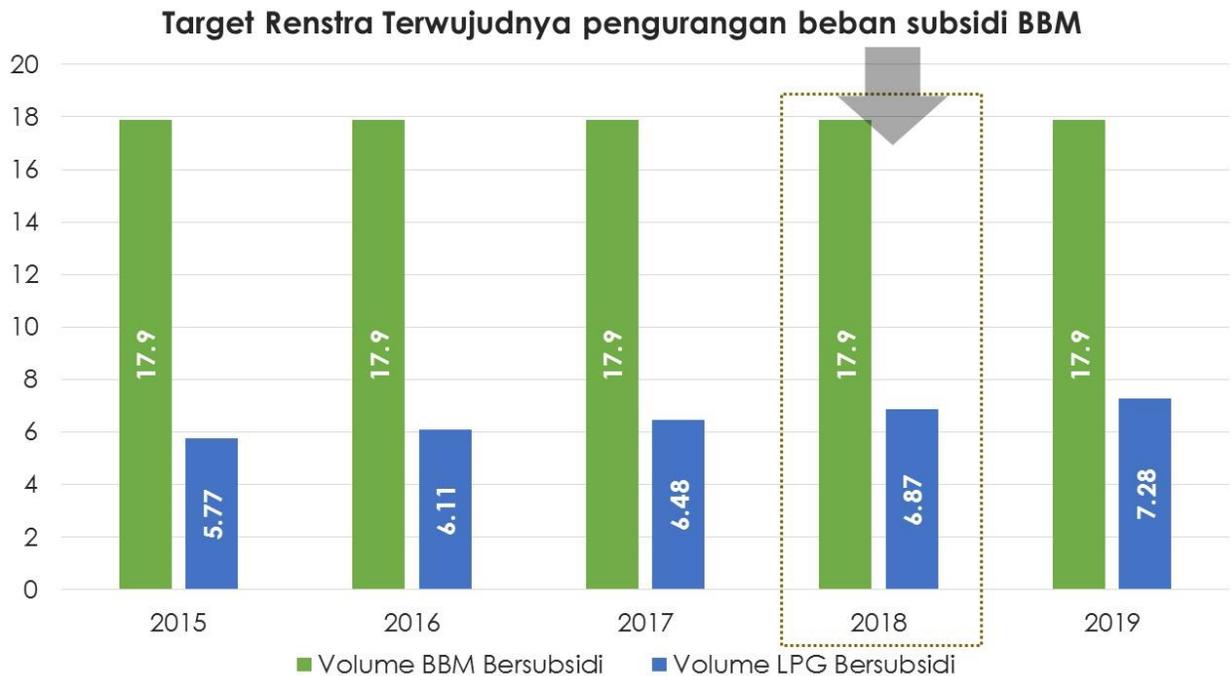


Diagram 12. Kuota BBM dan LPG 3 Kg Sesua Renstra 2015-2019

Terkait dengan target investasi minyak dan gas bumi dan dana bagi hasil, Rencana Strategis Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi menargetkan sebesar 28.36 triliun rupiah untuk investasi migas dan sebesar 61.15 triliun rupiah untuk dana bagi hasil. Namun demikian, angka ini tidak digunakan dalam Perjanjian Kinerja 2018 mengingat target yang ada perlu dilakukan penyesuaian terkait dengan adanya perubahan harga minyak bumi dan, khusus untuk dana bagi hasil, kewenangan pengelolaan lebih besar berada di bawah Kementerian Keuangan.

2.5 Perjanjian Kinerja Minyak Dan Gas Bumi 2018

Berangkat dari tujuan pembangunan skala nasional sebagaimana disebutkan dalam dokumen RPJP 2005-2025 dan RPJMN 2015-2019, maka sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam migas, Ditjen Migas memiliki beberapa kegiatan prioritas yang masuk Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 yaitu:

- a) Layanan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak *Grass Root* dan RDMP;
- b) Rekomendasi Pelaksanaan Subsidi LPG Tabung 3 KG Tepat Sasaran;
- c) WK Migas Konvensional yang Ditawarkan;
- d) WK Migas Non Konvensional yang Ditawarkan;
- e) Draft Revisi Undang-Undang Migas;
- f) Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga;
- g) Dokumen FS/FEED/DEDC Jaringan Gas Kota;
- h) Pipa Transmisi Jaringan Gas Rumah Tangga;
- i) Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Nelayan;
- j) Paket Konversi Minyak Tanah ke LPG Tabung 3 kg.

Kegiatan prioritas ini diharapkan dapat menjadi strategi handal dalam penyediaan sumber daya alam migas yang berdaya saing, serta mampu mendorong pembangunan bangsa. Adapun detail rencana kinerja yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Migas di tahun anggaran 2019 serta target berlaku indikator kinerja utama sesuai Rencana Strategis Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi 2015-2019 setelah dilakukan penyesuaian tercantum dalam Perjanjian Kinerja 2019 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Migas kepada Menteri ESDM dan berisikan target capaian kinerja tahun 2019. Adapun perjanjian kinerja dimaksud adalah sebagai berikut:

Sasaran	No	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Optimalisasi Penyediaan Energi Fosil	1	<i>Lifting</i> minyak dan gas bumi		
		a. <i>Lifting</i> minyak bumi (APBN 2016)	MBOPD	800
		b. <i>Lifting</i> gas bumi (APBN 2016)	MBOEPD	1200
	2	Jumlah penandatanganan KKKS Migas		
		a. Konvensional	KKKS	6
		b. Non konvensional	KKKS	2
Meningkatkan investasi sektor energi dan sumber daya mineral	3	Cadangan minyak dan gas bumi		
		a. Cadangan minyak bumi	MMSTB	6441
		b. Cadangan gas bumi	TCF	143
	4	Investasi sub sektor migas	Miliar US\$	15,42
	5	Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan sub sektor migas sesuai prolegnas	Rancangan	15
	6	Pemanfaatan gas bumi dalam negeri		

Sasaran	No	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Meningkatkan alokasi migas domestik		a. Presentase alokasi gas domestik	%	63
		b. Fasilitasi pembangunan FSRU (<i>Floating Storage Regasification Unit/Regasifikasi on-shore/LNG Terminal</i>)	Unit	1
Meningkatkan akses dan infrastruktur migas	7	Kapasitas kilang BBM		
		a. Produksi BBM dari kilang dalam negeri	Juta KL	39
		b. Kapasitas kilang BBM dalam negeri	Ribu BCPD	1169
	8	Kapasitas terpasang kilang LPG	Juta MT	4,66
	9	Pembangunan jaringan gas kota		
		a. Jumlah wilayah dibangun jaringan gas kota	Lokasi	16
	b. Rumah tangga tersambung gas kota	SR	78315	
	10	Pembangunan infrastruktur sarana bahan bakar gas	Lokasi	1
Mewujudkan subsidi energi yang lebih tepat sasaran	11	Volume BBM subsidi (APBN 2016)	Juta KL	16,23
	12	Volume LPG subsidi (APBN 2016)	Juta MT	6,45
Mengoptimalkan penerimaan negara dari sub sektor migas	13	Jumlah realisasi penerimaan negara dari sub sektor migas terhadap target APBN (APBN 2016)	Rp. Triliun	118,9
Terwujudnya lindung lingkungan keselamatan operasi dan usaha penunjang migas	14	Jumlah perusahaan yang melaksanakan keteknikan yang baik	Perusahaan	50
	15	Jumlah perusahaan hulu dan hilir migas yang kegiatan operasinya tidak terjadi kecelakaan fatal:		
		a. Jumlah perusahaan hulu migas yang kegiatan operasinya tidak terjadi kecelakaan fatal	Perusahaan	100
	b. Jumlah perusahaan hilir migas yang kegiatan operasinya tidak terjadi kecelakaan fatal	Perusahaan	200	

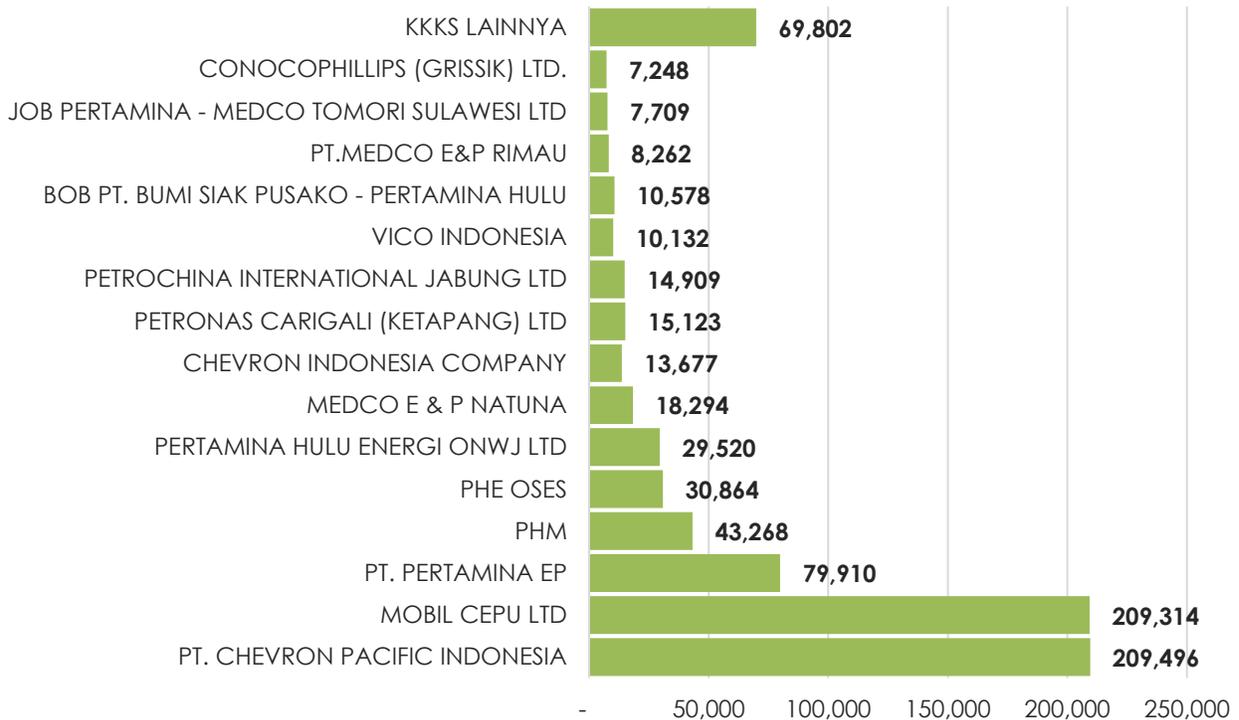
3 Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Migas 2018

3.1 Optimalisasi Penyediaan Energi

3.1.1 *Lifting* Minyak Bumi

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
Optimalisasi Penyediaan Energi Fosil	<i>Lifting</i> minyak bumi (APBN 2018)	MBOPD	800	778	97.25%
	<i>Lifting</i> gas bumi (APBN 2018)	MBOEPD	1200	1139	94.92%

Realisasi *lifting* minyak bumi sampai dengan Desember 2018 mencapai 778 MBOPD atau sebesar 97.3% dari target 800 MBOPD yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2018. Adapun perusahaan migas yang berkontribusi dalam perolehan *lifting* minyak bumi Indonesia 2018 dapat dilihat pada diagram berikut ini:

Realisasi *Lifting* Minyak Bumi 2018 (BOPD)Diagram 13. Realisasi *lifting* minyak bumi 2018

Berdasarkan data perolehan *lifting* minyak bumi 2018, Mobil Cepu Ltd dan PT. Chevron Pacific Indonesia merupakan dua Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) migas yang memberikan kontribusi terbanyak volume *lifting* minyak bumi nasional. PT. Chevron Pacific Indonesia memberikan kontribusi perolehan *lifting* minyak bumi Indonesia sebesar 26.92% dari volume total dan Mobil Cepu Ltd. memberikan kontribusi perolehan *lifting* minyak bumi Indonesia sebesar 26.90%.

Realisasi *Lifting* Minyak Bumi Indonesia 2018 Berdasarkan KKKS

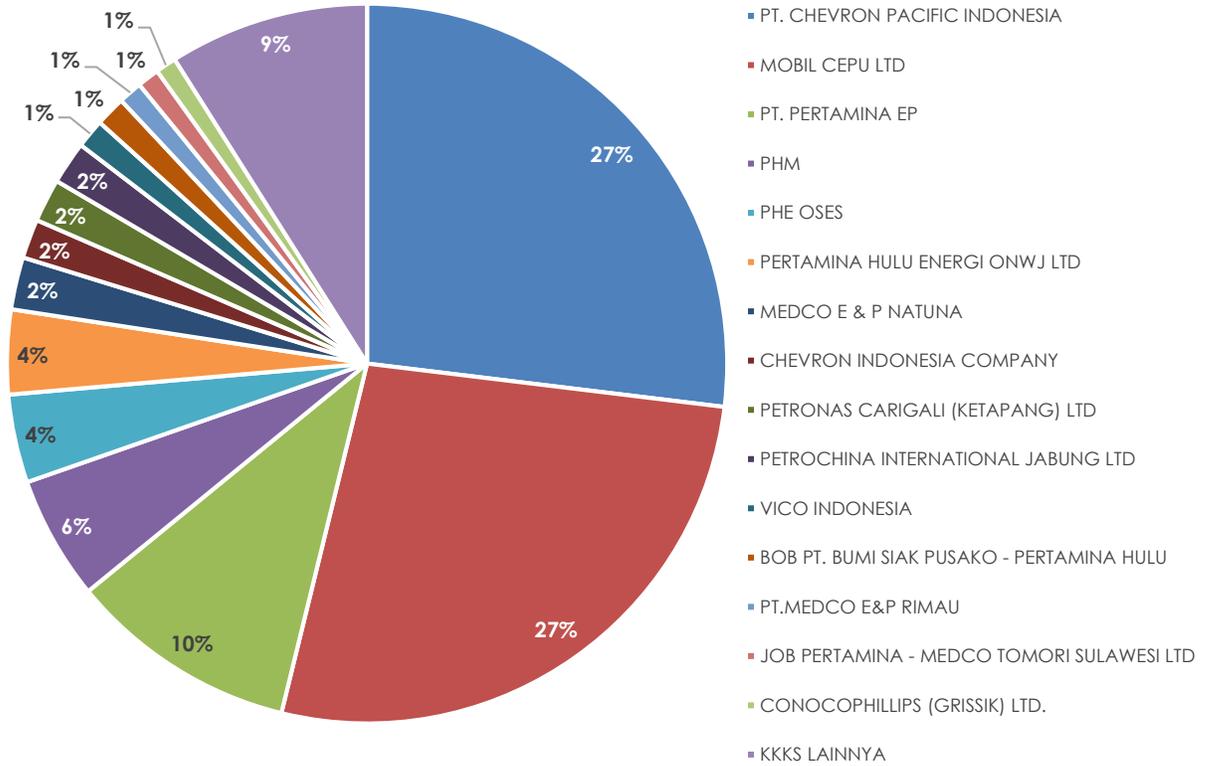
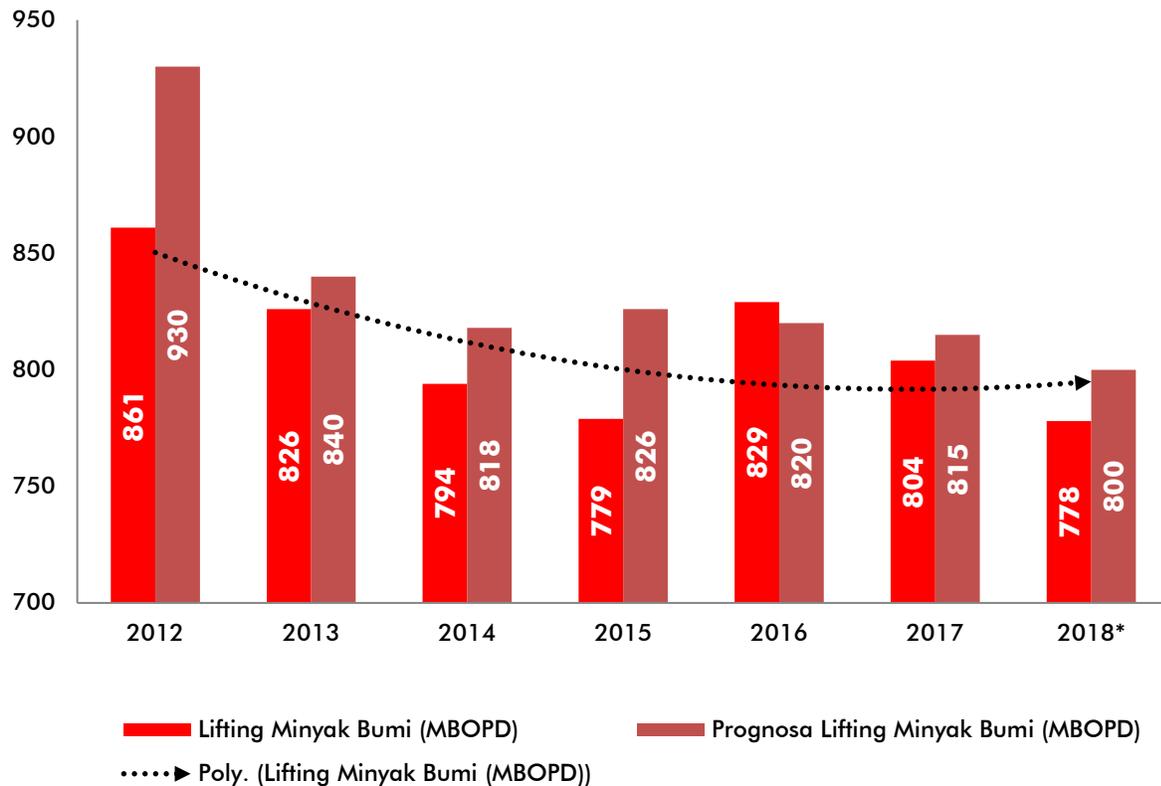


Diagram 14. Realisasi *lifting* minyak bumi 2018 Berdasarkan KKKS
Sumber: SKK Migas

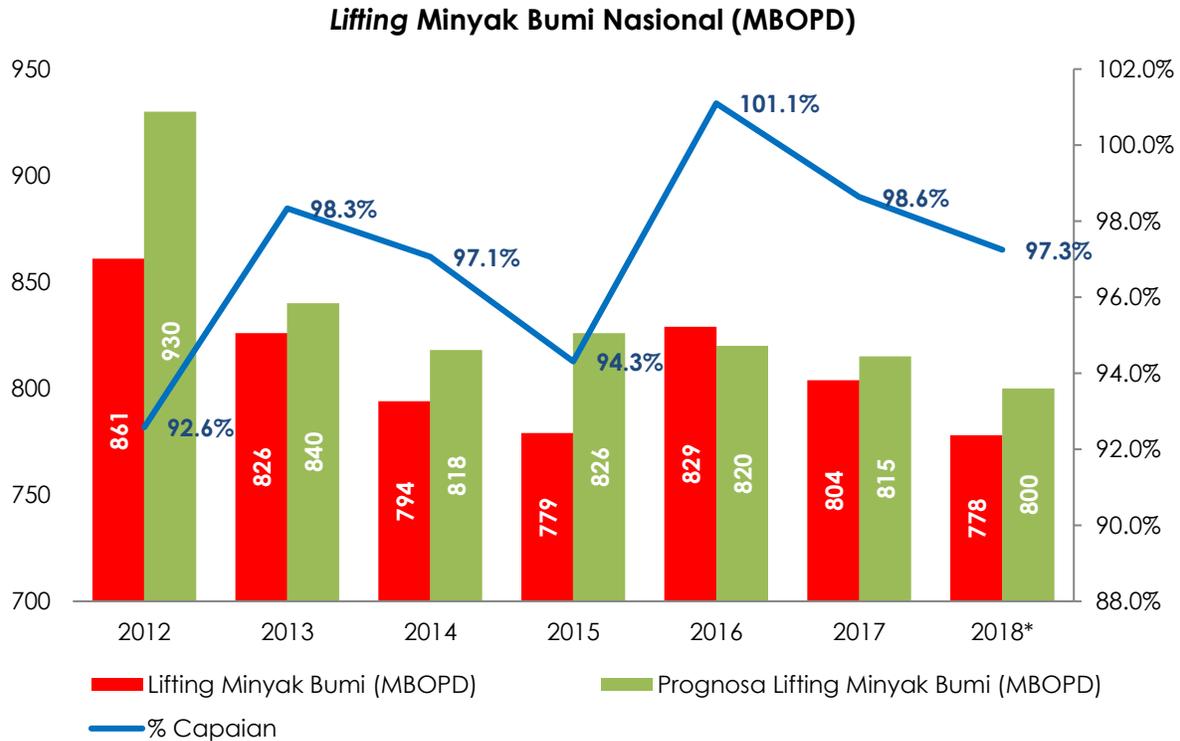
Dengan angka *lifting* minyak bumi sebesar 778 MBOPD di tahun 2018, maka penurunan volume *lifting* minyak bumi 2018 dibandingkan dengan volume *lifting* minyak bumi tahun 2017 adalah sebesar 3.22%.

Lifting Minyak Bumi (MBOPD)

*angka sementara s.d Desember 2018

Diagram 15. Lifting Minyak Bumi Sampai Dengan Pertengahan Desember 2018

Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, persentase capaian indikator kinerja *lifting* migas di tahun 2018 cukup rendah. Sejak beroperasinya Banyu Urip di tahun 2016 yang menyebabkan tercapainya capaian *lifting* minyak bumi dengan volume yang cukup signifikan dibandingkan dengan target yang ditetapkan, persentase capaian *lifting* minyak bumi di dua tahun setelahnya mengalami penurunan.

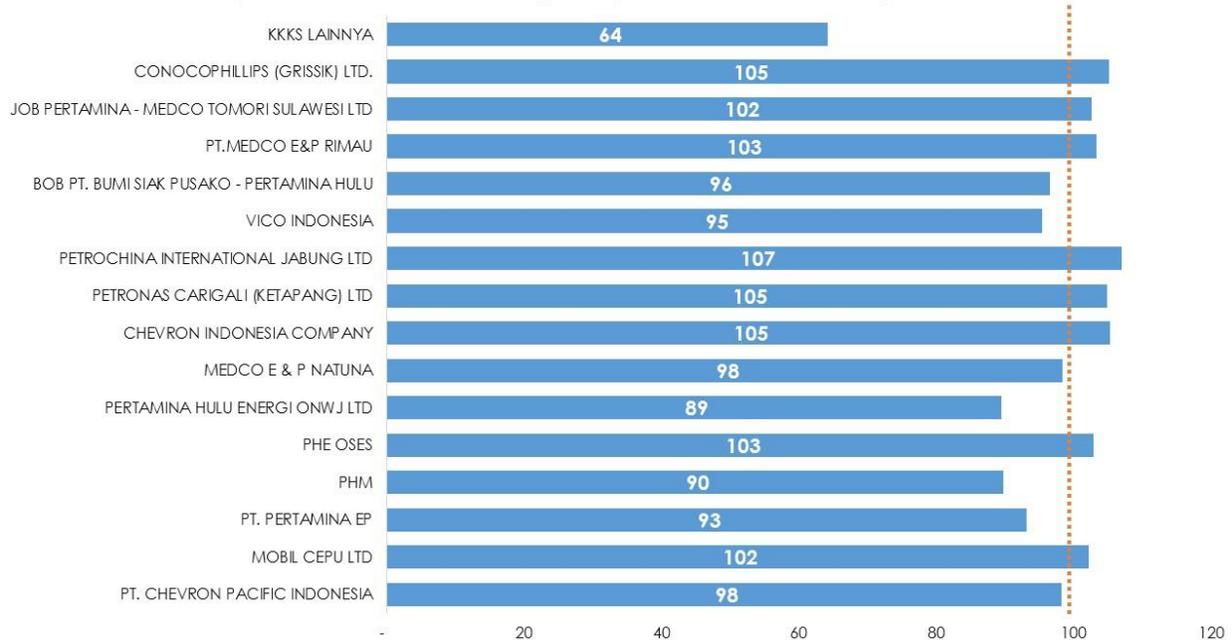


*angka sementara s.d Desember 2018

Diagram 16. Prosentase Capaian Target *Lifting* Minyak Bumi Sampai Dengan September 2018

Besarnya penurunan *lifting* minyak bumi di tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2017 serta belum tercapainya target *lifting* minyak bumi di beberapa KKKS antara lain disebabkan karena beberapa KKKS tidak dapat memenuhi target *lifting* sebagaimana telah ditetapkan sebelumnya. Adapun beberapa persentase capaian *lifting* minyak bumi dari KKKS yang beroperasi di tahun 2018 dapat terlihat pada diagram berikut ini:

% Capaian Realisasi Lifting Minyak Bumi Dari Target APBN 2018



*Sumber: SKK Migas

Diagram 17. Persentase capaian realisasi *lifting* minyak bumi dari target APBN 2018

Kondisi sumur-sumur Indonesia yang menua, belum ditemukannya dan dioperasikannya lapangan baru dengan cadangan melimpah serta adanya kendala teknis masih menjadi alasan belum tercapainya target *lifting* minyak bumi nasional. Adapun beberapa kendala teknis yang menjadi kendala tercapainya target *lifting* minyak bumi Indonesia 2018 antara lain adalah sebagai berikut:

- o PT. Sele Raya Merangin Dua: Adanya *maintenance* beberapa fasilitas produksi serta kondisi cuaca yang menghambat operasional transportasi *road tank*.
- o Petrogas (Basin) Ltd. : Adanya gangguan teknis di Kilang Pertamina RU VII Kasim (*Buyer*) yang menyebabkan *lifting* tidak dapat menyerap secara maksimal / *lifting* tidak sesuai nominasi, yang sebelumnya bisa menyerap 9 MB/hari menjadi 6 MB/hari.
- o Odira Energy Karang Agung: PT. OEKA sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan 08 Januari 2018 tidak dapat memproduksi sumur Ridho 1 dan Ridho 3 karena fasilitas *treatment* minyak Ridho menggunakan *steam boiler* mengalami kerusakan yaitu runtuhnya dinding api dan dibutuhkan waktu untuk reparasi selama \pm 14 hari. PT. OEKA sejak tanggal 18 sampai dengan 28 Januari 2018 tidak dapat memproduksi sumur Ridho 1 dan Ridho 3 karena *top tank* selama \pm 11 hari. akibat pembersihan *coiled tank*.

Mundurinya pelaksanaan Stimulasi *Thermo Chemical* pada sumur-sumur Ridho dari rencana maret 2018 hanya terlaksana 1 sumur pada bulan Juli 2018.

- o PT Tropik Energi Pandan: Performa sumur produksi SWA-6 yang di bawah target. Target produksi SWA-6 adalah sebesar 150 BOPD, namun kenyatannya SWA-6 hanya dapat memproduksi 20 BOPD.
- o Mandala Energy Lemang Pte Ltd.: Tertundanya pemasangan alat bantu buatan di sumur-sumur Selong-1. Selain itu produksi sumur Akatara B3 dan Akatara B4 juga tidak tercapai.
- o PT EMP Tonga.: Kemampuan produksi optimum Lapangan Tonga adalah sebesar 400 BOPD (untuk menghindari kenaikan *water cut* secara cepat pada sumur-sumur produksi) dan terdapat kendala-kendala *external (blockade, jalan longsor)* dalam proses *lifting* minyak.
- o Citic Seram Energy Ltd.: Sumur Oseil-28 mengalami kenaikan *watercut* sangat cepat dan berpengaruh pada sumur sekitar, sehingga sumur OS-28 di shut-in.

3.1.2 *Lifting Gas Bumi*

Dari 1200 MBOEPD target Perjanjian Kinerja *lifting gas bumi* nasional di tahun 2018, tercapai target sebesar 1139 MBOEPD yang menjadikan pencapaian target kinerja *lifting gas bumi* sebesar 94.92%. PT. Berau Ltd., merupakan KKKS dengan kontribusi *lifting gas bumi* terbesar pada total *lifting gas bumi* nasional di 2018 dengan volume *lifting gas bumi* sebesar 1076 MMSCFD. Posisi PT. Berau kemudian diikuti oleh PT. Conocophillips (Grissik) Ltd yang menghasilkan *lifting gas bumi* sebesar 840 MMSCFD. Pertamina Hulu Mahakam dan PT. Pertamina EP menjadi dua KKKS lain yang mencapai volume *lifting gas bumi* di atas 800 MMSCFD di tahun 2018 dengan angka sebesar 832 MMSCFD untuk Pertamina Hulu Mahakam dan 814 MMSCFD untuk PT. Pertamina EP.

REALISASI LIFTING GAS BUMI 2018 BERDASARKAN KKKS (MMSCFD)

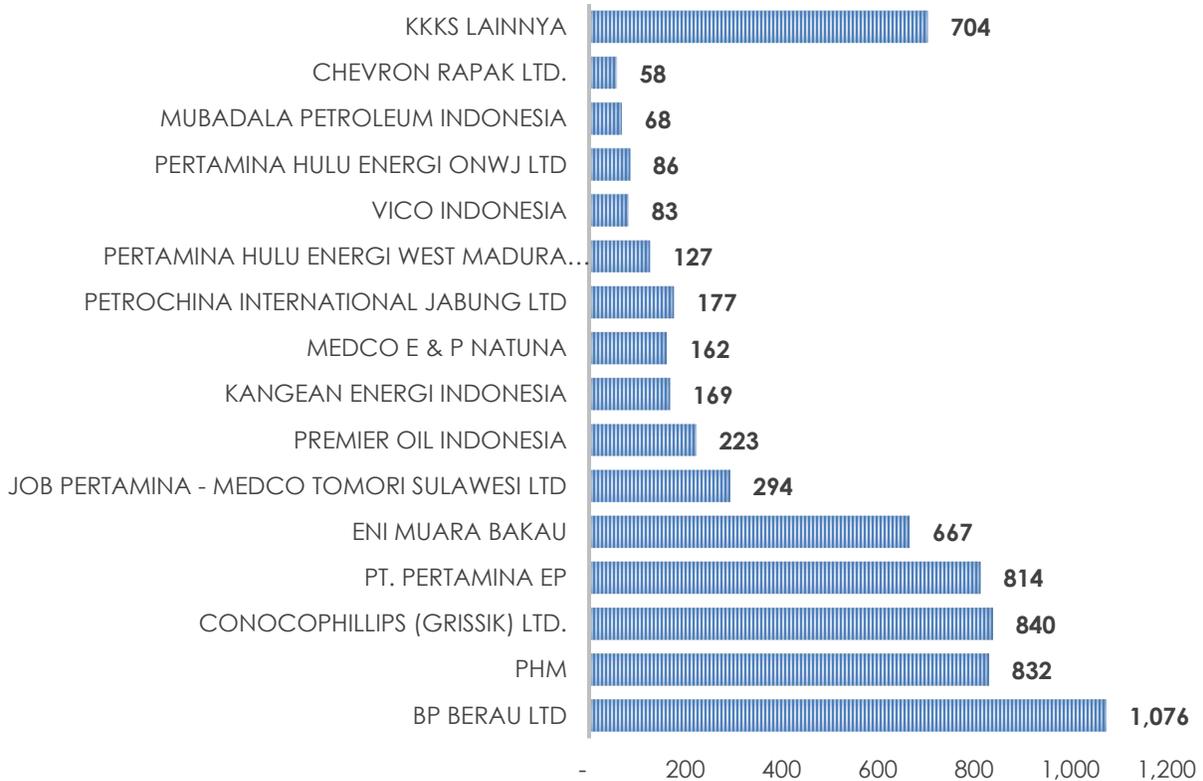


Diagram 18. Realisasi *lifting* gas bumi 2018 berdasarkan KKKS

Tingginya angka *lifting* migas yang diperoleh PT. Berau, PT. Conocophillips (Grissik) Ltd, Pertamina Hulu Mahakam, dan PT. Pertamina EP menjadikan lebih dari separuh total volume *lifting* gas Indonesia di 2018 atau sebesar 55.8% total volume *lifting* gas nasional 2018 diperoleh dari keempat perusahaan dimaksud. Sementara itu, 44.2% volume *lifting* gas Indonesia tahun 2018 sisanya diperoleh dari berbagai KKKS migas lain yang beroperasi di Indonesia di tahun bersangkutan.

Share Lifting Gas Bumi 2018 Berdasarkan KKKS

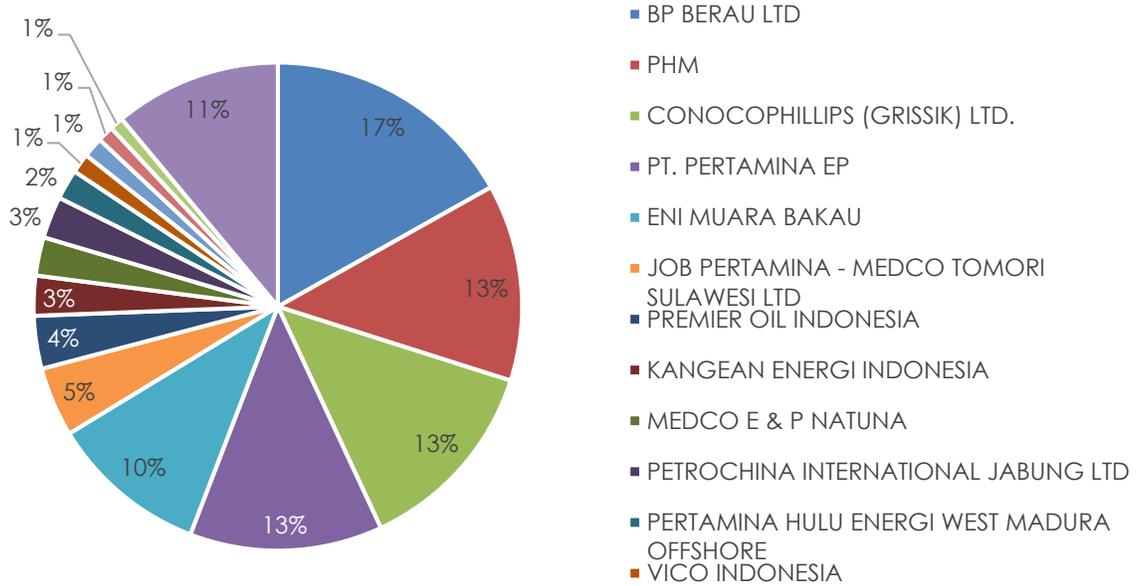
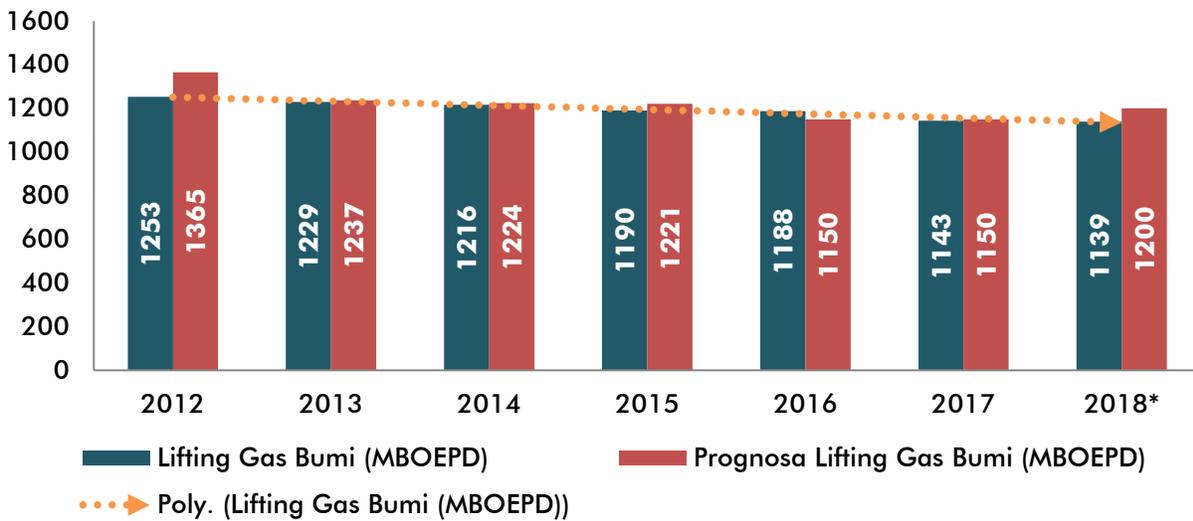


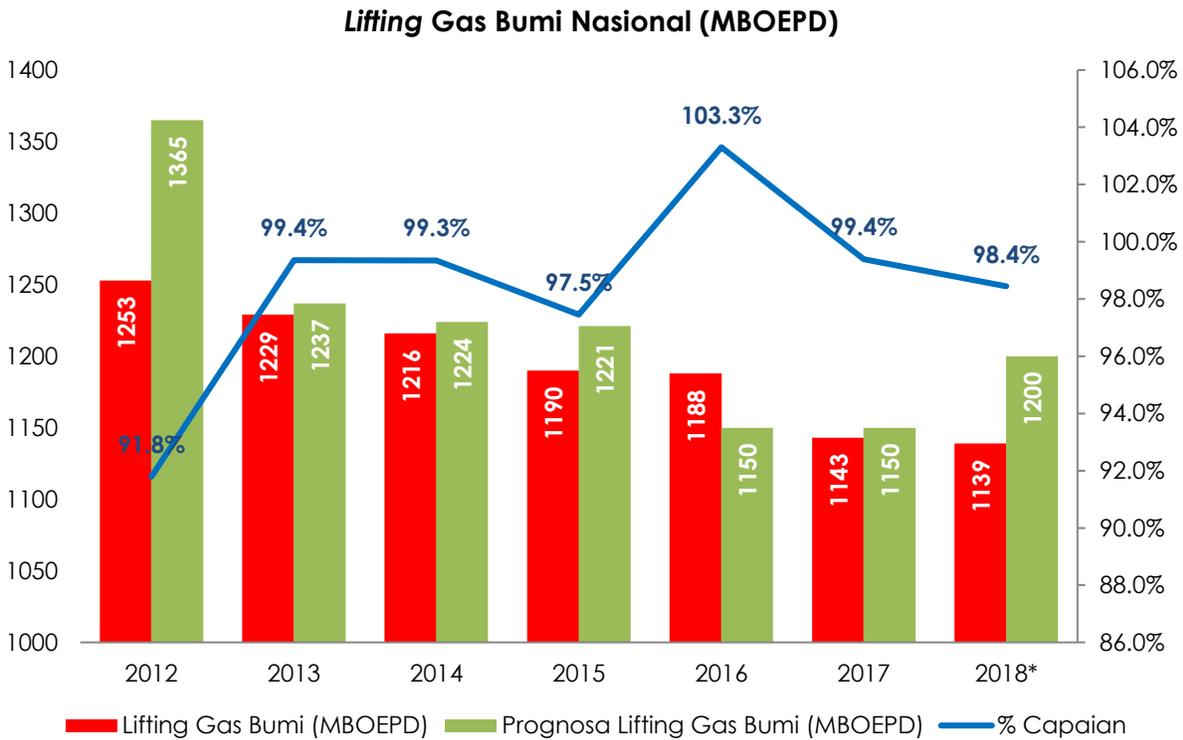
Diagram 19. Share lifting gas bumi 2018 berdasarkan KKKS

Persentase pencapaian Pemerintah terkait indikator kinerja *lifting* gas bumi tahun 2018 sedikit lebih rendah dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya yang menggambarkan bahwa selama dua tahun terakhir, tidak hanya terjadi penurunan volume *lifting* gas bumi, tetapi juga terjadi penurunan pencapaian kinerja terhadap target kinerja *lifting* minyak dan gas bumi.



*angka sementara s.d Desember 2018

Diagram 20. Lifting gas bumi 2012-2018



*angka sementara s.d Desember 2018

Diagram 21. Prosentase Capaian Target *Lifting Gas Bumi* 2018

Beberapa faktor yang dapat disampaikan sebagai penyebab belum tercapainya target *lifting gas bumi nasional* tahun anggaran 2018 antara lain adalah dikarenakan kondisi sumur migas Indonesia yang menua dan karena adanya alasan teknis. Adapun beberapa alasan teknis yang menjadi kendala pencapaian *lifting gas bumi* di beberapa KKKS antara lain sebagai berikut :

- JOB Pertamina Medco E&P Simenggaris: Penurunan produksi pada triwulan III disebabkan karena adanya efisiensi *flare* dan permasalahan di pembangkit PLN sehingga gas tidak terserap secara optimal
- Mandala Energy Lemang : Saat ini Mandala Energy belum mengomersialkan produksi gas, sehingga gas yang terproduksi dari sumur seluruhnya dibakar dan *own use*.
- Energy Equity EPIC (Sengkang) Pty Ltd.: Penurunan pencapaian gas *lifting* dikarenakan belum beroperasinya Lapangan Wasambo pada tahun 2018 karena menunggu pembahasan PJB LNG antara Perusda Sulsel dan PLN, selain itu produksi gas masih berasal dari Lapangan Kampung Baru.

- Tropik Pandan: Produksi Gas dari Lapangan Ario Damar-Sriwijaya direncanakan akan mulai berproduksi pada May 2019 dikarenakan mundurnya persiapan fasilitas produksi gas.
- Lapindo Brantas.: *Problem liquid loading* di Lapangan Wunut, mundurnya jadwal kegiatan *workover* di Lapangan Wunut serta mundurnya jadwal kegiatan *drilling* di Lapangan Tanggulangin
- PT. Benuo Taka Malawi: Serapan yang rendah oleh PLN dikarenakan Mesin PLTMG saat ini hanya tersedia 4 Unit sehingga tidak dapat beroperasi secara optimal.
- Petrogas (Basin) Ltd.: Pihak *Buyer* menyerap rata-rata 6.58 MSCF dari alokasi MESDM sebesar 8 MSCFD.
- Triangle Pase.: TPI baru mulai berproduksi pada tengah bulan Maret 2018, penundaan waktu produksi dikarenakan terhambatnya finalisasi PJBG dan FSA (*Facility Sharing Agreement*). Penundaan Pemboran Sumur Pengembangan yang awalnya direncanakan pada TW2 2018 dan diproduksi TW2 2018 menjadi TW4 2018 dan diproduksi TW2 2019 akibat terhambatnya pengadaan *rig*.

Upaya-upaya yang dapat dilaksanakan untuk meningkatkan *lifting* minyak dan gas bumi antara lain adalah:

- Mendorong percepatan eksplorasi dan penyelesaian pengembangan wilayah kerja migas
- Penerapan teknologi terkini dan tepat guna
- Mendorong upaya metode baru penemuan cadangan migas baru
- Monitoring proyek pengembangan lapangan *onstream*
- Melakukan pemeliharaan fasilitas produksi migas
- Pengembangan wilayah kerja migas

3.1.3 Penandatanganan Wilayah Kerja Migas Konvensional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
Optimalisasi Penyediaan Energi Fosil	Jumlah penandatanganan KKKS Migas Konvensional	KKKS	6	11	183.33%

Kegiatan usaha hulu migas nasional tidak terlepas dari kerangka regulasi pengaturan kepemilikan dan penguasaan negara atas sumber daya alam migas. Khusus mengenai pelaksanaan penyiapan, penetapan dan penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi di Indonesia, diterbitkan Peraturan Menteri ESDM No. 35 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi.

Dalam aturan tersebut, antara lain dinyatakan bahwa Menteri ESDM menetapkan kebijakan penyiapan, penetapan, dan penawaran wilayah kerja migas berdasarkan aspek teknis, ekonomis, tingkat resiko, efisiensi, dan berazaskan keterbukaan, keadilan, akuntabilitas, dan persaingan usaha yang wajar.

Ditjen migas menyiapkan wilayah Kerja yang akan ditawarkan kepada Badan Usaha (BU) dalam hal ini BUMN/BUMD/BU Swasta atau Bentuk Usaha Tetap (BU/BUT), yang berasal dari wilayah terbuka. Wilayah terbuka adalah bagian dari wilayah hukum pertambangan Indonesia yang belum ditetapkan sebagai wilayah kerja. Dalam hal ini, Wilayah terbuka diantaranya dapat berasal dari:

- Wilayah yang belum ditetapkan sebagai wilayah kerja
- Bagian wilayah kerja yang disisihkan berdasarkan Kontrak Kerja Sama;
- Wilayah Kerja yang berakhir Kontrak Kerja Samanya;
- Bagian wilayah Kerja yang belum pernah dikembangkan dan/atau sedang atau pernah diproduksi yang disisihkan atas usul Kontraktor;
- Bagian wilayah Kerja yang belum pernah dikembangkan dan/atau sedang atau pernah diproduksi yang disisihkan berdasarkan permintaan Menteri.

Penawaran Wilayah Kerja dapat dilaksanakan melalui 2 (dua) mekanisme, yang *pertama* **Lelang Reguler** dan *kedua* **Lelang Penawaran Langsung** melalui Studi Bersama.

Pada umumnya, setiap tahunnya Direktorat Jenderal Migas menyelenggarakan *Petroleum Bidding Round* yang dijadwalkan secara periodik, idealnya di dalam satu tahun, ditawarkan 2 (dua) kali putaran lelang Wilayah Kerja Baru baik melalui lelang Reguler (durasi 4 bulan) maupun lelang Wilayah Kerja Penawaran Langsung (durasi 1,5 bulan) hal ini dimaksudkan dalam rangka antara lain:

- Menjamin keberlangsungan kegiatan eksplorasi yang berkesinambungan dalam usaha penemuan cadangan baru
- Penyiapan wilayah-wilayah kerja baru secara berkesinambungan untuk mendukung investasi bidang hulu.

Penandatanganan KKS Hasil Penawaran WK Migas Konvensional Tahun 2017

No.	Wilayah Kerja	KKKS	Signature Bonus	Komitmen pasti
1.	Andaman I	MP Andaman I RSC Ltd.	\$750.000	G&G, Seismik 3D 500 Km ²
2.	Andaman II	Konsorsium Premier Oil Andaman Limited-KrisEnergy Andaman II Ltd- MP Andaman II RSC Ltd.	\$1.000.000	G&G, Seismik 3D 1.850 Km ²
3.	Pekawai	PT Saka Energi Sepinggan	\$500.000	G&G, 1 sumur
4.	West Yamdena	PT. Saka Energi Yamdena Barat	\$500.000	G&G, Seismik 2D 1.000 Km
5.	Merak-Lampung	PT Balmoral Gas	\$500.000	G&G, Seismik 2D 500 Km

Penawaran WK Migas Konvensional Tahap I Tahun 2018

Pada tahun 2018 Pemerintah hanya melaksanakan 3 (tiga) kali *Petroleum Bidding Round*, pada Penawaran Tahap I jumlah penawaran sebanyak 24 (dua puluh empat) wilayah kerja migas konvensional yang terdiri dari 19 (sembilan belas) wilayah kerja yang ditawarkan melalui lelang reguler dan 5 (lima) wilayah kerja yang ditawarkan melalui penawaran langsung. Wilayah kerja migas yang ditawarkan melalui lelang reguler Tahap I tahun 2018 dimaksud adalah:

- 1) Andika Bumi Kita, Lepas Pantai Jawa Timur
- 2) Air Komerling, Daratan Sumatera Selatan
- 3) Banyumas, Daratan Jawa Tengah dan Jawa Barat
- 4) Batu Gajah Dua, Daratan Jambi
- 5) Belayan, Daratan Kalimantan Timur
- 6) Bukit Barat, Lepas Pantai Natuna
- 7) Cendrawasih Bay II, Teluk Cenderawasih Papua
- 8) East Muriah, Lepas Pantai Jawa Timur
- 9) East Sokang, Lepas Pantai Natuna
- 10) Ebuny, Lepas Pantai Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara
- 11) Karaeng, Lepas Pantai Sulawesi Selatan
- 12) Manakarra Mamuju, Selat Makassar
- 13) Nibung, Daratan Riau dan Jambi
- 14) North Kangean, Lepas Pantai Jawa Timur
- 15) South CPP, Daratan Riau
- 16) South East Mahakam, Selat Makassar
- 17) Suremana I, Selat Makassar
- 18) West Berau, Lepas Pantai Papua Barat
- 19) West Sanga-Sanga, Daratan Kalimantan Timur

Sedangkan wilayah kerja migas yang ditawarkan melalui penawaran langsung Tahap I tahun 2018 adalah:

- 1) East Ganal, Selat Makassar
- 2) Citarum, Daratan Jawa Barat
- 3) East Papua, Daratan Papua
- 4) Southeast Jambi, Daratan Jambi & Sumatera Selatan
- 5) East Seram, Daratan dan Lepas Pantai Maluku

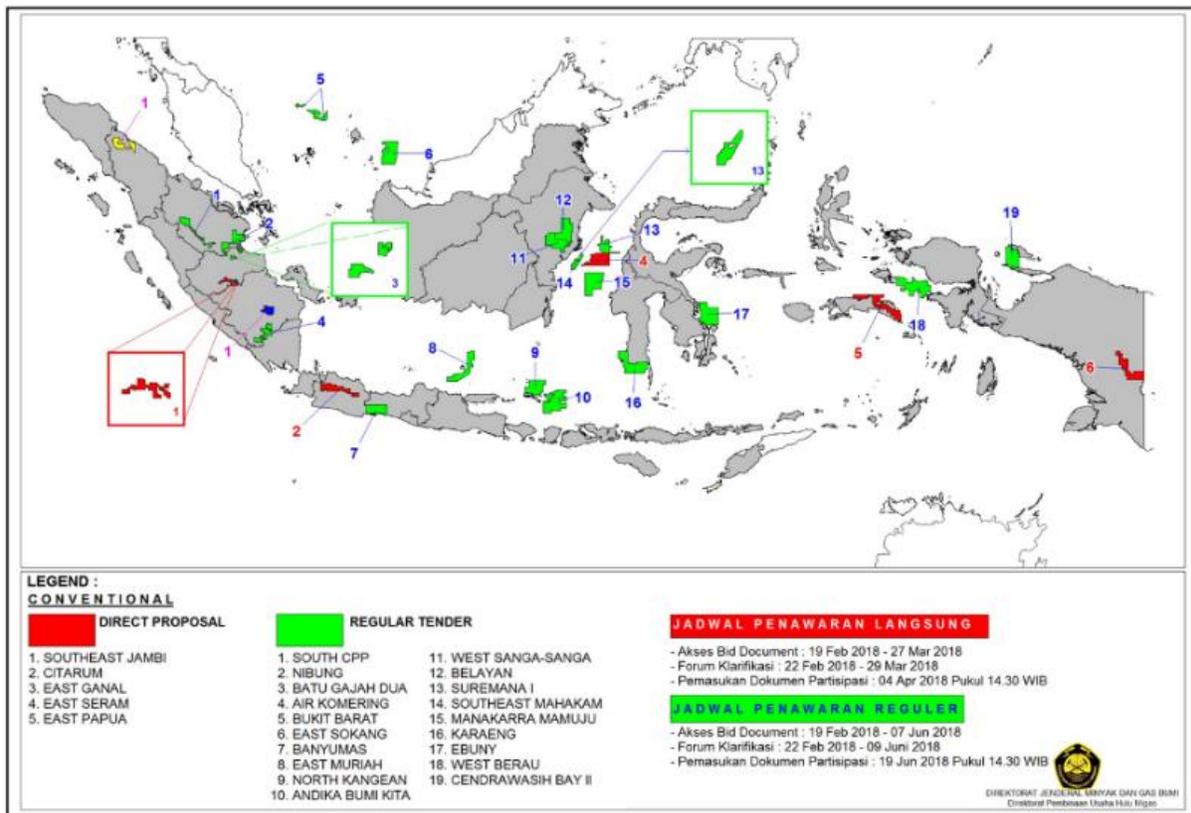


Diagram 22. Penawaran WK Migas Konvensional Tahap I Tahun 2018

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 52 Tahun 2017 mengenai perubahan atas Permen 8 Tahun 2017 tentang PSC Gross Split, seluruh WK memiliki bagi hasil (*base split*) yang sama yaitu 57:43 untuk minyak bumi dan 52:48 untuk gas bumi. *Split* tersebut dapat disesuaikan terhadap komponen variabel yang ditentukan pada saat pengembangan lapangan serta disesuaikan terhadap komponen progresif yang ditentukan pada masa produksi. Melalui penerapan skema PSC Gross Split diharapkan dapat mendorong kegiatan Eksplorasi dan Produksi lebih efektif dan cepat, mendorong para kontraktor Migas dan Industri Penunjang Migas untuk lebih efisien, mendorong proses bisnis Kontraktor Hulu Migas (KKKS) dan SKK Migas menjadi lebih

sederhana dan akuntabel, dan mendorong KKKS untuk mengelola biaya operasi dan investasinya dengan berpijak kepada sistem keuangan korporasi bukan sistem keuangan negara.

Sejak tanggal 19 Februari 2018 sampai dengan 27 Maret 2018 jumlah *Bid Document* yang diakses adalah 10 (sepuluh) dokumen untuk 5 (lima) Wilayah Kerja, yaitu: WK East Ganal, Citarum, Southeast Jambi, East Seram, dan East Papua. Hasil Akhir Penawaran Langsung Tahap I Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

NO	WILAYAH KERJA, LOKASI	Peserta Lelang	PEMENANG LELANG	KETERANGAN
1.	CITARUM	1 Peserta	Ada	Pemenang Lelang: Konsorsium PT Cogen Nusantara Energi-PT Green World Nusantara, Komitmen: G&G dan Survey Seismik 2D 300 Km Bonus Tanda Tangan: US\$ 750.000
2.	EAST GANAL	2 Peserta	Ada	Pemenang Lelang: Eni Indonesia Ltd, Komitmen: Pemboran 1 Sumur Eksplorasi Bonus Tanda Tangan: US\$ 1.500.000
3.	EAST SERAM	1 Peserta	Ada	Pemenang Lelang: Lion Energy Limited, Komitmen: G&G dan Survey Seismik 2D 500 Km Bonus Tanda Tangan: US\$ 500.000
4.	SOUTHEAST JAMBI	1 Peserta	Ada	Pemenang Lelang: Konsorsium Talisman West Bengara B.V & MOECO South Sumatra Co., Ltd, Komitmen: G&G dan Survey Seismik 2D 300 Km Bonus Tanda Tangan: US\$ 500.000
5.	EAST PAPUA	Tidak Ada	Tidak Ada	-

Sejak tanggal 19 Februari 2018 sampai dengan 7 Juni 2018 jumlah *Bid Document* yang diakses adalah 7 (tujuh) dokumen untuk 5 (lima) Wilayah Kerja, yaitu WK Air Komerling, Bukit Barat, Andika Bumi Kita, South East Mahakam, dan Ebuny. Hasil Akhir Lelang Reguler Tahap I Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

NO	WILAYAH KERJA, LOKASI	PESERTA LELANG	PEMENANG LELANG	KETERANGAN
1.	Andika Bumi Kita	Tidak Ada	Tidak Ada	-
2.	Air Komerling	Tidak Ada	Tidak Ada	-
3.	Banyumas	Tidak Ada	Tidak Ada	-
4.	Batu Gajah Dua	Tidak Ada	Tidak Ada	-
5.	Belayan	Tidak Ada	Tidak Ada	-
6.	Bukit Barat	Tidak Ada	Tidak Ada	-
7.	Cendrawasih Bay II	Tidak Ada	Tidak Ada	-

NO	WILAYAH KERJA, LOKASI	PESERTA LELANG	PEMENANG LELANG	KETERANGAN
8	East Muriah	Tidak Ada	Tidak Ada	-
9	East Sokang	Tidak Ada	Tidak Ada	-
10	Ebuny	Tidak Ada	Tidak Ada	-
11	Karaeng	Tidak Ada	Tidak Ada	-
12	Manakarra Mamuju	Tidak Ada	Tidak Ada	-
13	Nibung	Tidak Ada	Tidak Ada	-
14	North Kangean	Tidak Ada	Tidak Ada	-
15	South CPP	Tidak Ada	Tidak Ada	-
16	South East Mahakam	Tidak Ada	Tidak Ada	-
17	Suremana I	Tidak Ada	Tidak Ada	-
18	West Berau	Tidak Ada	Tidak Ada	-
19	West Sanga-Sanga	Tidak Ada	Tidak Ada	-

Terdapat 4 WK hasil lelang tahap I tahun 2018 yaitu WK Citarum dengan pemenang lelang Konsorsium PT Cogen Nusantara Energi-PT Green World Nusantara, East Ganal dengan pemenang lelang Eni Indonesia Ltd, East Seram dengan pemenang lelang Lion Energy Limited, dan Southeast Jambi dengan pemenang lelang Konsorsium Talisman West Bengara B.V & MOECO South Sumatra Co., Ltd.

Penandatanganan KKS Hasil Penawaran WK Migas Konvensional Tahap I Tahun 2018

No.	Wilayah Kerja	KKKS	Signature Bonus	Komitmen pasti
1.	Citarum	Konsorsium PT Cogen Nusantara Energi-PT Hutama Wirusaha Energi	\$750.000	G&G, Seismik 2D 200 Km
2.	East Ganal	ENI East Ganal Limited	\$1.500.000	G&G, 1 sumur
3.	East Seram	Balam Energy Pte Ltd.	\$500.000	G&G, Seismik 2D 500 Km
4.	Southeast Jambi	Konsorsium Repsol Exploracion South East Jambi B.V.-MOECO Southeast Jambi B.V.	\$500.000	G&G, Seismik 2D 300 Km

Penawaran WK Migas Konvensional Tahap II Tahun 2018

Pada tahun 2018, Pemerintah mengumumkan Penawaran Wilayah Kerja Migas Konvensional tahap II dengan jumlah penawaran sebanyak 7 wilayah kerja yang terdiri dari 4 (empat) wilayah kerja produksi yang ditawarkan melalui lelang reguler dan 3 (tiga) wilayah kerja eksplorasi yang ditawarkan melalui lelang reguler sebagaimana terlihat pada Gambar 2.

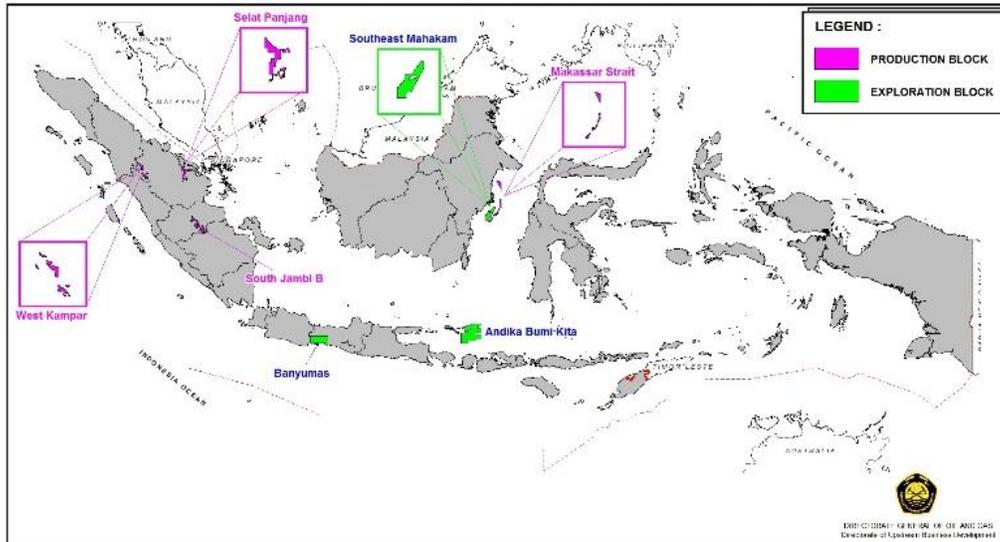


Diagram 23. Penawaran WK Migas Konvensional Tahap II Tahun 2018

Sampai dengan batas waktu pemasukan dokumen, jumlah *Bid Document* yang diakses adalah 22 (dua puluh dua) dokumen untuk 7 (tujuh) Wilayah Kerja, yaitu: WK Andika Bumi Kita, Banyumas, Southeast Mahakam, Makassar Strait, Selat Panjang, South Jambi B, dan West Kampar. Dari 22 (dua puluh dua) dokumen yang diakses, terdiri dari 1 (satu) dokumen untuk WK Eksplorasi Banyumas dan 21 (dua puluh satu) dokumen untuk WK Produksi, 5 (lima) Makassar Strait, 7 (tujuh) Selat Panjang, 5 (lima) South Jambi B, dan 4 (empat) West Kampar. Hasil akhir Penawaran Tahap II Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

NO	Wilayah Kerja	Peserta Lelang	Pemenang Lelang	Keterangan
1.	Andika Bumi Kita	Tidak Ada	Tidak Ada	-
2.	Banyumas	1 Peserta	Ada	Pemenang Lelang: PT Minarak Brantas Gas Komitmen: G&G, dan Pemboran 1 Sumur Eksplorasi Bonus Tanda Tangan: US\$ 500.000
3.	Southeast Mahakam	Tidak Ada	Tidak Ada	-
4.	Makassar Strait	1 Peserta	Tidak Ada	Penawaran peserta lelang tidak sesuai dengan T&C
5.	Selat Panjang	2 Peserta	Tidak Ada	Penawaran peserta lelang tidak memenuhi persyaratan minimal dan tidak sesuai dengan T&C
6	South Jambi B	1 Peserta	Ada	Pemenang Lelang: Hong Kong Jindi Group CO., Ltd Komitmen:

NO	Wilayah Kerja	Peserta Lelang	Pemenang Lelang	Keterangan
				G&G, Survey Seismik 3D 400 Km ² , Survey Seismik 2D 300 Km ² , dan Pemboran 3 Sumur Eksplorasi Bonus Tanda Tangan: US\$ 5.000.000
7	West Kampar	2 Peserta	Tidak Ada	-

Terdapat 2 WK hasil lelang tahap II tahun 2018 yaitu WK Banyumas dengan pemenang lelang PT Minarak Brantas Gas dan WK South Jambi B dengan pemenang lelang Hong Kong Jindi Group CO., Ltd.

Penandatanganan KKS Hasil Penawaran WK Migas Konvensional Tahap II Tahun 2018

No.	Wilayah Kerja	KKKS	Signature Bonus	Komitmen pasti
1.	Banyumas	PT Minarak Banyumas Gas	\$500.000	G&G, 1 sumur
2.	South Jambi B	Jindi South Jambi B Co. Ltd.	\$5.000.000	G&G, Seismik 2D 300 Km, Seismik 3D 400 Km ² , 3 sumur

Penawaran WK Migas Konvensional Tahap III Tahun 2018

Pada Penawaran Tahap III jumlah penawaran sebanyak 4 (empat) wilayah kerja migas yang ditawarkan melalui penawaran langsung yaitu:

1. South Andaman, Lepas Pantai Aceh,
2. South Sakakemang, Daratan Sumatera Selatan,
3. Anambas, Lepas Pantai Natuna Kepri,
4. Maratua, Daratan dan Lepas Pantai Kaltara dan Kaltim.

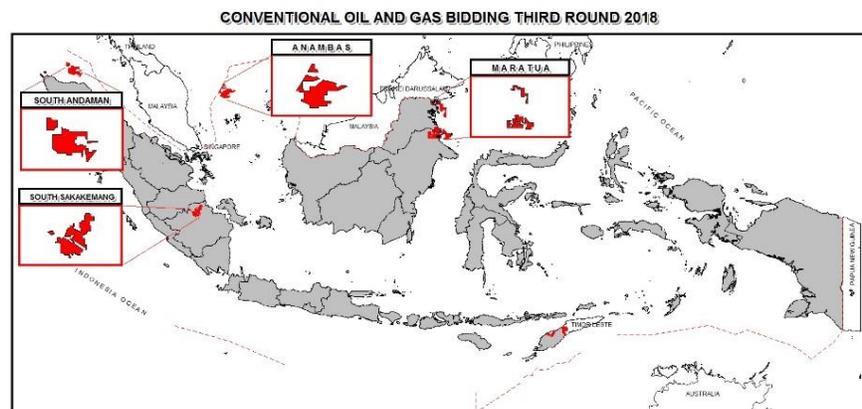


Diagram 24. Penawaran WK Migas Konvensional Tahap III Tahun 2018

Sampai dengan batas waktu pemasukan dokumen, jumlah *Bid Document* yang diakses adalah 6 (enam) dokumen untuk 4 (empat) Wilayah Kerja dengan rincian 2 (dua) dokumen untuk WK South Andaman, 2 (dua) South Sakakemang, 1 (satu) Anambas, dan 1 (satu) Maratua. Hasil Akhir Penawaran Tahap III Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

NO	Wilayah Kerja	Peserta Lelang	Pemenang Lelang	Keterangan
1.	South Andaman	1 Peserta	Ada	Pemenang Lelang: PEARLOIL (THERALITE) LIMITED Komitmen: G&G, Survey Seismik 3D 400 Km2, Bonus Tanda Tangan: US\$ 2.000.000
2.	South Sakakemang	1 Peserta	Ada	Pemenang Lelang: Konsorsium TALISMAN JAVA B.V. dan MITSUI OIL EXPLORATION Co. Ltd. Komitmen: G&G, Survey Seismik 2D 250 km, Bonus Tanda Tangan: US\$ 2.000.000
3.	Anambas	-	Tidak ada	-
4.	Maratua	1 Peserta	Ada	Pemenang Lelang: PT PERTAMINA (PERSERO) Komitmen: G&G, Survey Seismik 3D 250 km, Bonus Tanda Tangan: US\$ 2.000.000

Terdapat 4 WK hasil lelang Tahap III tahun 2018 yaitu WK South Andaman dengan pemenang lelang PEARLOIL (THERALITE) LIMITED, WK South Sakakemang dengan pemenang lelang Konsorsium TALISMAN JAVA B.V. dan MITSUI OIL EXPLORATION Co. Ltd., WK Maratua dengan pemenang lelang PT PERTAMINA (PERSERO). Proses penandatanganan 4 KKS hasil penawaran Tahap III Tahun 2018 rencananya akan dilaksanakan pada Februari 2019 karena masih menunggu pembayaran *signature bonus*, penyampaian jaminan pelaksanaan, dan pembentukan entitas baru dari BU/BUT pemenang lelang.

Signature bonus 2009-2018

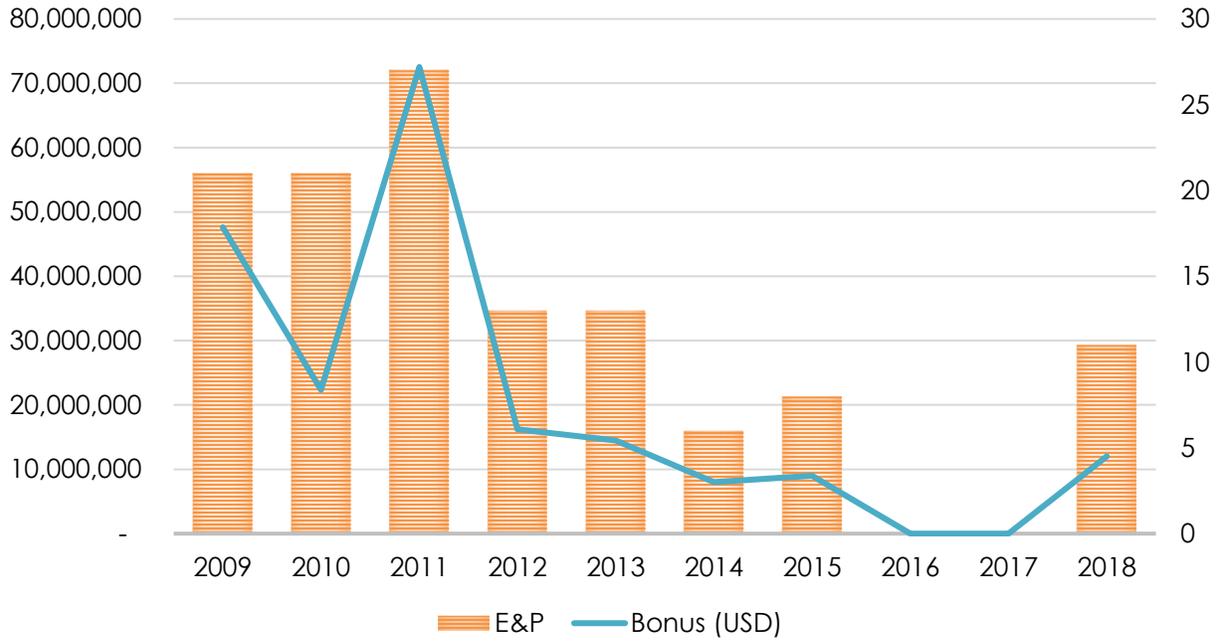


Diagram 25. Statistik Signature Bonus Tahun 2013-2018

Penandatanganan KKS Baru 2009-2017

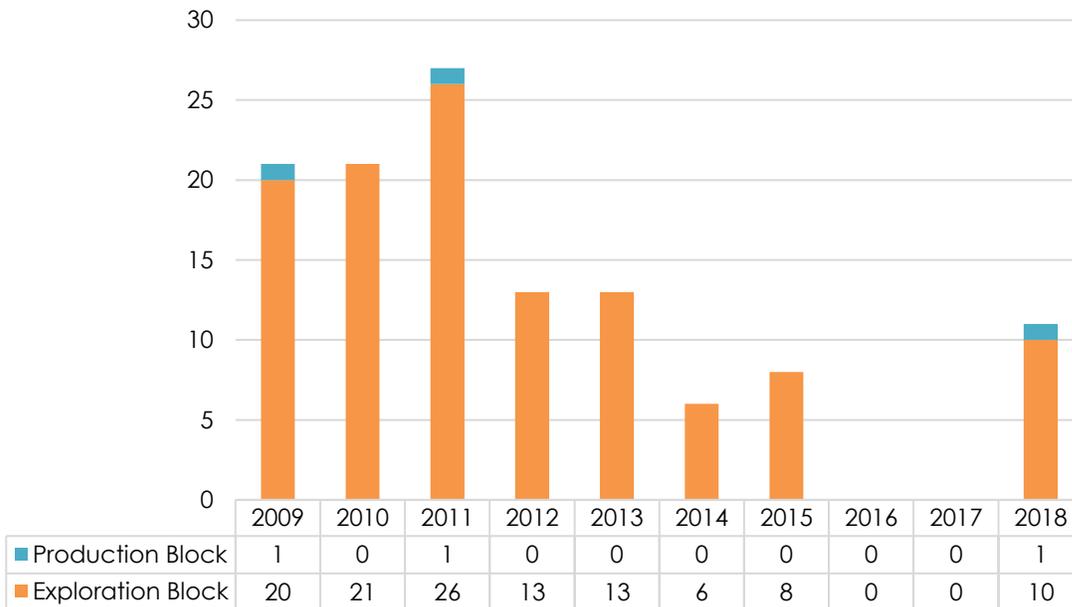


Diagram 26. Statistik Penandatanganan KKS Baru 2013-2018

Pencapaian realisasi penandatanganan KKS migas konvensional mencapai target capaiannya sebagaimana tercantum dalam Renstra Ditjen Migas 2015-2019 yaitu 6 atau terealisasi sebesar 100%. Realisasi ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi tahun lalu yang sebesar 5. Jika dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya, terjadi penurunan realisasi akibat faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal yang dimaksud adalah belum ekonomisnya harga minyak mentah dunia yang ikut mempengaruhi keputusan investor untuk berpartisipasi pada Penawaran WK Migas Konvensional. Hal ini tercermin pada beberapa pelaksana Studi Bersama yang mengajukan permohonan penundaan lelang wilayah yang telah dilakukan Studi Bersama. Sensitivitas realisasi penandatanganan wilayah kerja migas terhadap harga minyak mentah dapat terlihat pada diagram berikut ini:

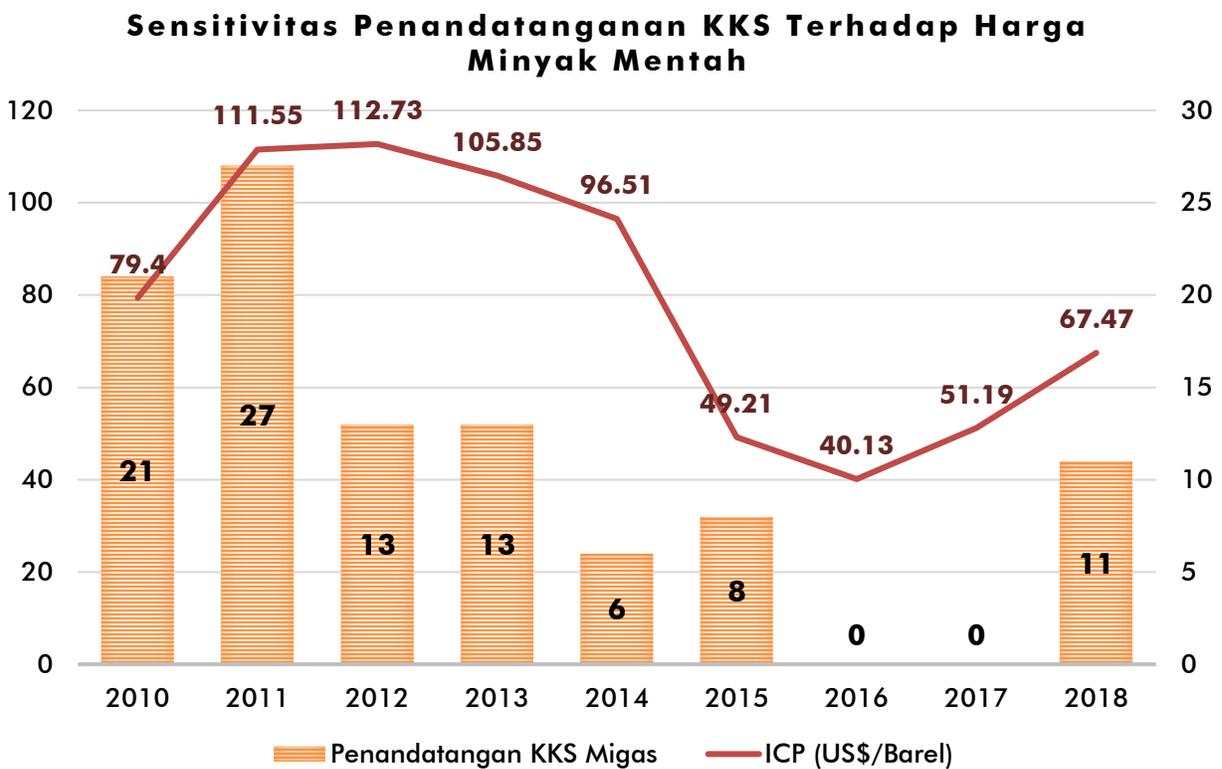


Diagram 27. Sensitivitas Penandatanganan KKS Terhadap Harga Minyak Mentah

Berdasarkan hasil kinerja 2018, diketahui bahwa faktor internal yang mempengaruhi realisasi penandatanganan wilayah kerja migas adalah faktor *terms & conditions* yang dinilai kurang menarik. Untuk itu, hasil Penawaran WK Migas Konvensional Tahun 2018 menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan *terms & conditions* yang lebih menarik untuk WK Migas yang akan dilelang pada tahun 2019 sehingga dapat menarik minat investor untuk melaksanakan

kegiatan eksplorasi di Indonesia. Upaya Pemerintah dalam menyusun *terms & conditions* yang lebih menarik diantaranya:

1. Menyelesaikan status utang dan data pada WK Produksi sebelum WK tersebut dilelang.
2. Mengurangi nilai komitmen pasti 3 tahun pertama dengan mengurangi luasan area yang disurvei, tidak mempersyaratkan sumur eksplorasi pada cekungan frontier dan laut dalam, wilayah dengan keterbatasan data *subsurface*, dan wilayah dengan risiko geologi *high risk*.

Pada tahun 2019, sesuai Renstra Ditjen Migas 2015-2019, Ditjen Migas menargetkan 6 (enam) penandatanganan KKS Migas Konvensional. Dalam rangka mencapai target, Ditjen Migas senantiasa memperbarui prosedur kerja, meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran dan sumber daya manusia, menyusun regulasi yang dapat menarik minat investasi serta berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait lainnya. Khusus untuk peningkatan akuntabilitas dan efektivitas kegiatan penawaran WK Migas, sejak tahun 2016 telah dimulai penerapan Penawaran WK Migas melalui elektronik yaitu e-lelang yang saat ini diterapkan mulai dari Pengumuman s.d. Forum Klarifikasi. Situs tersebut dalam proses pengembangan untuk peningkatan kemudahan penggunaan dan penyampaian informasi serta keamanan dari serangan oknum yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, Ditjen Migas juga telah menyiapkan aplikasi Sistem Informasi Studi Bersama yang diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan Studi Bersama. Sistem ini dalam tahap pengujian keamanan dan rencananya akan diterapkan pada tahun 2019.

Promosi WK Migas Konvensional

Kegiatan Promosi WK Migas Konvensional tidak terlaksana sesuai target yang ditetapkan. Alokasi anggaran untuk kegiatan Promosi WK dipindahkan untuk pelaksanaan Penawaran WK Migas Tahap II Tahun 2018. Pada tahun 2019, dikarenakan keterbatasan anggaran, Ditjen Migas tidak merencanakan untuk mengadakan promosi WK Migas Konvensional berupa partisipasi (*booth stand*) pada pameran. Bentuk promosi yang sedang direncanakan berupa kunjungan langsung ke perusahaan-perusahaan calon investor untuk berdiskusi mengenai minat eksplorasi di Wilayah Kerja baru.

Peranan Penerapan Skema *Gross Split* dalam Investasi Hulu Migas

Pada tahun 2017 Pemerintah mengambil kebijakan untuk mengubah skema bagi hasil *cost recovery* yang selama ini berjalan menjadi skema bagi hasil *gross split* sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 52 Tahun 2017 mengenai perubahan atas Permen 8 Tahun 2017

tentang PSC *Gross Split*. Penerapan *Gross Split* diberlakukan pada KKS Wilayah Kerja baru yang ditawarkan dan KKS Wilayah Kerja yang diperpanjang dan dialihkelolakan. Jika membandingkan minat investor pada penawaran beberapa tahun sebelumnya (2015 dan 2016), kebijakan penerapan skema *Gross Split* menuai kesuksesan yang diindikasikan melalui hasil penawaran WK tahun 2017 (5 KKS telah ditandatangani) dan hasil penawaran tahun 2018 (6 KKS telah ditandatangani dan 3 WK telah ditetapkan pemenangnya)

36 WILAYAH KERJA MIGAS TELAH GUNAKAN SKEMA **GROSS SPLIT**

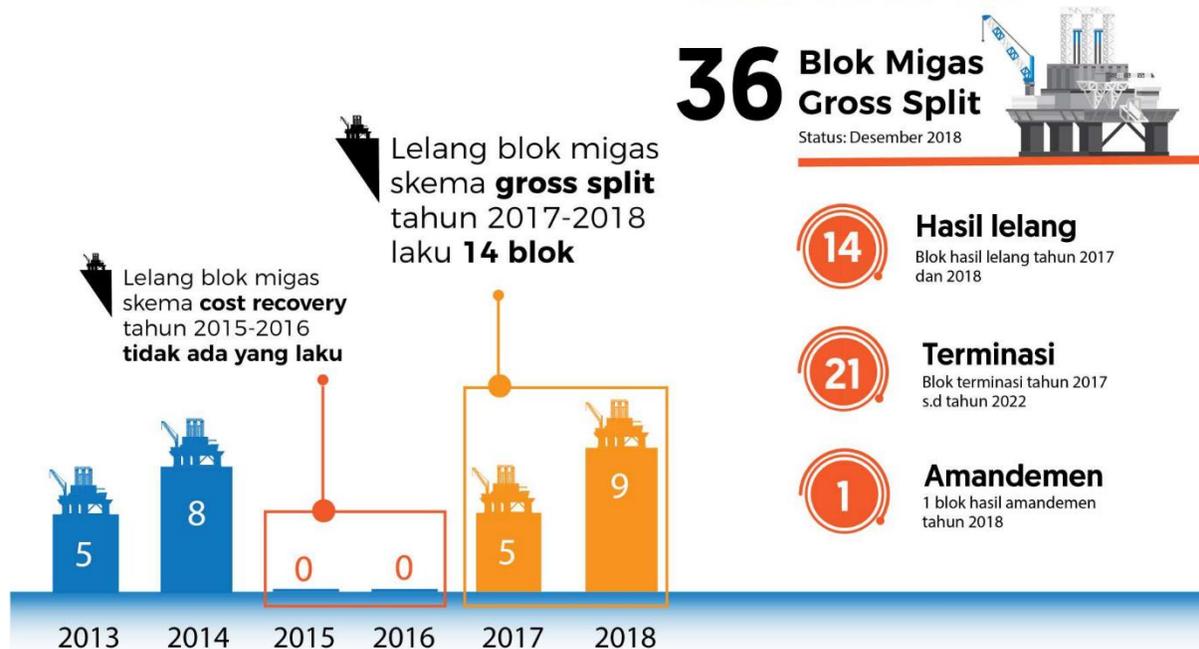


Diagram 28. Peningkatan Minat Investasi Hulu Migas Pascapenerapan *Gross Split*

Selain membenahi sistem bagi hasil untuk menarik minat para investor di sektor Migas, ESDM juga membenahi cara kerja di sektor ini dengan reformasi birokrasi termasuk memangkas bisnis proses agar investasi menjadi lebih bergairah dan memberi kepastian. Sebanyak 20 wilayah kerja dan 1 amandemen dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari satu tahun.

Investasi Industri Migas di Indonesia meningkat dengan tajam dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Indikasi ini ditunjukkan dengan besaran angka yang diperoleh oleh negara melalui bentuk *Signature Bonus* dan Komitmen Kerja Pasti. *Signature bonus* adalah semacam uang tanda jadi yang dibayarkan di awal oleh operator minyak/gas yang akan mengelola lapangan atau

wilayah kerja. Sementara Komitmen Kerja Pasti adalah rincian program dari operator minyak/gas yang berisi aktivitas, waktu pelaksanaan dan alokasi dana yang akan dilakukan selama kurun waktu 5 tahun pertama.

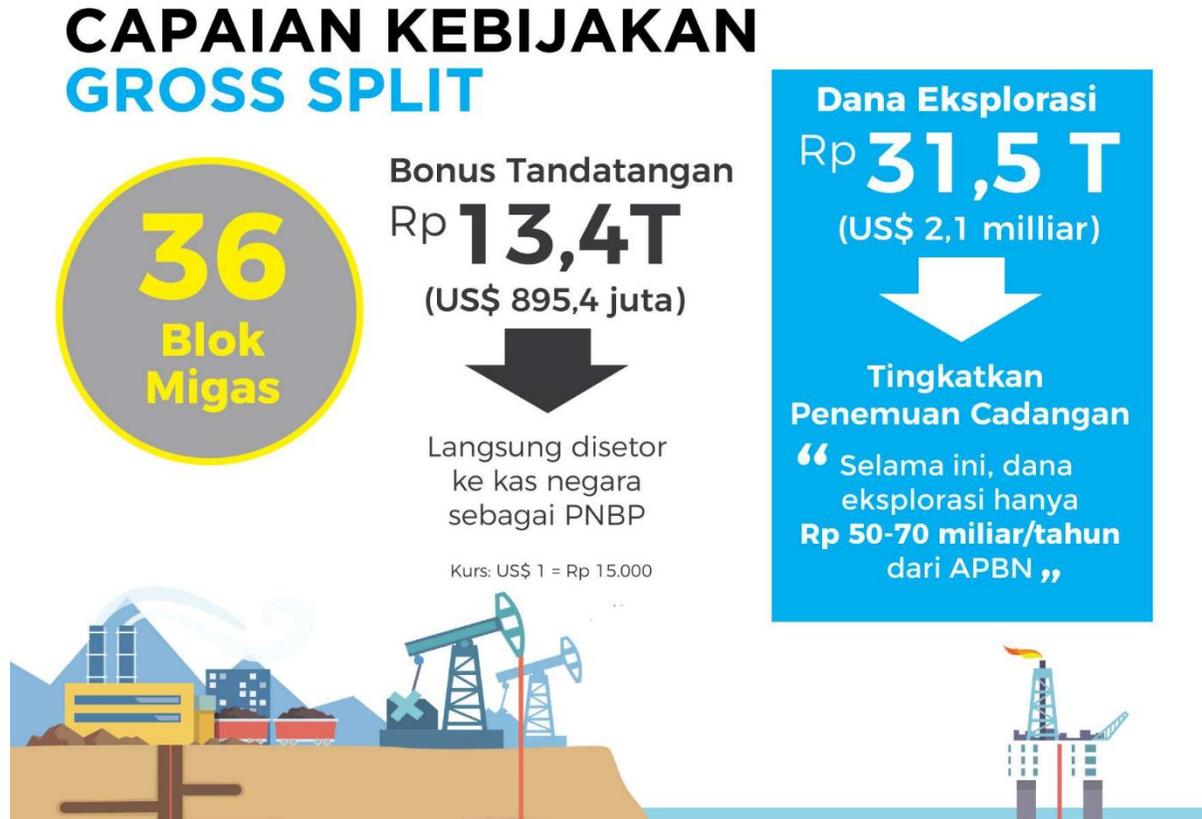


Diagram 29. Nilai Investasi Hulu Migas Tahun 2018

Sampai dengan tahun 2018, dengan sistem ini, dari 36 WK tersebut, negara memperoleh pemasukan sekitar Rp. 13.4 Triliun dari *Signature Bonus*. Dan, selain jumlah tersebut, negara juga berhasil mengumpulkan dana sekitar Rp. 31.5 Triliun untuk kegiatan eksplorasi Migas selama 10 tahun ke depan melalui Komitmen Kerja Pasti.

3.1.4 Penandatanganan Wilayah Kerja Migas Non Konvensional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
Optimalisasi Penyediaan Energi Fosil	Jumlah penandatanganan KKKS Migas Non Konvensional	KKKS	2	0	0%

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Jenderal Migas Tahun Anggaran 2018, Ditjen Migas diharapkan dapat mengoptimalkan penyediaan energi fosil dengan indikator kinerja meliputi *lifting* Migas, jumlah penandatanganan KKS Migas baik Konvensional maupun Non Konvensional serta cadangan Migas.

Sehubungan dengan sasaran tersebut di atas, Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas Tahun 2018 mendapat peran dalam menyelenggarakan kegiatan penawaran wilayah kerja baru migas. Output dari kegiatan tersebut adalah Penandatanganan Kontrak Kerja Sama (KKS) Wilayah Kerja Migas Non Konvensional dengan target 2 KKS.

Untuk Penawaran Wilayah Kerja Migas Non Konvensional (WK MNK) pada tahun 2018, dengan mekanisme sesuai Peraturan Menteri ESDM No. 05 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penetapan Dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak Dan Gas Bumi Non Konvensional dan dengan Bentuk Kontrak Kerja Sama sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No 08 tahun 2018 tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*, ditawarkan 1 Wilayah Kerja Migas Non Konvensional (*Shale Hydrocarbon*) dan 1 Wilayah Kerja Gas Metana Batubara (GMB) melalui Penawaran Langsung serta 2 Wilayah Kerja Gas Metana Batubara melalui Lelang Reguler sebanyak, yaitu :

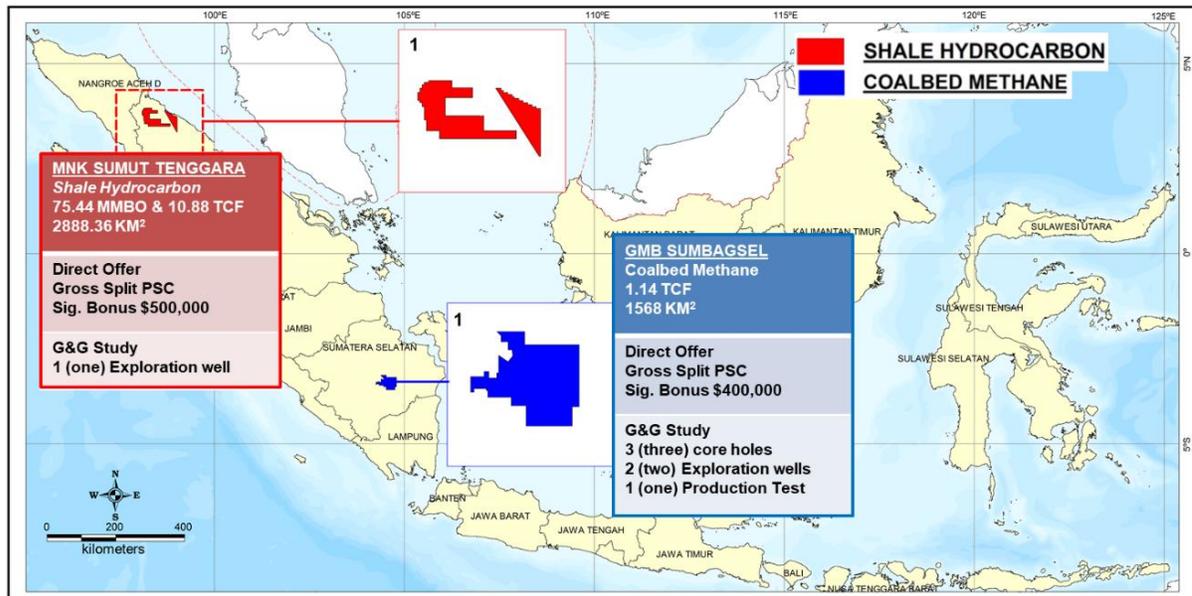


Diagram 30. Peta Penawaran Langsung WK Migas Non Konvensional 2018

Penawaran WK Migas Non Konvensional tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Wilayah Kerja	Provinsi
1.	MNK Sumut Tenggara	Sumatera Barat

No.	Wilayah Kerja	Provinsi
2.	GMB Sumbagsel	Sumatera Selatan

Penawaran WK Migas Non Konvensional tersebut diumumkan Oleh Wakil Menteri ESDM Di kementerian ESDM dengan Jadwal Sebagai Berikut:

2018 Tender Schedule

DIRECT PROPOSAL TENDER

Access Bid Document : **February 19 - March 27, 2018**
Clarification Forum : February 22 - March 29, 2018
End of Bid Submission : **April 4, 2018**

REGULAR TENDER

Access Bid Document : **February 19 - June 7, 2018**
Clarification Forum : February 22 - June 9, 2018
End of Bid Submission : **June 19, 2018**

<http://e-wkmigas.esdm.go.id>

Diagram 31. *Tender Schedule*

Untuk hasil dari Lelang 2 Wilayah Kerja tersebut dapat disampaikan hasil berupa :

Statistik Penawaran dan Penandatanganan WK Migas Non Konvensional



Diagram 32. Statistik Penawaran dan Penandatanganan WK Migas Non Konvensional

Selain hal tersebut, untuk meningkatkan keberhasilan dalam penawaran wilayah kerja tahun ini, Pemerintah telah memperpanjang jadwal lelang Wilayah Kerja sesuai Surat Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi:

Revisi Jadwal Lelang Reguler dan Penawaran Langsung WK Migas Non Konvensional dapat dilihat pada tabel berikut ini:

	Direct Offer	Regular Tender
Access Bid Document	19 Feb–27 Mar 2018	19 Feb–7 Jun 2018
Clarification Forum	22 Feb–29 Mar 2018	22 Feb–9 Jun 2018
Documents Submission Deadline	4 Apr 2018	19 Jun 2018

Penambahan Jadwal tersebut bertujuan untuk memberikan waktu yang cukup bagi calon peserta lelang Wilayah Kerja Migas Tahun 2018 untuk mengurus dokumen dokumen yang dipersyaratkan.

Hasil lelang Sebagai Berikut :

No	NAMA BLOK	PEMBELI BID	Peserta Lelang	Keterangan
1	MNK Sumut Tenggara	Bukit Energy Resources North Sumatra Pte. Ltd	Bukit Energy Resources North Sumatra Pte. Ltd	Bukit Energy menyatakan tidak dapat melanjutkan dalam melengkapi persyaratan lelang dikarenakan pada saat ini mereka sedang menghadapi permasalahan internal berupa diakuisisinya Bukit Energy oleh Petrolia Energy
2	GMB Sumbagsel	N/A	N/A	PT. Lion Power Energy selaku pelaku JS menyampaikan permintaan maaf dan menyatakan tidak dapat berpartisipasi dalam lelang dikarenakan menahan seluruh kegiatan bisnisnya akibat permasalahan internal

Dari hasil tersebut diatas, Beberapa penyebab dari ketidakberhasilan penawaran Wilayah Kerja Migas Non Konvensional, antara lain:

- Belum terbuktinya potensi Migas Non Konvensional khususnya *Shale Gas* di Indonesia
- Belum terdapatnya WK Gas Metana Batubara yang memproduksi secara ekonomis (POD)
- Gagalnya beberapa proyek pengembangan migas non konvensional selain di Amerika dan China menyebabkan investor berhati – hati dalam pengembangan MNK di Lapangan Baru
- Tidak stabilnya Harga Minyak Dunia sehingga menyebabkan investor perlu perhitungan yang matang dalam investasi dalam Migas Non Konvensional. Ini dapat terlihat dari adanya indikasi penurunan jumlah penandatanganan WK MNK maupun studi bersama pada tahun atau setahun setelah adanya penurunan harga minyak yang cukup signifikan selama lima tahun terakhir, terlepas dari jumlah penawaran WK MNK yang diterbitkan oleh Pemerintah.

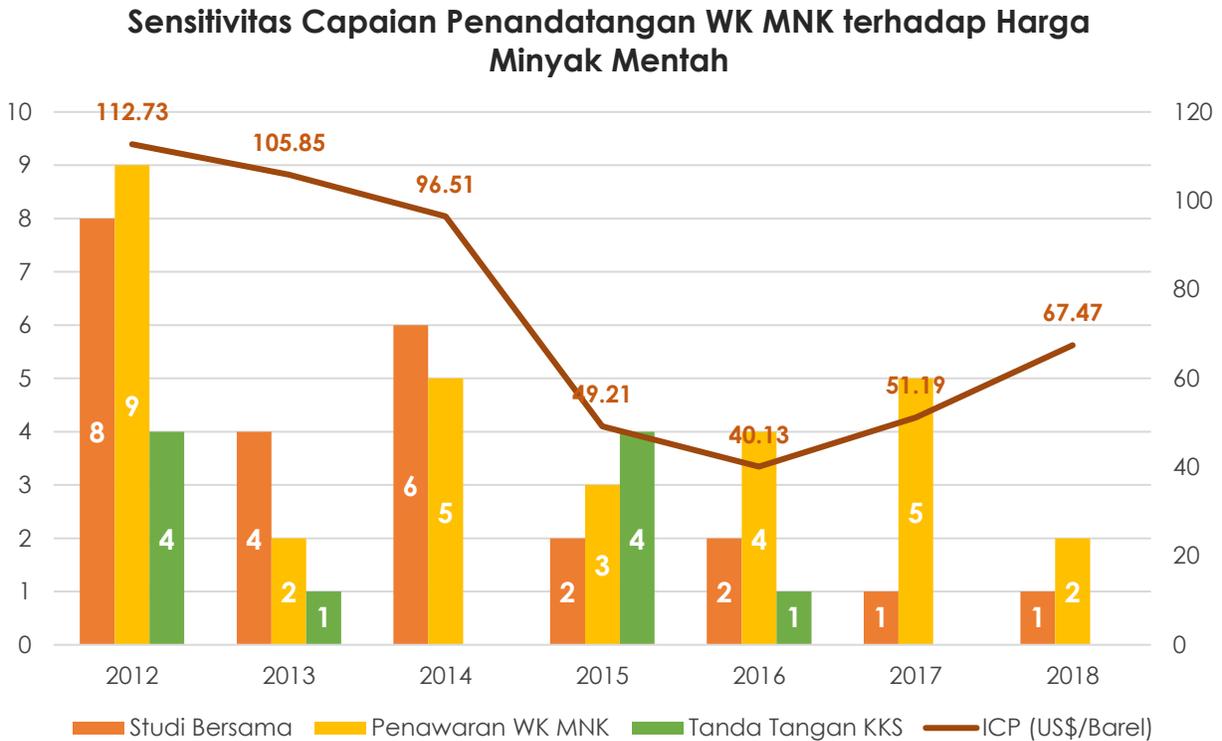


Diagram 33. Sensitivitas Capaian Penandatanganan WK MNK terhadap Harga Minyak Mentah

Sebagai upaya percepatan pengusaha migas non konvensional pada tahun 2018 telah dilakukan :

- Penyusunan Rencana aksi kegiatan Trilateral Ditjen Migas, Badan Geologi, dan Balitbang dalam rangka percepatan pengusaha WK MNK
- Penyusunan *Roadmap* penyiapan Wilayah Kerja WK MNK untuk percepatan penemuan cadangan WK Migas Non Konvensional
- Pembahasan draf revisi Peraturan Menteri ESDM No. 05 tahun 2018 tentang Tata Cara Penyiapan dan Penawaran Wilayah Kerja Migas Non Konvensional dengan salah satu poinnya adalah mengurangi Jaminan Pelaksanaan Studi Bersama dan tidak ada hak istimewa terhadap KKKS Eksisting dalam pengusaha MNK sehingga investor lebih bebas masuk dalam pengembangan Migas Non Konvensional di Indonesia

Adapun strategi yang akan dilakukan untuk meningkatkan jumlah penandatanganan wilayah kerja migas non konvensional antara lain adalah:

- Melakukan promosi yang lebih efektif kepada investor baik di dalam maupun di luar negeri untuk mengembangkan WK Migas Non Konvensional di Indonesia.

- Akan menghimbau kepada setiap KKKS produksi untuk melakukan Studi potensi Migas Non Konvensional di wilayah kerja masing – masing sebagai pembuktian potensi migas non konvensional di Indonesia
- Revisi Peraturan Menteri ESDM No. 05 tahun 2018 tentang Tata Cara Penyiapan dan Penawaran Wilayah Kerja Migas Non Konvensional dengan salah satu poinnya adalah mengurangi Jaminan Pelaksanaan Studi Bersama dan tidak ada hak istimewa terhadap KKKS Eksisting dalam perusahaan MNK sehingga investor lebih bebas masuk dalam pengembangan Migas Non Konvensional di Indonesia
- Renyusunan *Roadmap* penyiapan Wilayah Kerja WK MNK untuk percepatan penemuan cadangan WK Migas Non Konvensional

3.1.5 Cadangan Minyak Bumi

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Optimalisasi Penyediaan Energi Fosil	Cadangan minyak bumi	MMSTB	6441	7512.22	116.63%

Cadangan minyak bumi dan kondensat status 1 Januari 2018 adalah sebesar 7,51 milyar barel. Cadangan tersebut mengalami penurunan sebesar 0,02 milyar barel (0,29%) dibandingkan cadangan minyak bumi status 1 Januari 2017 sebesar 7,53 milyar barel. Penurunan sebesar 0.22 milyar barel tersebut berasal dari:

- Produksi minyak bumi dan kondensat tahun 2017 sebesar 0,29 milyar barel;
- Perubahan penurunan cadangan yang besar terutama terjadi pada cadangan terbukti lapangan-lapangan dari kontraktor Husky, PT.Odira Energy Karang Agung, PHE WMO, Saka Indonesia Pangkah Ltd., ENI Muara Bakau, PT. Bumi Siak Pusako, Talisman Jambi Merang, Petronas (Ketapang), PetroChina International Jabung, Medco S.-Rimau, dan CITIC Seram Energy Ltd. sebesar 0.14 milyar barel
- Penurunan cadangan Kontraktor karena adanya perhitungan ulang dengan adanya pengeboran-engeboran baru, ataupun oleh adanya data penunjang baru yang lain.

Namun demikian, selain penurunan cadangan minyak bumi dan kondensat, terdapat juga penambahan cadangan yang disebabkan oleh:

a. Kenaikan cadangan terutama terjadi pada lapangan-lapangan dari kontraktor Mobil Cepu Ltd., PHE ONWJ, Medco E&P Tomori, PetroChina East Java, PT. Tropik Energi Pandan, PHE WMO, KSO Petro Papua Mogoi W, KSO Energy Tanjung Tiga, KSO Santika Pendopo E, Petronas (Ketapang), Medco E&P S.-Rimau, KSO Techwin Benakat T, PetroChina International Jabung, dan KSO Tawun Gegunung E sebesar 0.11 milyar barel.

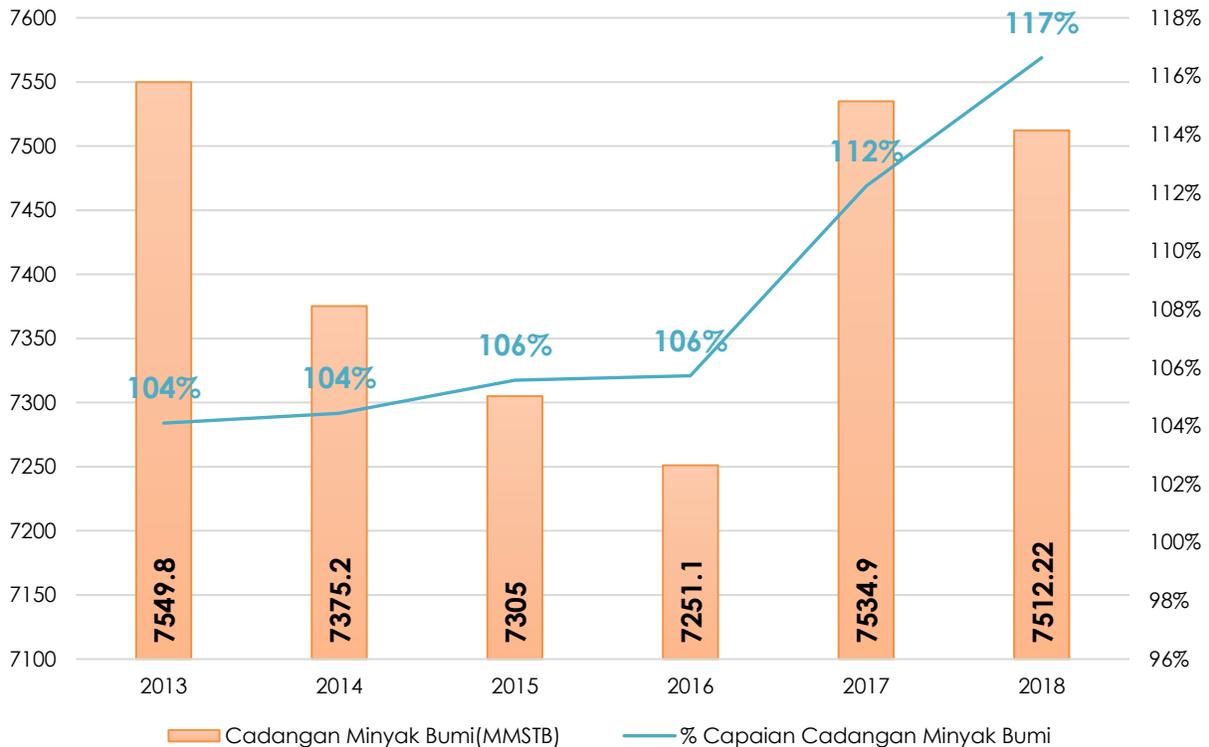


Diagram 34. Capaian Indikator Cadangan Minyak Bumi 2013-2018

Terlepas dari adanya penurunan cadangan minyak bumi, capaian kinerja cadangan minyak bumi tahun 2018 masih melebihi target yang telah ditetapkan dengan persentase capaian sebesar 117%. Angka persentase ini justru melebihi persentase capaian tahun sebelumnya yang hanya mencapai 112%.

3.1.6 Cadangan Gas Bumi

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Optimalisasi Penyediaan Energi Fosil	Cadangan gas bumi	TCF	143	142.72	99.80%

Cadangan gas bumi status 1 Januari 2018 adalah sebesar 135,55 TSCF. Cadangan tersebut mengalami penurunan sebesar 7,17 TSCF (5,02%) dibandingkan cadangan gas bumi status 1 Januari 2017 sebesar 142,72 TSCF. Adanya penurunan jumlah volume cadangan gas bumi untuk status 1 Januari tahun 2018 ini menyebabkan adanya penurunan capaian volume cadangan gas bumi di tahun 2018 dibandingkan 2017. Persentase capaian gas bumi di tahun 2018 menjadi 95%, turun dari pencapaian tahun 2017 sebesar 98%.

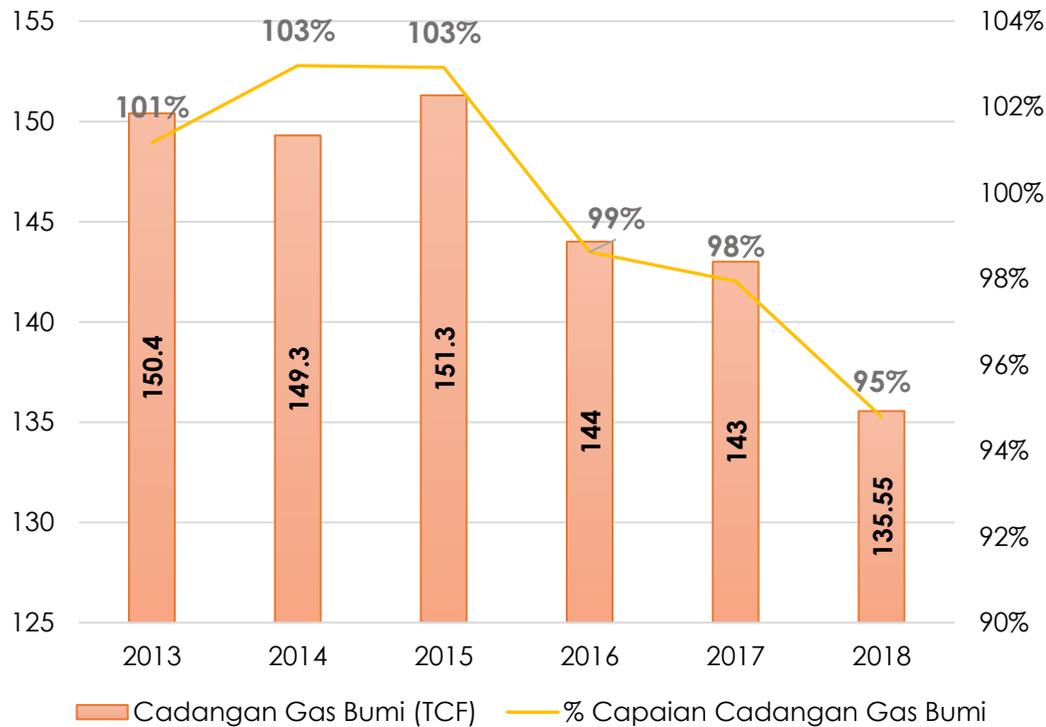


Diagram 35. Capaian Indikator Cadangan Gas Bumi 2013-2018

Penurunan cadangan gas bumi tersebut berasal dari:

- Produksi gas bumi tahun 2017 sebesar 2,78 TSCF;
- Penurunan cadangan ConocoPhillips (Grissik), BP Berau Ltd., PHE ONWJ, PT Pertamina EP Asset-2 dan Asset-5, Talisman Jambi Merang, BP Muturi NBV, ENI Muara Bakau, Husky, PHE WMO, CNOOC SES, Ltd., ConocoPhillips (Jambi), PHE NSB, Energy Equity Epic (Sengkang), PT. Odira Energy Karang Agung, dan KSO Indrilco Hulu Energy, PHE NSO, Medco E&P Natuna, Saka Indonesia Pangkah, Ltd. dan Salamander Energy sebesar 9,24 TSCF;

Selain penurunan cadangan gas bumi, terdapat juga penambahan cadangan yang disebabkan oleh perubahan status cadangan Kontraktor karena adanya perhitungan ulang

dengan adanya pengeboran-engeboran baru, ataupun oleh adanya data penunjang baru yang lain.

Adapun beberapa upaya yang diharapkan dapat meningkatkan cadangan gas bumi di masa depan antara lain adalah:

- a) Pergantian kontrak menjadi *gross split* yang diharapkan menaikkan laju eksplorasi sehingga meningkatkan cadangan gas bumi
- b) Optimalisasi pengawasan pelaksanaan komitmen pasti sehingga kegiatan komitmen terlaksana dan penemuan cadangan meningkat

3.2 Meningkatkan Alokasi Domestik

3.2.1 Presentasi Alokasi Gas Domestik

Pemerintah mendorong optimalisasi *energy mix* (bauran energi) untuk pemenuhan kebutuhan energi Indonesia. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional mengamanatkan perubahan paradigma dimana energi tidak lagi berperan sebagai komoditi tetapi menjadi sumber daya pembangunan nasional. Sumber daya energi nasional yang tersedia dimanfaatkan sebagai faktor produksi (input) dalam pembangunan industri nasional. Peraturan tersebut merupakan respon dari paradigma energi nasional selama ini yang menjadikannya sebagai komoditi untuk menghasilkan pemasukan bagi Pemerintah. Dengan semangat PP 70/2014, Pemerintah cq. Ditjen migas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan minyak dan gas bumi, melakukan fungsi pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap gas bumi Indonesia dengan Indikator Kinerja berupa Pemanfaatan Gas Bumi Dalam Negeri.

Dari segi pencapaian terhadap target, hasil persentase *share* gas peruntukkan domestik mencapai 63% dari total volume gas. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan target Renstra Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi 2015-2019, persentase ini masih lebih rendah dibandingkan dengan target Renstra untuk tahun 2018. Terlepas dari belum tercapainya target renstra sebagaimana ditetapkan, perlu digarisbawahi bahwa dari segi volume, alokasi gas bumi untuk kebutuhan domestik jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Ini tentu saja merupakan prestasi tersendiri bagi Pemerintah dalam upayanya memenuhi komitmennya memenuhi penyerapan gas bumi sebagai bahan baku pembangunan bangsa.

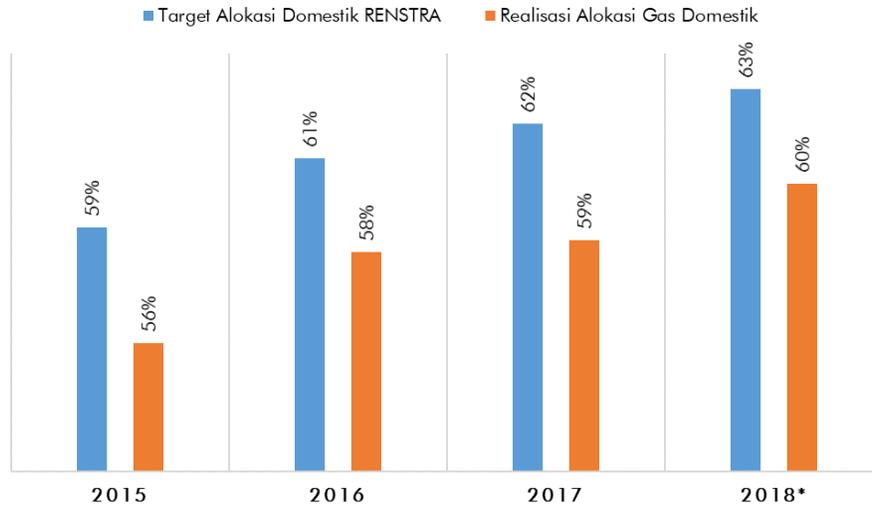


Diagram 36. Realisasi Alokasi Gas Domestik 2015-2018

Adapun Indikator Kinerja Utama Pemanfaatan Gas Bumi Dalam Negeri dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Indikator		Satuan	2015		2016		2017		2018		2019	
Pemanfaatan Gas Bumi Dalam Negeri			Target	Real	Target	Real	Target	Real	Target	Real	Target	Real
a	Persentase alokasi gas domestik (%)	%	59	55.49	61	59.10	62	58.59	63	60.53	64	60
b	Fasilitasi pembangunan FSRU/Regasifikasi on-shore/LNG terminal (Unit)	Unit	1		1		1		1		2	

Secara data yang dimiliki per Oktober 2018, diketahui bahwa Penyerapan Gas Bumi per Sektor adalah sebagai berikut:

No.	Sektor	Realization (BBTUD)	Based on GSA (BBTUD)	% Realisasi vs GSA	% MIX
1	Gas Kota	3.64	6.60	55.15	0.05
2	BBG Transportasi	9.25	19.40	47.68	0.14
3	Lifting Minyak	188.30	189.25	99.50	2.82
4	Pupuk	744.10	834.60	89.16	11.14
5	Kelistrikan	874.90	1,183.50	73.92	13.09
6	Industri	1,684.45	1,928.90	87.33	25.21

No.	Sektor	Realization (BBTUD)	Based on GSA (BBTUD)	% Realisasi vs GSA	% MIX
7	LPG Domestik	150.60	150.60	100.00	2.25
8	LNG Domestik	389.40	389.40	100.00	5.83
9	LNG Ekspor	1,889.30	1,889.30	100.00	28.27
10	Ekspor Gas Pipa	748.50	868.50	86.18	11.20
		6,682.44	7,460.05	89.58	100.00

Gas Kota (porsi 0.05%)

Untuk Pemanfaatan Gas Bumi untuk Rumah Tangga (Gas Kota), berdasarkan data, telah terbangun sebanyak 325,710 SR (2009 – 2018)¹, dengan asumsi pemakaian sebesar 17.0 m³/month, maka perkiraan jumlah pemakaian adalah 5,537,070 m³/month atau sebesar 6.5 MMSCFD. Jika menggunakan data terbangun 236,046 SR (2009 – 2017) dengan kondisi semua SR terpasang dan terpakai, maka perkiraan jumlah pemakaian adalah 5,537,070 m³/month atau sebesar 4.7 MMSCFD.

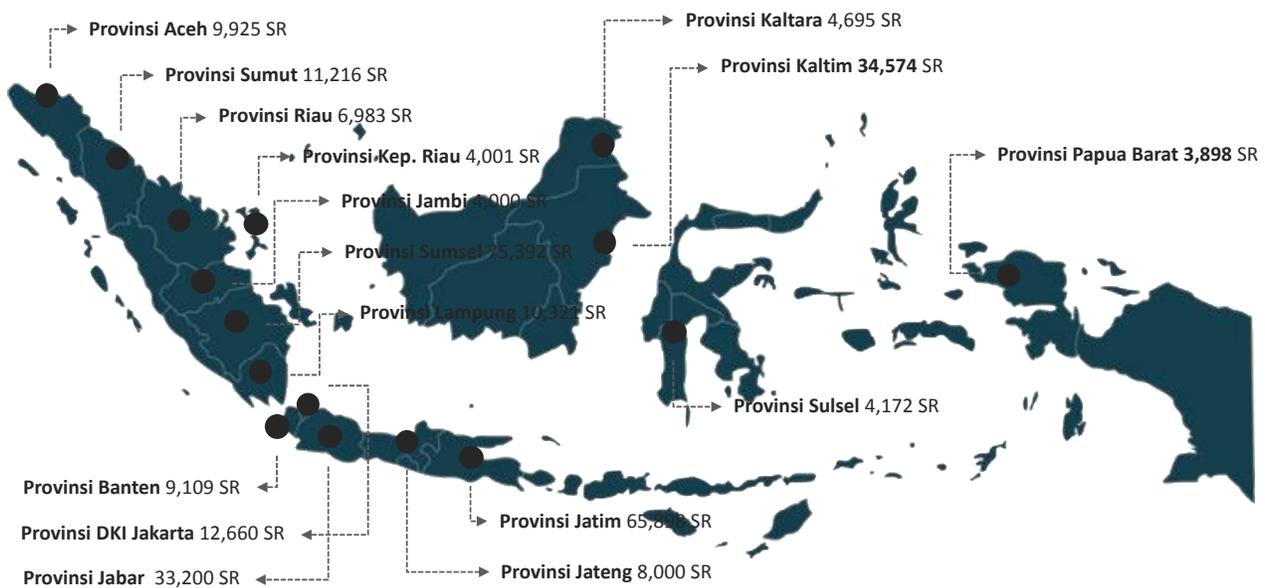


Diagram 37. Sebaran Pembangunan Jaringan Gas Bumi Untuk Rumah Tangga 2009 - 2018

Berdasarkan gambar di atas penyerapan Gas Kota adalah sebesar 55.1% dari GSA. Terlihat apabila menggunakan data 2009 – 2018 atau 2009 – 2017 dan dengan memperhatikan Tabel dimaksud (realisasi 3.64 BBTUD) maka dapat disimpulkan bahwa kendala dari penyerapan ini

¹ Ditjen Migas.2019.

dikarenakan pemakaian konsumen RT belum optimal. Hal ini terjadi dengan kemungkinan-kemungkinan bahwa :

- Terdapat konsumen yang sudah terpasang Jargas tapi tidak digunakan, atau
- Data yang digunakan harusnya pembangunan dari tahun 2009-2016 karena 2017 dan 2018 belum teraliri, atau
- Mengingat pemakaian Jargas RT bersifat fluktuatif karena sifatnya *As-Is* (dari konsumen), maka Badan Usaha yang mendapat penugasan belum optimal dalam melakukan pengembangan jaringan gas bumi RT nya.

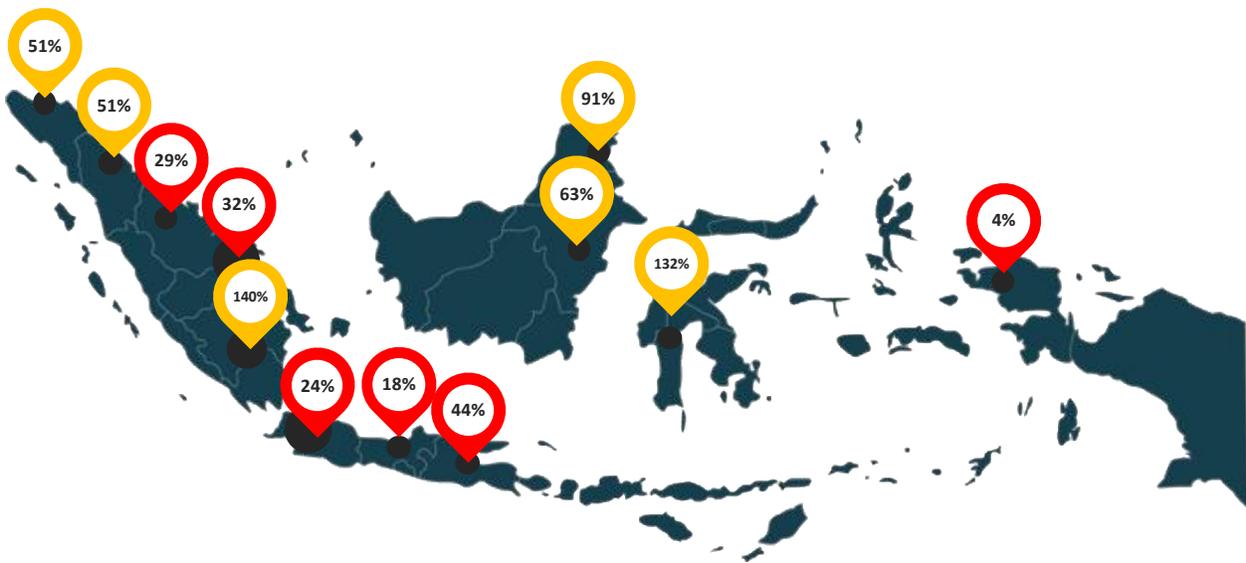


Diagram 38. Penyerapan Gas Bumi untuk Jargas RT per Oktober 2018

BBG Transportasi

Sangat sulit untuk membahas BBG Transportasi, dikarenakan Pemerintah masih optimis dalam hal diversifikasi BBM ke Gas untuk Transportasi, hal ini dapat dilihat dari Neraca Gas Bumi Indonesia 2018 – 2027 dimana baik menggunakan skenario I, II dan III disimulasikan bahwa terjadi pertumbuhan 5%. Sedangkan program pembangunan SPBG dihentikan pembiayaannya sejak 2016 ditambah *anchor buyer* untuk BBG Transportasi adalah Bus Umum TransJakarta menggunakan Solar Transportasi dikarenakan ada kebijakan-kebijakan internal di TransJakarta yang memperbolehkan mengisi di SPBU tertentu ditambah pengadaan bus-bus TransJakarta yang baru tidak ada BBG nya.

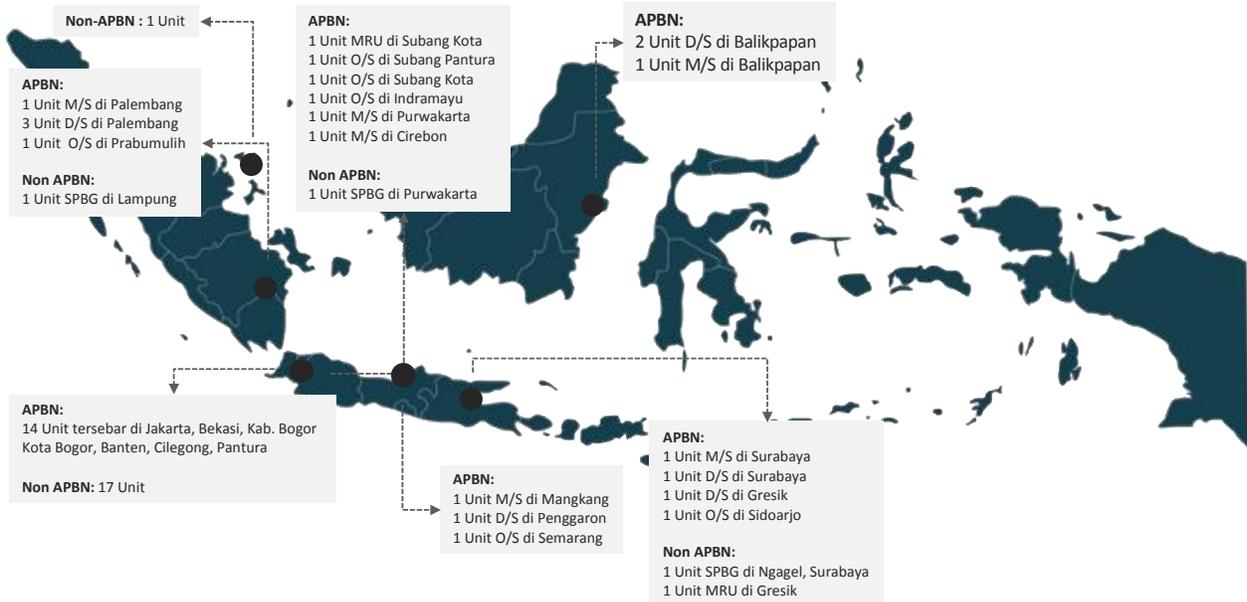


Diagram 39. Sebaran SPBG di Indonesia

Total SPBG di Indonesia sebesar 68 unit SPBG & MRU dengan 46 Unit dari APBN dan 22 Unit dari Badan Usaha. Per Oktober 2018, penyerapan gas bumi untuk BBG Transportasi sebesar 9.25 BBTUD atau penyerapan sebesar 47.68% dari kontrak. Masih dibawah 50% dimana penyerapan gas untuk BBG Transportasi di Jawa Timur 24%, untuk Jakarta sebesar 73% dan Palembang sebesar 81%. Untuk Jawa Tengah tidak beroperasi dan Balikpapan tidak beroperasi. Belum optimalnya serapan gas untuk transportasi, diperkirakan karena *demand* yang masih sedikit. Kebijakan *Adhoc* Pemerintah dengan mewajibkan seluruh kendaraan dinas menggunakan bahan bakar gas juga tidak efektif dikarenakan sekarang menggunakan mekanisme sewa mobil, kerja sama dengan angkutan umum seperti TAXI juga tidak efektif karena perubahan gaya hidup perkotaan yang menggunakan Ojek Online sebagai alat transportasi utama.



Diagram 40. Penyerapan Gas Bumi untuk SPBG per Oktober 2018

Pupuk dan Petrokimia

Keterkaitan antara pabrik pupuk dengan gas bumi sangat kuat. Gas bumi merupakan bahan baku utama dalam pembuatan pupuk urea yang saat ini belum dapat digantikan dengan bahan baku lainnya. Pada awalnya gas bumi juga dipakai sebagai bahan bakar pembangkit listrik untuk keperluan pabrik pupuk, namun dengan alasan ekonomi, secara bertahap peran gas bumi sebagai bahan bakar sudah mulai diganti dengan energi primer lainnya seperti batubara. Keberadaan gas bumi dalam jumlah yang cukup dan dalam jangka waktu yang panjang merupakan pertimbangan utama dalam perencanaan operasi pabrik pupuk yang sudah ada ataupun dalam rencana pembangunan pabrik pupuk yang baru.

Dibawah PT Pupuk Indonesia Holding Company, saat ini terdapat 14 Pabrik Pupuk-Agrokimia existing, 1 Pabrik Pupuk di Sulawesi Tengah dan 1 Agrokimia di Papua yang masuk perencanaan PT Pupuk Indonesia Holding Company. Sektor Pupuk dan Petrokimia terserap sebesar 89.16% dari GSA nya. Penyerapan ini dipengaruhi *supply* gas ke pabrik – pabrik, sebagai contoh PKG yang di-*supply* dari HCML ke PKG mencapai 118% sedangkan untuk *supply* eksisting lainnya dari WMO dan KEI dibawah 80% dikarenakan *natural declining*. Selain itu dapat dipengaruhi oleh kondisi pabrik (*Demand*) nya, seperti *supply* PHE NSO-NSB ke PIM mencapai 77.34% dikarenakan pabrik PIM yang belum bekerja optimal.

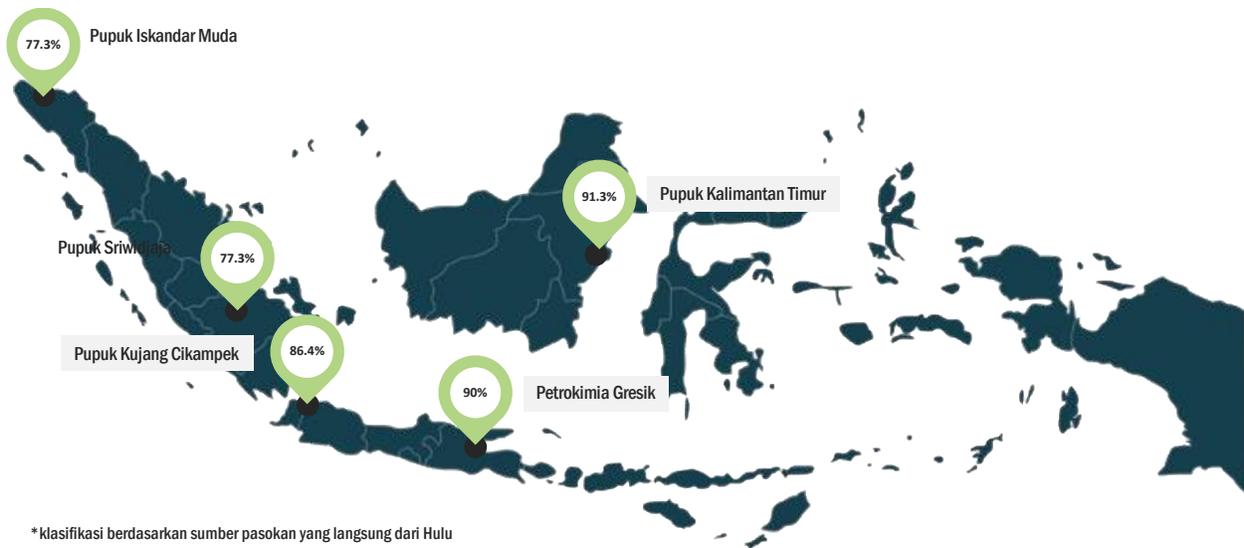


Diagram 41. Penyerapan Gas Bumi untuk Pupuk dan Petrokimia per Oktober 2018

Kelistrikan

Penyerapan gas bumi untuk sektor kelistrikan mencapai 73.92%. Penyerapan rendah untuk sektor kelistrikan berada di Papua Barat (MOW), Kalimantan Timur dari CBM (Vico) dikarenakan harga gas dan Jambi. Selain itu ada juga yang dikarenakan *natural decline* yang dialami di Jawa Barat melalui ONWJ.

Industri

Penyerapan gas bumi untuk sektor Industri mencapai 87.33%. Hal ini sudah cukup baik jika dibandingkan Oktober 2017 dimana harga gas masih menjadi penyebab utama penyerapan rendah. Penyerapan rendah berada di Kawasan Jawa Timur dan Jawa Barat. Jika dilihat dari kontrak, terdapat penyerapan rendah dari Jawa Barat – Pagar Dewa dan Jawa Timur (HCML) dikarenakan pengambilan gas hanya untuk memenuhi *demand* yang jenuh. Khusus untuk HCML diambil 40 MMSCFD dari kontrak 60 MMSCFD karena dipinjam untuk sektor petrokimia.

Ekspor Gas Pipa dan LNG

Untuk memenuhi komitmen kontrak ekspor Gas Pipa dan LNG, pasokan gas masih terpenuhi. Penyerapan ekspor gas pipa 86.18% dan LNG Ekspor sebesar 100%. Gas pipa karena ada penurunan penyerapan yang dilakukan oleh Petronas.

3.2.2 Fasilitas Pembangunan FSRU/Regasifikasi On-Shore/Terminal LNG

Fasilitas pembangunan FSRU/Regasifikasi *On-Shore/Terminal LNG* pada tahun 2018 belum dapat dilakukan. Hal ini dikarenakan pada tahun dimaksud, belum ada BU/BUT Migas yang mengajukan permohonan pembangunan BU sehingga belum dapat dilakukan fasilitas pembangunan FSRU oleh Pemerintah atau dalam hal ini Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

3.3 Meningkatkan Akses Infrastruktur Migas

3.3.1 Volume BBM Bersubsidi (APBN 2018)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
Terpantaunya subsidi BBM dan LPG	1. Jumlah Volume BBM subsidi (Target APBNP 2018):	Ribu KL	16,23	16,10*	99%
	a. Premium	Ribu KL	-	-	-
	b. Minyak Tanah	Ribu KL	0,61	0,54	88,5%
	c. Solar	Ribu KL	15,62	15,56	99,6%

*Realisasi *unverified*

Berikut tabel realisasi jenis BBM tertentu terhadap kuota dari tahun 2011-2018:

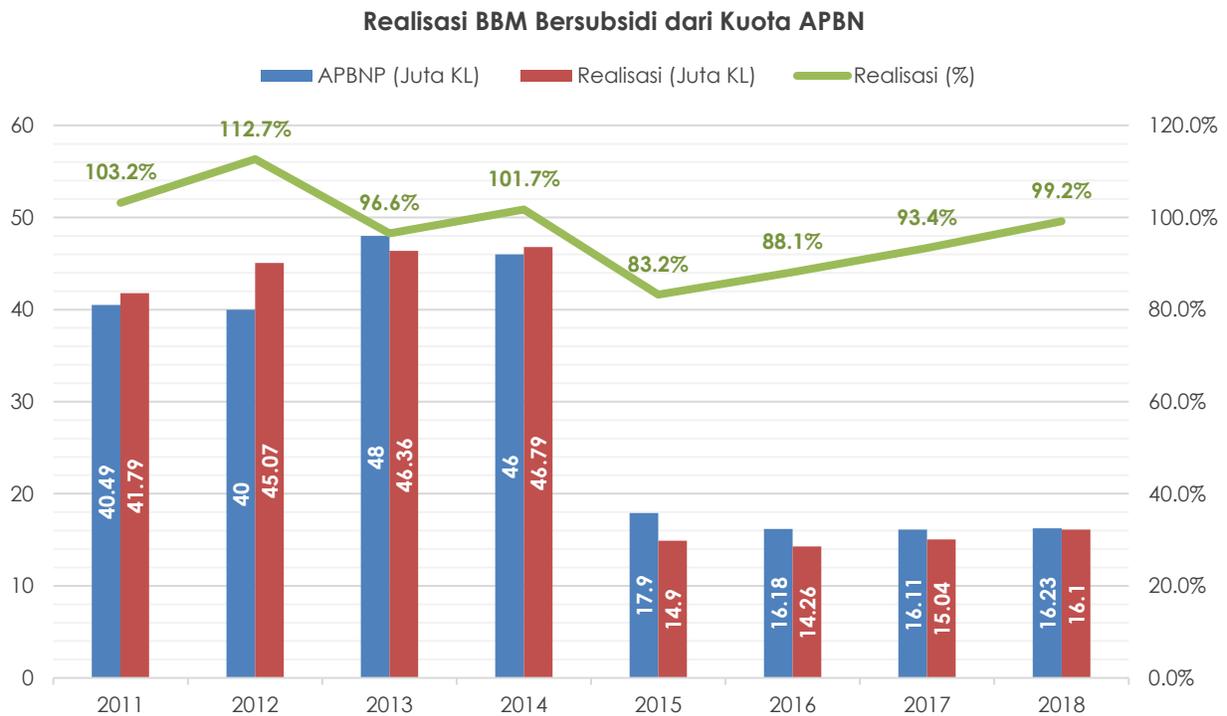


Diagram 42. Realisasi BBM Bersubsidi dari Kuota APBN

Dari tabel tersebut terlihat bahwa realisasi jenis BBM tertentu sejak tahun 2015 lebih rendah dibandingkan kuota yang ditetapkan APBN/APBNP. Namun demikian, dari tahun 2015, persentase

realisasi APBN berbanding kuota relatif meningkat, meskipun kuota yang telah ditetapkan lebih tinggi setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan volume penggunaan BBM bersubsidi per tahun. Sebagai akibatnya, dalam konteks penghematan subsidi dimana semakin besar volume subsidi yang digunakan dibanding target ditetapkan maka semakin rendah persentase capaian kinerja didapatkan, realisasi capaian kinerja BBM bersubsidi sejak tahun 2015 cukup mengalami penurunan seiring dengan pertumbuhan kebutuhan BBM bersubsidi. Hal ini dapat terlihat dari grafik berikut ini:

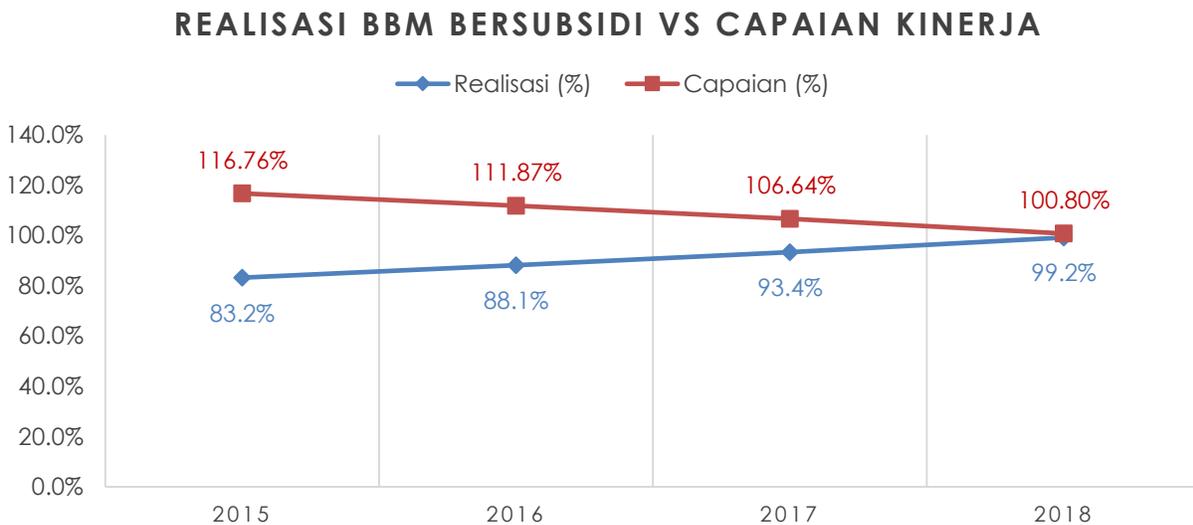


Diagram 43. Realisasi BBM Bersubsidi Vs Capaian Kinerja

Adapun beberapa upaya pengurangan subsidi BBM yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut:

- 1) Konversi Minyak Tanah ke LPG Tabung 3 Kg
- 2) Konversi BBM ke BBG
- 3) Pembangunan Jaringan Gas Kota
- 4) Pemberlakuan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, perubahan menjadi :
 - a. Subsidi bensin dihapus
 - b. Minyak Solar (Gas oil) diberikan subsidi tetap Rp 2000/liter dengan harga jual eceran berfluktuasi

- c. Harga minyak tanah (kerosine) sebesar Rp 2500/liter dengan besaran subsidi berfluktuasi seperti yang berlaku sebelumnya

3.3.2 Produksi BBM dari Kilang Dalam Negeri

Tahun	Target (Juta KL)	Realisasi (Juta KL)
2015	38	39.5
2016	39	42.4
2017	39	42.5
2018	39	44.6

Persentase produksi BBM dari kilang dalam negeri meningkat cukup signifikan selama empat tahun terakhir. Dari persentase sebesar 104% di tahun 2015 meningkat menjadi 114% di tahun 2018 dengan jumlah volume BBM yang diproduksi oleh kilang dalam negeri sebesar 44.6 Juta KL.

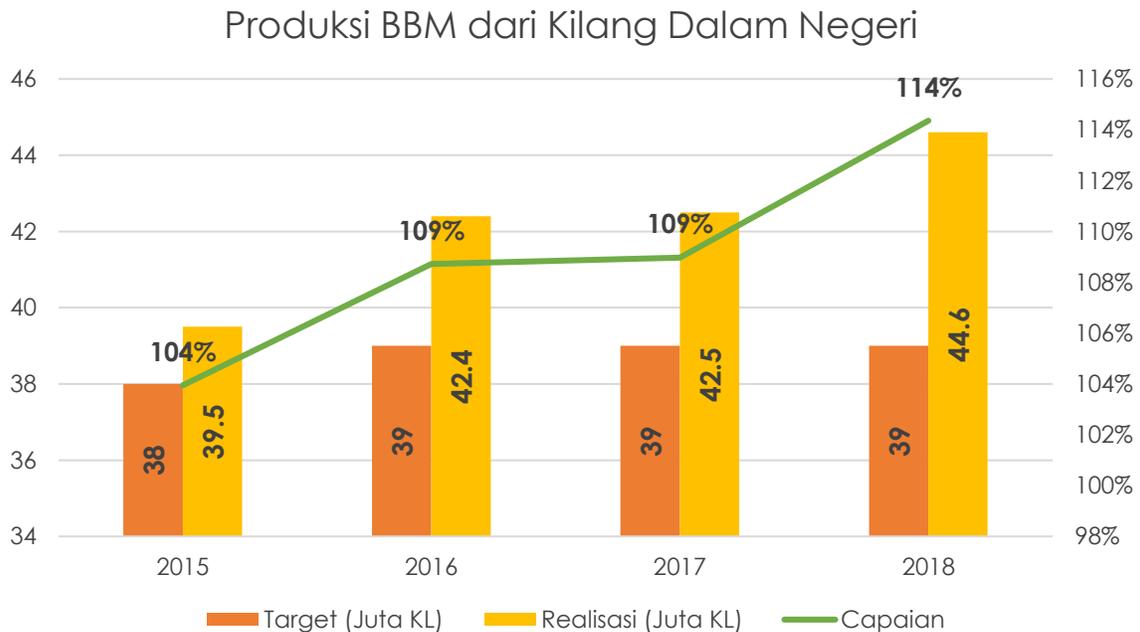


Diagram 44. Produksi BBM dari Kilang Dalam Negeri

Peningkatan realisasi produksi dari tahun 2015 ke tahun 2016 secara signifikan disebabkan dengan beroperasinya RFCC RU IV Cilacap PT Pertamina (Persero) pada tanggal 1 Oktober 2015. Dengan beroperasinya unit ini, maka terjadi kondisi:

- Tidak ada lagi impor HOMC (*High Octane Mogas Component*), dimana HOMC merupakan komponen *blending Gasoline/Premium*. HOMC mempunyai ON=92;
- Impor Premium ke TBBM (Terminal BBM) Lomanis 2 x 200 MB di stop/tidak diperlukan dan selanjutnya kebutuhan Premium tersebut dapat di-supply langsung dari RU IV Cilacap;
- Injeksi/import LPG via kapal sebanyak 7 x 2500 MT per bulan dapat dikurangi 6 (enam call kapal), saat ini hanya dibutuhkan satu kali injeksi kapal saja (1 x 2500 MT) per bulan; dan
- RU IV dapat memproduksi Pertamina (ON=92) dan Propylene (kedua produk ini merupakan produk baru dari kilang RU IV Cilacap).

Sehingga kondisi sebelum dan setelah beroperasinya unit RFCC dapat ditampilkan sebagai berikut:

	Pra RFCC (MBCD)	Pasca RFCC (MBCD)	Delta (MBCD)
Intake			
HOMC	12.23	0.00	-12.23
Produk			
Premium	55.14	85.21	30.07
Pertamax	0.00	5.66	5.66
LPG	3.09	13.59	10.50
Propylene	0.00	0.92	0.92
MFO	26.47	21.84	-4.62

Terlepas dari tingginya pencapaian target kinerja produksi BBM dari kilang dalam negeri selama empat tahun terakhir, perlu digarisbawahi bahwa produksi BBM dari kilang dalam negeri hanya mampu memenuhi kurang lebih 50% dari kebutuhan total domestik, sehingga dilakukan impor BBM untuk memenuhi konsumsi dalam negeri. Masih belum tercapainya angka produksi BBM dari kilang dalam negeri yang dapat memenuhi kebutuhan domestik disebabkan karena tidak adanya penambahan kapasitas kilang dan revitalisasi kilang *existing*. Dengan kondisi tersebut, Pemerintah mengambil langkah dengan menugaskan PT Pertamina (Persero) melakukan RDMP and NGRR *Project*. Pemerintah menerbitkan Perpres 146/2015 sebagai payung hukum dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Adapun kilang-kilang yang masuk dalam project dimaksud adalah sebagai berikut:

Project	Kapasitas (MBCD)	Onstream Produksi	Status
RDMP RU V Balikpapan	360 (sebelumnya 260)	Fase 1: 2021 Fase 2: 2025	<ul style="list-style-type: none"> sedang berlangsung proses EPC <i>bidding</i>. Target EPC award Desember 2018; <i>Early works</i> tahap 1 sedang berjalan, <i>Early</i> tahap 2 dalam proses procurement
GRR Jatim (JV Rosneft)	300	2024	<ul style="list-style-type: none"> Kajian opsi lahan alternatif sedang dilakukan Pengadaan <i>General Engineering Design</i>
RDMP RU IV Cilacap (JV Aramco)	400 (sebelumnya 348)	2024	<ul style="list-style-type: none"> Proses pengadaan lahan tambahan
GRR Bontang (JV OOG-Cosmo Oil)	300	2024/2025	<ul style="list-style-type: none"> Tahap finalisasi <i>Frame Work Agreement (FWA)</i>

Selain Perpres Nomor 146 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan dan Pengembangan Kilang Minyak Dalam Negeri, Pemerintah juga menerbitkan Peraturan Menteri terkait dengan penugasan untuk membangun dan mengupgrade kilang sebagai berikut:

- Kepmen ESDM Nomor 807 K/12/MEM/2016 tentang Penugasan kepada PT Pertamina (Persero) dalam Pembangunan dan Pengoperasian Kilang Minyak di Tuban, Provinsi Jawa Timur;
- Kepmen ESDM Nomor 7935 K/10/MEM/2016 tentang Penugasan kepada PT Pertamina (Persero) dalam Pembangunan dan Pengoperasian Kilang Minyak di kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur;
- Kepmen ESDM Nomor 1001 K/12/MEM/2016 tentang Penugasan kepada PT Pertamina (Persero) dalam Pengembangan dan Pengoperasian Kilang Minyak di kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur; dan
- Kepmen ESDM Nomor 1000 K/12/MEM/2016 tentang Penugasan kepada PT Pertamina (Persero) dalam Pengembangan dan Pengoperasian Kilang Minyak di Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah.

3.3.3 Kapasitas Kilang BBM Dalam Negeri

Tahun	Target (MBCD)	Realisasi (MBCD)
2015		1169
2016	1167	1169
2017	1169	1169
2018	1169	1169

Sampai dengan akhir tahun 2018 kapasitas kilang minyak di Indonesia masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar 1169.1 MBCD dengan rata-rata usia kilang sekitar 30 tahun. Kapasitas terpasang kilang minyak dapat dilihat pada tabel berikut:

Nama Badan Usaha	Lokasi	Kapasitas (MBCD)
PT. Pertamina (Persero)	RU II Dumai	177
	RU III Plaju	127.3
	RU IV Cilacap	348
	RU V Balikpapan	260
	RU VI Balongan	125
	RU VII Kasim	10
	Pusdiklat Migas Cepu	Cepu
PT Trans Pacific Petrochemical Indotama	Tuban	100
PT Tri Wahana Universal	Bojonegoro	18
Grand Total Kapasitas Kilang Minyak		1169.1

Kapasitas terpasang kilang minyak yang masih sama dari tahun 2015 disebabkan karena belum adanya pembangunan kilang minyak baru oleh swasta maupun oleh PT Pertamina (Persero). PT Pertamina memiliki proyek pengembangan kilang minyak (RDMP) untuk kilang Balikpapan dan Cilacap, dan pembangunan kilang minyak baru (GRR) untuk kilang Tuban dan kilang Bontang, namun demikian hingga akhir tahun 2018, proses pengembangan dan pembangunan kilang minyak baru masih dalam proses sehingga belum menambah kapasitas terpasang kilang minyak.

KILANG MINYAK DI INDONESIA

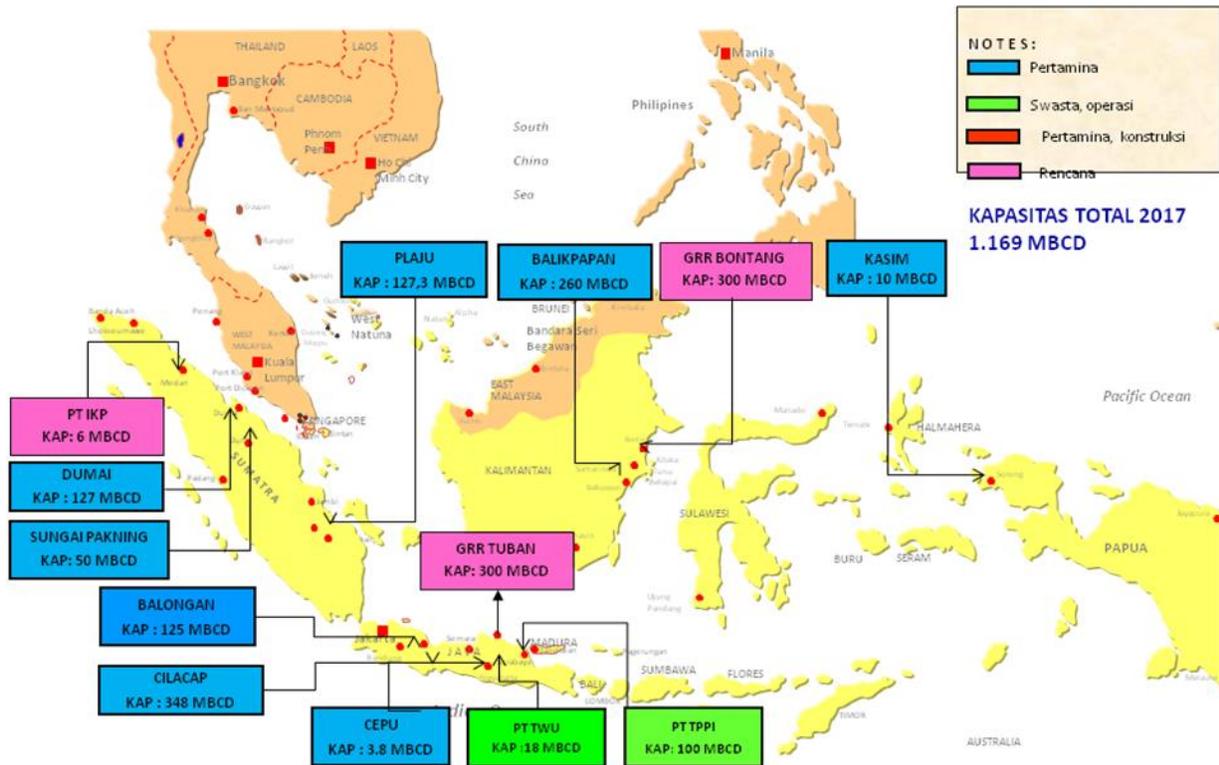


Diagram 45. Kilang Minyak di Indonesia

3.3.4 Kapasitas Terpasang Kilang LPG

Tahun	Target (Juta Ton Per Tahun)	Realisasi (Juta Ton Per Tahun)
2015	4.60	4.63
2016	4.62	4.63
2017	4.70	4.74
2018	4.66	4.74

Selama empat tahun terakhir, jumlah realisasi kapasitas terpasang kilang LPG di Indonesia cenderung tidak mengalami banyak perubahan. Definisi LPG sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, dan campuran keduanya. Kapasitas terpasang kilang LPG eksisting di

Indonesia selama empat tahun terakhir rerata di atas 4.6 juta KL, tidak jauh berbeda dari target yang ditetapkan. Ini membuat pencapaian indikator kinerja kapasitas terpasang kilang LPG rerata di atas 100% sejak tahun 2015.

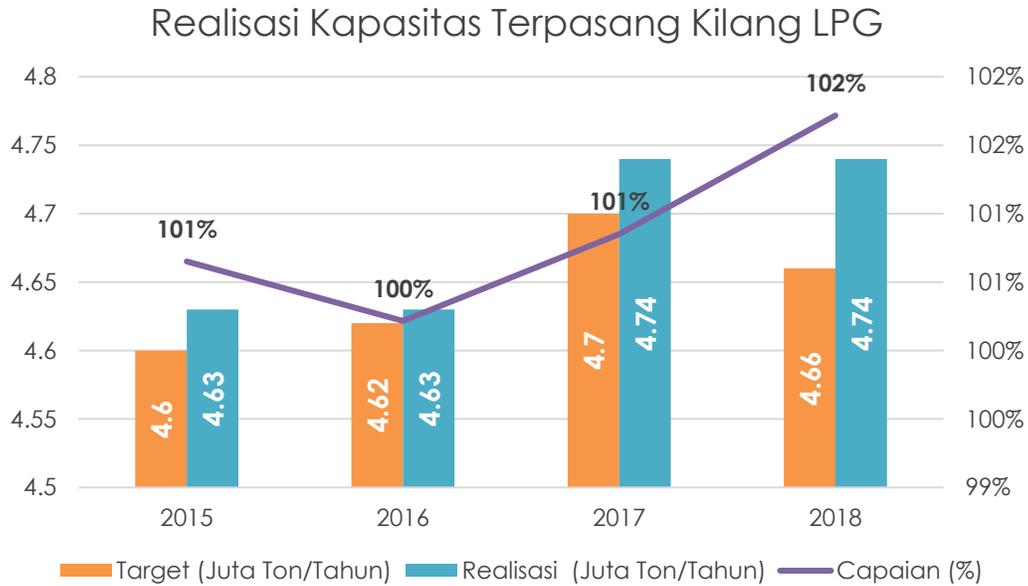


Diagram 46. Realisasi Kapasitas Terpasang Kilang LPG

LPG di Indonesia dapat dihasilkan dari kilang minyak maupun kilang gas. LPG dihasilkan dari kilang minyak RU II Dumai, RU III Plaju, RU IV Cilacap, RU V Balikpapan, dan RU VI Balongan PT Pertamina (Persero). Beberapa perusahaan yang termasuk dalam kilang LPG pola hulu adalah PT Badak NGL (Bontang, Kaltim), PT Chevron Indonesia (Tanjung Santan, Kaltim), PT Petrogas (Basin, Papua), PT Petrochina (Jabung, Jambi), PT Conoco Phillips (Belanak, Natuna), PT Saka Indonesia (Ujung Pangkah, Jatim). Beberapa perusahaan yang termasuk dalam kilang LPG pola hilir diantaranya adalah PT Perta Samtan Gas, PT Surya Esa Perkasa, PT Tuban LPG Indonesia, dan PT Media Karya Sentosa. Kapasitas terpasang kilang LPG dapat dilihat pada tabel berikut.

Nama Badan Usaha	Lokasi	Kapasitas (Ton/hari)	Kapasitas (MTPA)
Kilang Minyak			
PT. Pertamina (Persero)	RU II Dumai	185	68
	RU III Plaju	360	131
	RU IV Cilacap	871	318
	RU V Balikpapan	250	91
	RU VI Balongan	1500	548
Sub Total Kilang Minyak			1.156

Nama Badan Usaha	Lokasi	Kapasitas (Ton/hari)	Kapasitas (MTPA)
Kilang Gas Pola Hulu			
PT. Badak NGL	Bontang	2740	1.000
PT. Chevron *	T. Santan	247	90
PT. Petrogas	Basin	38	14
PT. Petrochina	Jabung	1644	600
PT. Conoco Phillips *	Belanak	1439	525
PT. Saka Indonesia	Ujung Pangkah	310	113
Sub Total Kilang LPG Pola Hulu			2.342
Kilang Gas Pola Hilir			
PT. Pertamina (Persero) *	P. Brandan	120	44
PT. Maruta Bumi Prima *	Langkat	46,57	17
PT. Medco LPG Kaji *	Kaji	200	73
PT. Pertamina (Persero)	Mundu	101	37
PT. Titis Sampurna	Prabumulih	200	73
PT. Sumber Daya Kelola	Tugu Barat	19	7
PT. Bina Bangun Wibawa Mukti	Tambun	151	55
PT. Surya Esa Perkasa	Lembak	225	82
PT. Yudhistira Haka Perkasa *	Cilamaya	120	44
PT. Wahana Insannugraha	Cemara	102	37
PT. Media Karya Sentosa Phase I *	Gresik	160	58
PT. Tuban LPG Indonesia	Tuban	480	175
PT. Yudistira Energi	Pondok Tengah	160	58
PT. Media Karya Sentosa Phase II	Gresik	230	84
PT. Gasuma Federal Indonesia	Tuban	71	26
PT. Pertasamtan Gas	Sungai Gerong	710	259
PT. Sumber Daya Kelola	Losarang	11	3,8
PT. Arsynergy Resources	Gresik	300	109,5
Sub Total Kilang LPG Pola Hilir			1.242,3
Grand Total Kapasitas Kilang LPG			4.740,3

Keterangan * tidak beroperasi

Berdasarkan data sebagaimana tabel di atas, diketahui bahwa sebesar 50% atau separuh dari kapasitas terpasang LPG Indonesia di tahun 2018 merupakan kilang gas pola hulu dengan volume terpasang kilang LPG sebesar 2342 MTPA. Sementara itu, kilang gas pola hilir memberi kontribusi volume kapasitas terpasang LPG sebesar 26% dari volume total kapasitas terpasang kilang LPG di Indonesia dan kilang minyak memberikan kontribusi sebesar 24%.

Kapasitas Terpasang LPG 2018 (MTPA)

■ Kilang Minyak ■ Kilang Gas Pola Hulu ■ Kilang Gas Pola Hilir

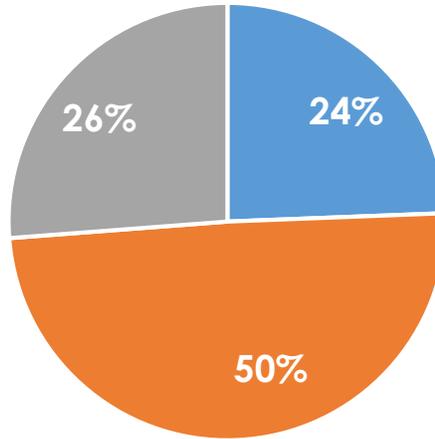


Diagram 47. Kapasitas Terpasang LPG 2018

Dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan 2018 kapasitas terpasang kilang LPG mengalami kenaikan dari 4.63 Juta Ton Per Tahun menjadi 4.74 Juta Ton Per Tahun, hal ini dikarenakan mulai beroperasinya kilang LPG PT Arsynergy Resources yang berlokasi di Gresik, Jawa Timur, pada tahun 2017 dengan kapasitas terpasang 0,11 juta ton per tahun. Namun demikian dari total kapasitas terpasang kilang LPG sebesar 4.74 Juta Ton Per Tahun, kapasitas kilang LPG yang beroperasi hanya sebesar 3.89 Juta Ton Per Tahun, hal ini disebabkan karena ada beberapa kilang LPG pola hulu dan kilang LPG pola hilir yang sudah tidak beroperasi.

3.3.5 Volume LPG Bersubsidi (APBN 2018)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
Terpantaunya subsidi BBM dan LPG	Jumlah Volume LPG subsidi (Target APBN 2017):	Juta Kg	6,450	6,55	102%

Berikut tabel realisasi LPG Tabung 3 Kg terhadap kuota APBN-P dari tahun 2011-2018 :

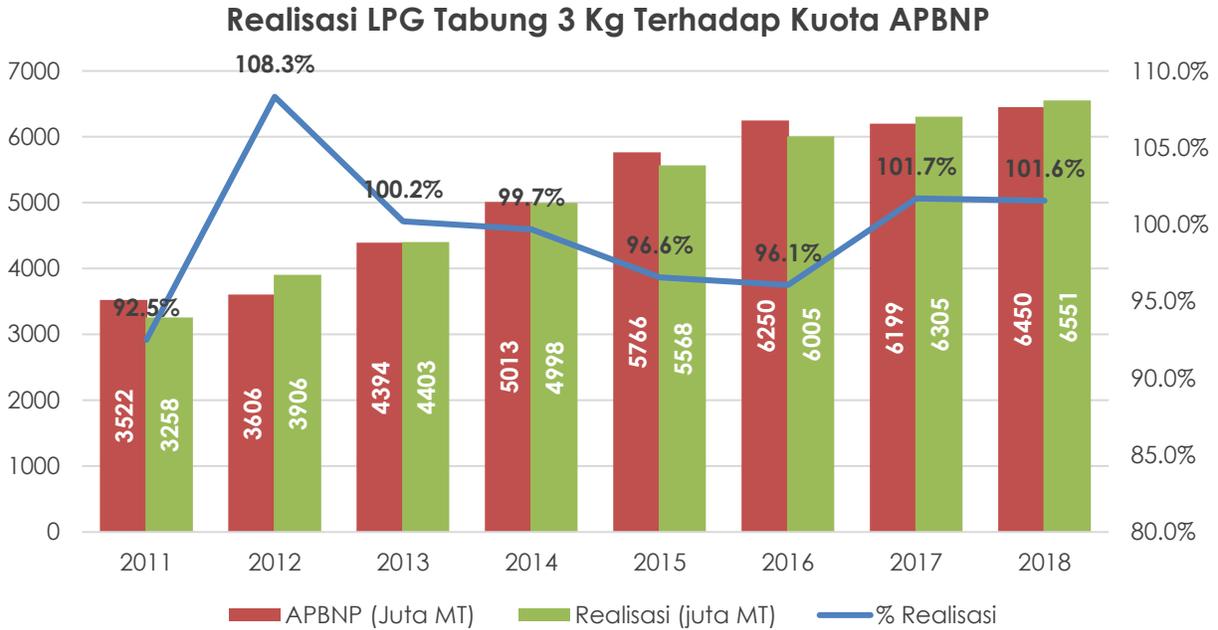


Diagram 48. Realisasi LPG Tabung 3 Kg Terhadap Kuota APBNP

Realisasi LPG Tabung 3 Kg cenderung melebihi kuota yang ditetapkan oleh APBNP sejak dua tahun terakhir meskipun selama tahun 2014-2016 volume LPG Tabung 3 Kg tidak melebihi kuota yang ditetapkan dalam APBNP. Meningkatnya subsidi BBM serta lebih besarnya realisasi subsidi dibandingkan dengan kuota merupakan tantangan tersendiri dalam perekonomian nasional. Dari segi kinerja, tingginya realisasi LPG 3 Kg diidentikkan dengan meningkatnya ketergantungan terhadap subsidi fosil. Untuk itu, dalam pengukuran pencapaian kinerja Pemerintah, semakin besar subsidi didistribusikan melampaui kuota yang ditetapkan, maka semakin kecil pencapaian yang diperoleh. Berdasarkan konsep ini, maka setelah dilakukan perhitungan, capaian kinerja LPG 3 Kg selama 2017-2018 kurang dari 100% mengingat tingginya volume penyaluran LPG 3 Kg yang melebihi kuota. Angka pencapaian 2018 adalah sebesar 98.43%, sedikit lebih tinggi apabila dibandingkan dengan 2017 namun masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan 2015-2016.

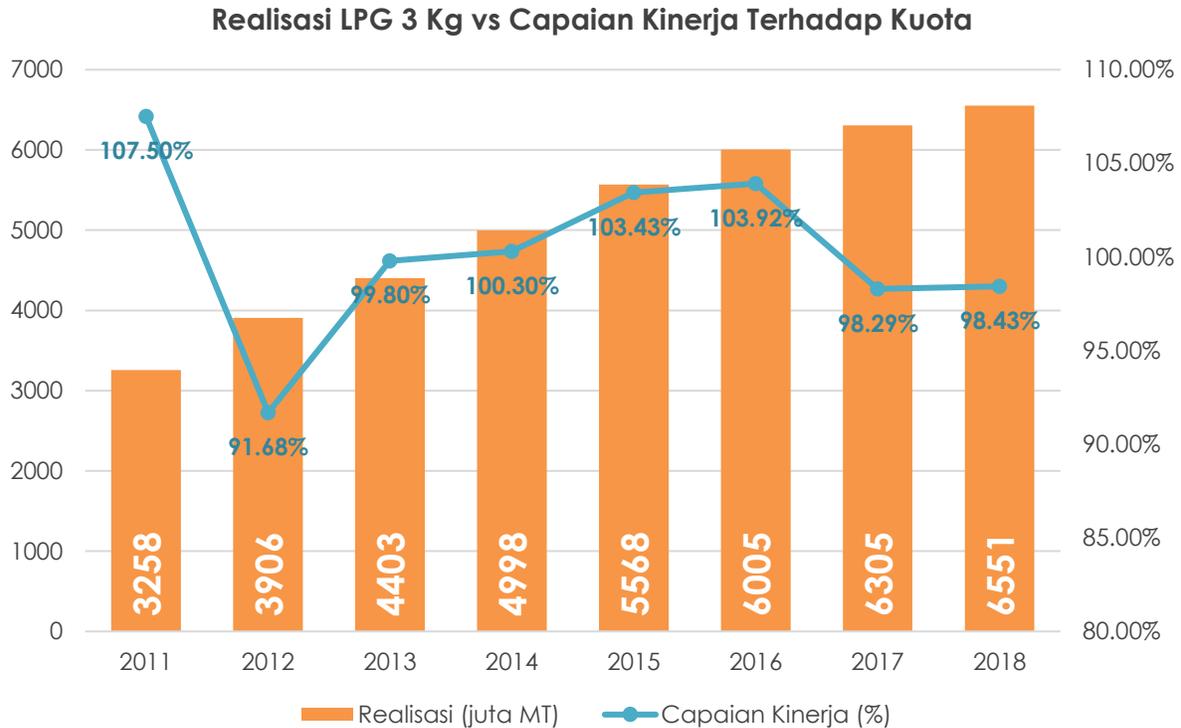


Diagram 49. Realisasi LPG 3 Kg vs capaian kinerja terhadap kuota

Beberapa alasan penambahan volume LPG 3 Kg antara lain adalah:

- Peningkatan pertumbuhan penduduk
- Peningkatan Pertumbuhan ekonomi
- Peningkatan kesadaran masyarakat dalam menggunakan LPG 3 kg
- Peningkatan jumlah usaha mikro
- Perubahan budaya masyarakat dalam rangka penggunaan energi bersih dan ramah lingkungan.
- Konversi Minyak Tanah ke LPG untuk Rumah Tangga dan Usaha Mikro
- Konversi BBM ke LPG untuk Nelayan Kecil

Dalam Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tabung 3 Kg, Badan Usaha Penugasan (Pertamina) telah melaksanakan sistem Monitoring LPG 3 Kg (SIMOL3K) untuk memonitor pendistribusian LPG hingga ke tingkat Sub Penyalur (Pangkalan). Dengan SIMOL3K tersebut pendistribusian LPG dapat terpantau secara *on-line* untuk meminimalisir penyalahgunaan LPG Tabung 3 Kg.

Strategi untuk mencapai target tahun 2018

Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tabung 3 Kg dilaksanakan dengan terlebih dahulu memberikan kuota dimasing-masing Kabupaten/kota diseluruh Provinsi wilayah konversi.

PT. Pertamina (Persero) sebagai Badan Usaha yang mendapatkan penugasan pendistribusian LPG tabung 3 Kg dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral membagikan kuota LPG Tabung 3 Kg ke masing-masing Agen (penyalur) tiap bulan selama 1 tahun.

Pendistribusian BBM Bersubsidi dilaksanakan oleh Badan Usaha yang mendapatkan penugasan dari BPH Migas dan untuk pengawasan Pendistribusian BBM Bersubsidi dilakukan oleh BPH Migas.

Adapun target penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

2019	Satuan	Target
Volume BBM Subsidi (APBN 2019)	Juta KL	15,11
Volume LPG Subsidi (APBN 2019)	Juta MT	6,978

3.3.6 Jumlah Wilayah Dibangun Jaringan Gas Kota dan Jumlah Rumah Tangga Tersambung Gas Kota

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatkan akses dan infrastruktur migas	Jumlah wilayah dibangun jaringan gas kota	Lokasi	16	18	112.50%
	Rumah tangga tersambung gas kota	SR	78.315	89.906	114.80%

Dalam rangka mendukung Program Diversifikasi Energi dan penghematan subsidi BBM, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya, antara lain dengan melakukan konversi minyak tanah ke LPG, diversifikasi BBM ke BBG untuk transportasi, dan pembangunan infrastruktur jaringan gas bumi untuk rumah tangga melalui pipa (Jargas). Pembangunan Jargas diawali sejak tahun 1974 yang dilakukan di Cirebon oleh PGN ketika ditemukannya ladang gas di lepas pantai Jawa sebagai sumber pasokannya. Dalam perkembangannya hingga sampai dengan akhir 2018, jargas telah tersambung ke 486.229 Sambungan Rumah (SR) dimana sebagian besarnya dibangun oleh pendanaan Pemerintah berkisar 67% (325.773 SR), PGN 32,04 % (155.771 SR) dan Pertamina 0,96% (4.685 SR) seperti terlihat pada Gambar 1 berikut.



Diagram 50. Capaian Jumlah Sambungan Rumah Jargas Nasional

Pembangunan Jargas oleh Kementerian ESDM c.q. Direktorat Jenderal Migas dimulai sejak tahun 2009 dengan capaian total sambungan rumah hingga akhir 2018 sebanyak 325.773 SR. Jargas yang dibiayai APBN ini mulai masif dibangun pada tahun 2016 melalui penugasan kepada BUMN Migas baik Pertamina maupun PGN dengan jumlah sambungan rumah sebanyak kurang lebih 75.000 SR per tahunnya. Hingga sampai dengan akhir tahun 2018 jargas telah mengalir di 16 provinsi atau 40 kabupaten/kota di Indonesia. Untuk perkembangan jargas yang didanai oleh APBN terlihat pada Gambar 2 berikut.

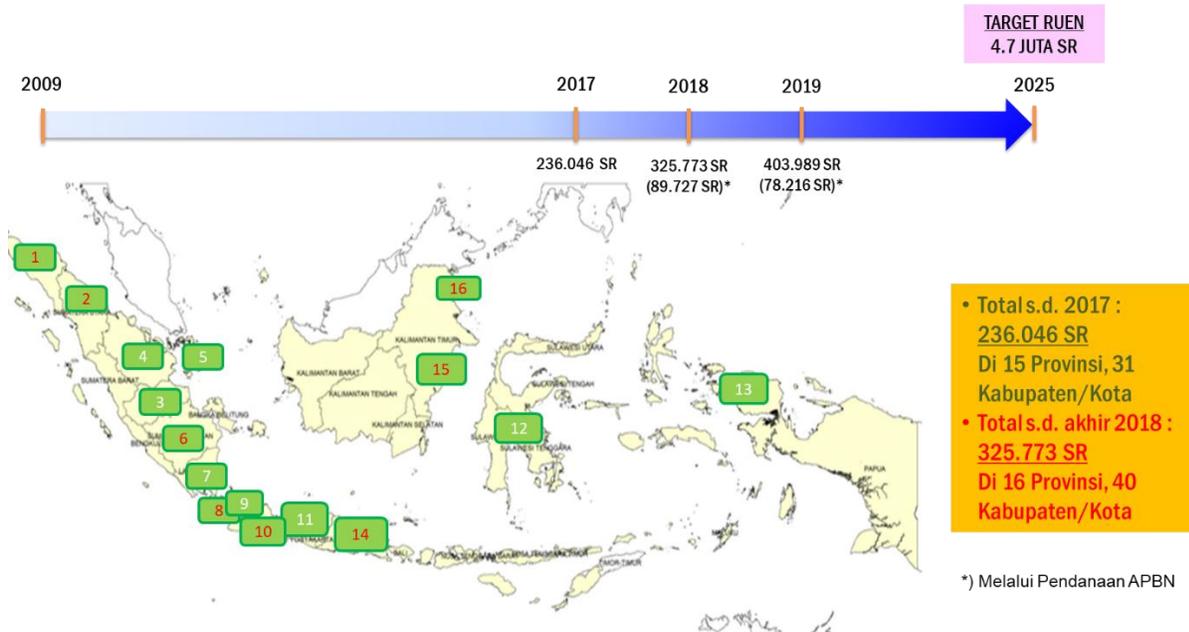


Diagram 51. Perkembangan dan Capaian Jargas melalui pendanaan APBN

Berdasarkan hasil penyusunan dokumen *Front End Engineering Design (FEED) – Detail Engineering Design for Construction (DEDC)*, pada TA 2018 Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi c.q. Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas telah melaksanakan pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga sebanyak 79.852 SR dari target kinerja sebanyak 78.315 SR dibantu oleh PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. sebagai Tim Pendukung pelaksanaan pembangunan dan pengoperasian jaringan gas bumi untuk rumah tangga.

Pelaksanaan pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga terbagi menjadi 7 paket yang terdistribusi di 16 lokasi, yaitu : Paket 1 meliputi Kota Medan (5.656 SR) dan Kabupaten Deli Serdang (5.560 SR); Paket 2 meliputi Kota Lhokseumawe (2.000 SR), Kabupaten Musi Rawas (5.182 SR), Kota Palembang (4.315 SR), dan Kota Prabumulih (6.018 SR); Paket 3 meliputi Kabupaten Serang (5.043 SR), Kabupaten Bogor (5.142 SR), dan Kota Cirebon (3.503 SR); Paket 4 di Kabupaten Sidoarjo (7.093 SR); Paket 5 meliputi Kota Pasuruan (6.314 SR) dan Kota Probolinggo (5.088 SR); Paket 6 meliputi Kota Balikpapan (5.000 SR), Kabupaten Penajam Paser Utara (4.260 SR), dan Kota Bontang (5.005 SR); serta Paket 7 meliputi Kota Tarakan (4.695 SR).

Selain itu juga dilaksanakan kelanjutan pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan pada TA 2017 di Kabupaten PALI (5.375 SR) dan Kota Samarinda (4.500 SR) melalui mekanisme pelelangan ulang pada TA 2018. Sehingga total jumlah sambungan rumah yang dibangun di tahun 2018 sebanyak 89.727 SR. Sebaran untuk lokasi dan jumlah sambungan rumah Jargas yang dibangun pada TA 2018 dapat dilihat pada gambar berikut.

Total Pembangunan Jargas APBN TA. 2018 : 89.727 SR (18 lokasi)
 • **Pembangunan Jargas TA. 2018 : 79.852 SR (16 lokasi)**
 • **Penyelesaian Pembangunan Jargas TA. 2017 (2 lokasi) : 9.875 SR (2 lokasi)**

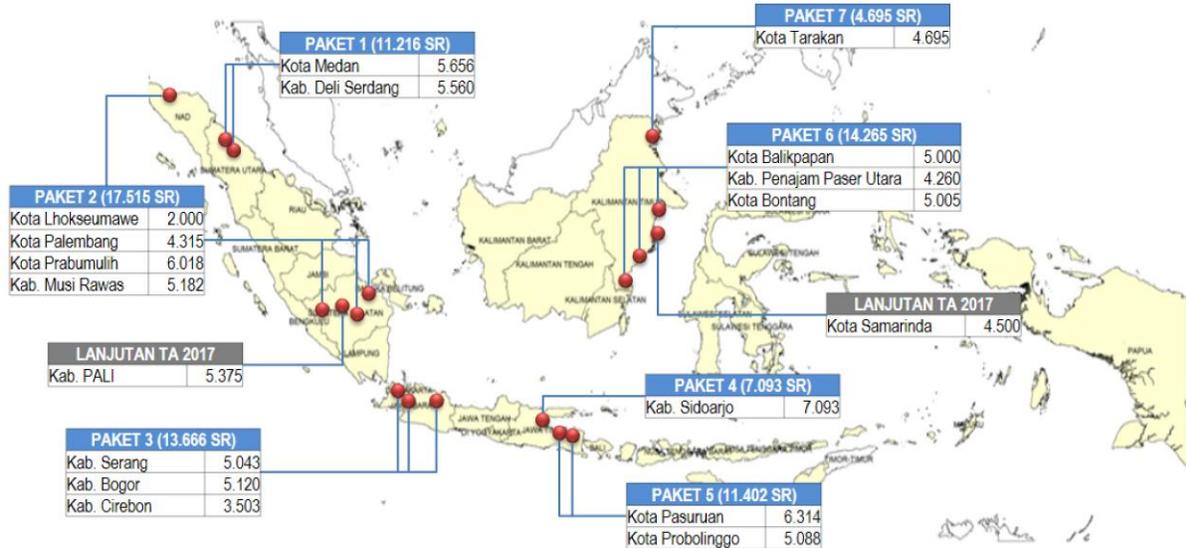


Diagram 52. Pembangunan Jargas TA 2018

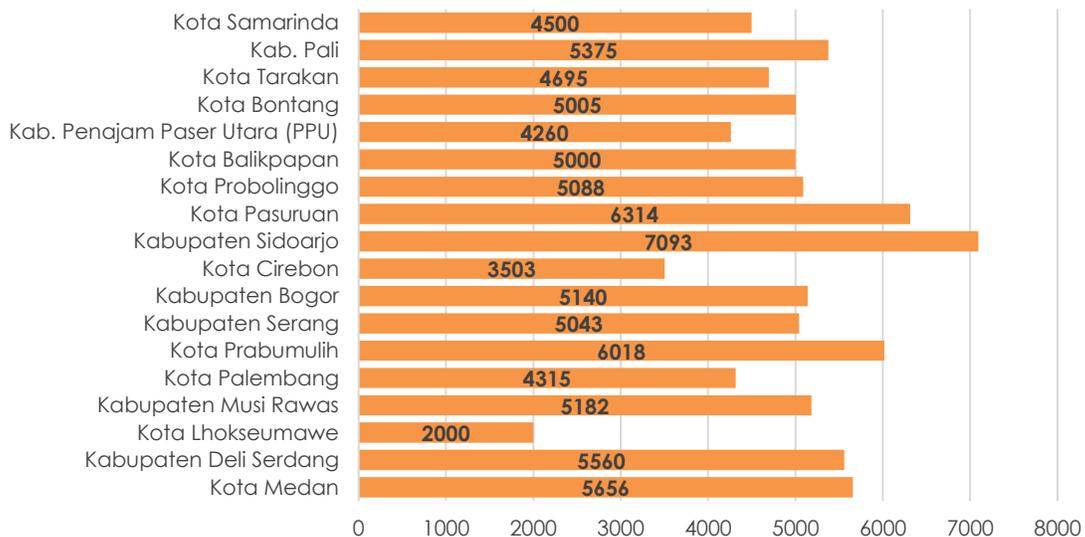
Adapun progress pelaksanaan sampai dengan akhir tahun anggaran 2018 sebagaimana tabel dibawah:

No	Paket	Program/ Kegiatan/ Lokasi	Output (SR)	Nilai Kontrak Rp. (Milyar)	Realisasi Fisik (%)
1.	Paket 1	Kota Medan	5.656	123.64	100
		Kabupaten Deli Serdang	5.560		
2.	Paket 2	Kota Lhokseumawe	2.000	190.31	81,85
		Kabupaten Musi Rawas	5.182		87,35
		Kota Palembang	4.315		86,65
		Kota Prabumulih	6.018		93,6
3.	Paket 3	Kabupaten Serang	5.043	113.84	97,8266
		Kabupaten Bogor	5.140		95,8266
		Kota Cirebon	3.503		100
4.	Paket 4	Kabupaten Sidoarjo	7.093	50.370	100
5.	Paket 5	Kota Pasuruan	6.314	96.323	100
		Kota Probolinggo	5.088		100
6.	Paket 6	Kota Balikpapan	5.000	126.742	100

No	Paket	Program/ Kegiatan/ Lokasi	Output (SR)	Nilai Kontrak Rp. (Milyar)	Realisasi Fisik (%)
		Kab. Penajam Paser Utara (PPU)	4.260		100
		Kota Bontang	5.005		100
7.	Paket 7	Kota Tarakan	4.695	52.347	90,714
8.	Lanjutan TA 2017	Kab. Pali	5.375	32.041	91,020
9.		Kota Samarinda	4.500	36.511	88,252

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat 3 paket pekerjaan pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga (Paket 2, Paket 3, dan Paket 7) serta 2 paket pekerjaan kelanjutan pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga (Kabupaten PALI dan Kota Samarinda) yang progress fisiknya belum selesai 100% sampai dengan tanggal 31 Desember 2018. Penyelesaian pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga Paket 2, 3, 7 serta kelanjutan pekerjaan di Kabupaten PALI dan Kota Samarinda akan dilaksanakan pada TA 2019 melalui mekanisme PMK No. 243/PMK.05/2015.

Output Pembangunan Jaringan Gas Untuk Rumah Tangga Tahun 2018 (SR)*



*Jumlah sambungan rumah yang dihitung termasuk yang belum mencapai 100% namun sudah dalam tahap penyelesaian

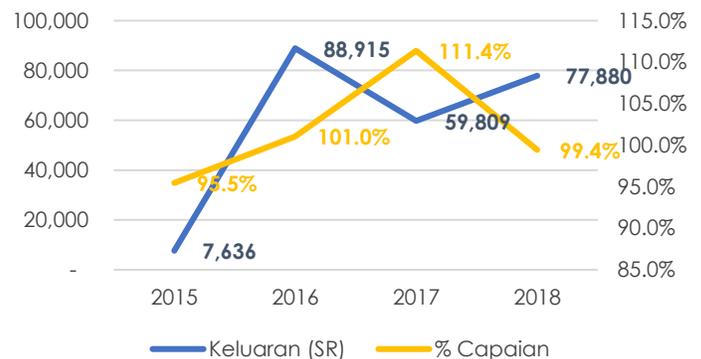
Diagram 53. Output Pembangunan Jaringan Gas Untuk Rumah Tangga Tahun 2018 (SR)*

Persentase keberhasilan pembangunan jaringan gas untuk rumah tangga dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi tahun berjalan cukup fluktuatif. Hal ini dapat terlihat dari grafik di atas yang memperlihatkan besar persentase capaian pembangunan sambungan jaringan gas untuk rumah tangga beserta persentase capaiannya. Meskipun dari segi persentase pencapaian tahun 2018 jauh lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, akan tetapi dalam hal jumlah sambungan rumah tangga yang terselesaikan di tahun 2018 jauh lebih besar dibandingkan dengan tahun 2017.

Target Pembangunan Jargas (SR) vs Alokasi Anggaran (Rp)



% Capaian vs Realisasi Pembangunan Jaringan Gas Untuk Rumah Tangga (SR)



*Jumlah sambungan rumah yang dihitung hanya yang telah mencapai 100%

Diagram 54. Target Pembangunan Jargas (SR) vs Alokasi Anggaran (Rp)

Diagram 55. % Capaian vs Realisasi Pembangunan Jaringan Gas Untuk Rumah Tangga (SR)

Beberapa hal yang menjadi kendala selama pelaksanaan Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga antara lain:

a) Kendala Perizinan

Pusat :

Persinggungan dengan utilitas instansi lain.

1. Jalan Nasional (*crossing* dan sejajar) → Kementerian PUPR – BBPJN
2. Jalan Tol (*crossing* dan sejajar) → Kementerian PUPR – BPJT
3. Sungai (*crossing* dan sejajar) → Kementerian PUPR - BBWS
4. Jalur KAI (*crossing* dan sejajar) → Kementerian Perhubungan - Ditjen KA dan PT KAI
5. Hutan → Kementerian LHK

Daerah :

1. UKL/UPL → Dinas Lingkungan Prov./Kota/Kab.
2. Penggunaan Jalan Provinsi/Kab./Kota (*crossing* dan sejajar) → Dinas PU

3. Penggunaan Taman → PTSP Prov./Kota/Kab.
 4. Penggunaan Fasilitas Umum & Sosial → Walikota/Bupati
- b) Kendala Sosial
Gangguan dari Kelompok Masyarakat tertentu dan Pungutan Liar
- c) Kendala Teknis
1. Pada pengadaan dengan proses pelelangan umum, memungkinkan masih terdapat resiko mendapatkan penyedia jasa yang kurang memenuhi kualifikasi sesuai kebutuhan.
 2. Proses kalibrasi Gas Meter yang terhambat dikarenakan peralatan kalibrasi yang masih terbatas di Indonesia.
 3. Kurang tersedianya tenaga kerja dengan kualifikasi tukang gali di lapangan.

3.3.7 Pembangunan Infrastruktur Sarana Gas Kota

Dalam rangka mendorong percepatan pemanfaatan BBG untuk transportasi jalan, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2012 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Bahan Bakar Gas untuk Transportasi Jalan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2012 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Bahan Bakar Gas untuk Transportasi Jalan.

Selain itu, guna mendukung kebijakan program konversi BBM ke BBG untuk Kendaraan tersebut diperlukan dukungan infrastruktur berupa pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG). Dan saat ini Kementerian ESDM c.q. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) dan NEDO Jepang melakukan kerja sama hibah dengan menandatangani *Memorandum of Understanding (MoU) tentang Demonstration Project for the Spread of Compressed Natural Gas Vehicles and Refueling Infrastructure Including Support of Development of Sustainable Environment*, pada tanggal 11 Desember 2017. Nilai hibah yang diberikan oleh NEDO Jepang adalah senilai JPY 1,300,000,000.

Tujuan kerja sama ini antara lain untuk pengembangan CNG dengan membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) sebagai bentuk percontohan (*demonstration project*). Lingkup kerja sama dimaksud sejalan dengan kebijakan Pemerintah untuk mendorong pemanfaatan BBG untuk kendaraan. Salah satu lingkup kerja sama Ditjen Migas dan NEDO tersebut adalah monitoring kendaraan dengan melakukan uji coba penggunaan CNGV dan pembangunan SPBG di 3 (tiga) lokasi yaitu Abdul Muis Jakarta (Ecostation Coco Abdul Muis (31.10202)), Sudirman

Tangerang (Ecostation Dodo Sudirman (34.15113)), dan KIIC Karawang. Dengan pembangunan SPBG tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan BBG untuk Kendaraan dan mendukung keberhasilan program Pemerintah.

Selanjutnya, dalam rangka pelaksanaan kegiatan *demonstration project* tersebut, Ditjen Migas menugaskan kepada PT Pertamina (Persero) untuk menindaklanjuti pelaksanaan MoU tersebut melalui surat Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 0076/10/DJM.I/2018 tanggal 4 Januari 2017 hal tindak lanjut pelaksanaan MoU *Demonstration Project for the Spread of Compressed Natural Gas Vehicles and Refueling Infrastructure Including Support of Development of Sustainable Environment*. Dan selanjutnya pada tanggal 22 Januari 2018, PT Pertamina (Persero) selaku *Migas Entrusted Party* bersama dengan *NEDO Entrusted Parties* menandatangani:

1. *Implementation Document for Sudirman-Tangerang and Abdul Muis-Jakarta for Development Sustainable Environment and Demonstration Project for the Spread of Compressed Natural Gas Vehicles including its refueling infrastructure in Sudirman-Tangerang and Abdul Muis Jakarta;*
2. *Implementation Document for Karawang for Development Sustainable Environment and Demonstration Project for the Spread of Compressed Natural Gas Vehicles including its refueling infrastructure in Karawang;*

SPBG yang dibangun ditujukan untuk melayani seluruh kendaraan baik pribadi maupun angkutan umum, dan kendaraan operasional Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah. Setelah periode 2 (dua) tahun *demonstrasi project* kendaraan menggunakan CNGV, kepemilikan dan pengoperasian aset SPBG rencananya akan dihibahkan ke Ditjen Migas untuk selanjutnya akan dialihkan kepada PT Pertamina (Persero) dalam bentuk Penyertaan Modal Pemerintah (PMP). Diharapkan dengan pembangunan SPBG ini dapat meningkatkan daya saing dalam penguasaan bisnis gas untuk sektor transportasi. Keseluruhan pembangunan SPBG ditargetkan selesai pada tahun 2020.

Pada tahun 2018 Pemerintah belum dapat membangun SPBG melalui mekanisme NEDO sebagaimana ditargetkan dalam Perjanjian Kinerja 2018. Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa Pemerintah atau dalam hal ini Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi tidak melakukan kinerja berkaitan dengan pembangunan infrastruktur sarana gas kota, atau dalam hal ini sarana SPBG. Pada tahun 2018 Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi tetap melakukan upaya-upaya merintis pembangunan tiga unit SPBG melalui proses NEDO yang rencananya akan dapat selesai di tahun 2019 dan 2020. Adapun *progress* pelaksanaan pembangunan SPBG dimaksud sampai dengan akhir TA 2018 dapat ditunjukkan sebagaimana tabel di bawah:

No.	Lokasi SPBG	Progres
1	SPBG Abdul Muis – Jakarta Pusat	Masih dalam tahap Penyusunan <i>Bid Document</i>
2	SPBG Sudirman – Tangerang	Masih dalam tahap Penyusunan <i>Bid Document</i>
3	SPBG Karawang	Tahap Persiapan Awal Konstruksi

3.4 Mengoptimalkan Penerimaan Negara dari Sub Sektor Migas

3.4.1 Penerimaan Negara dari Sub Sektor Migas (APBN 2018)

Jumlah penerimaan negara sub sektor migas diperoleh dari hasil penjumlahan penerimaan pajak penghasilan, penerimaan bukan pajak dan penerimaan lainnya dari minyak bumi. Penerimaan pajak penghasilan migas merupakan kewajiban pajak penghasilan yang disetorkan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) kepada pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, penerimaan bukan pajak migas merupakan bagian Negara yang diperoleh berdasarkan persentase bagi hasil migas antara pemerintah dan kontraktor, sedangkan penerimaan lainnya dari minyak bumi merupakan penerimaan bersih dari *Domestic Market Obligation (DMO)* dan *Bonus Production* KKKS.

Sasaran	No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Mengoptimalkan penerimaan negara dari sub sektor migas	13	Jumlah realisasi penerimaan negara dari sub sektor migas terhadap target APBN	Rp. Triliun	124,60	215,03	172,58%

Pada tahun 2018, realisasi penerimaan sub sektor migas mencapai 215,03 triliun rupiah. Ini menjadikan pencapaian indikator kinerja penerimaan negara sub sektor migas mencapai 172,87% dari target APBN yang ditetapkan sebesar 124,60 triliun rupiah. Di tahun 2018, jumlah realisasi penerimaan negara sub sektor migas paling banyak diperoleh dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) SDA dengan total realisasi sebanyak 150,33 Triliun rupiah.

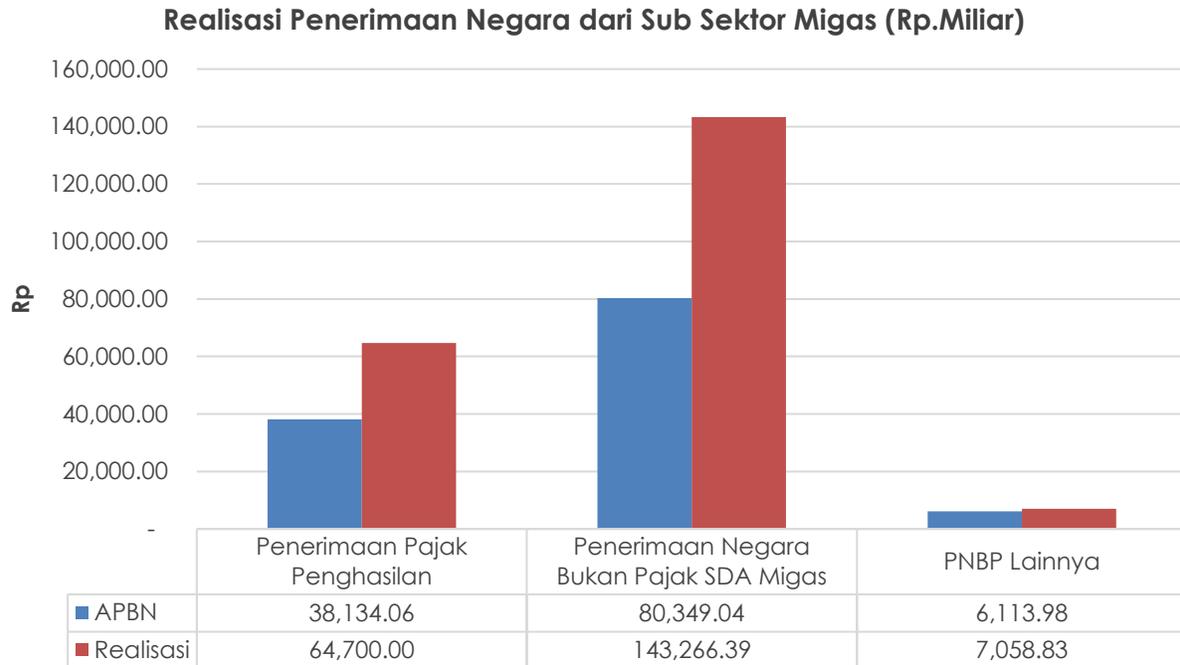


Diagram 56. Realisasi Penerimaan Negara dari Sub Sektor Migas (Rp.Miliar)

Besaran realisasi Penerimaan negara subsektor migas dipengaruhi oleh realisasi lifting migas, harga minyak mentah Indonesia (ICP), *Cost Recovery* dan nilai tukar rupiah (kurs) terhadap US\$. Hal ini dapat terlihat pada diagram di bawah dimana penerimaan negara sub sektor migas terindikasi sangat elastis terhadap harga minyak mentah Indonesia. ICP yang tinggi cenderung diikuti dengan tingginya penerimaan negara sub sektor migas dan demikian sebaliknya. Hal ini menjadikan pencapaian indikator kinerja penerimaan negara sub sektor migas sangat terpengaruh signifikan pada dinamika harga minyak mentah Indonesia dan dunia, mengingat harga ICP cenderung mengikuti dengan harga minyak mentah dunia, WTI dan Brent.

Penerimaan Negara VS ICP

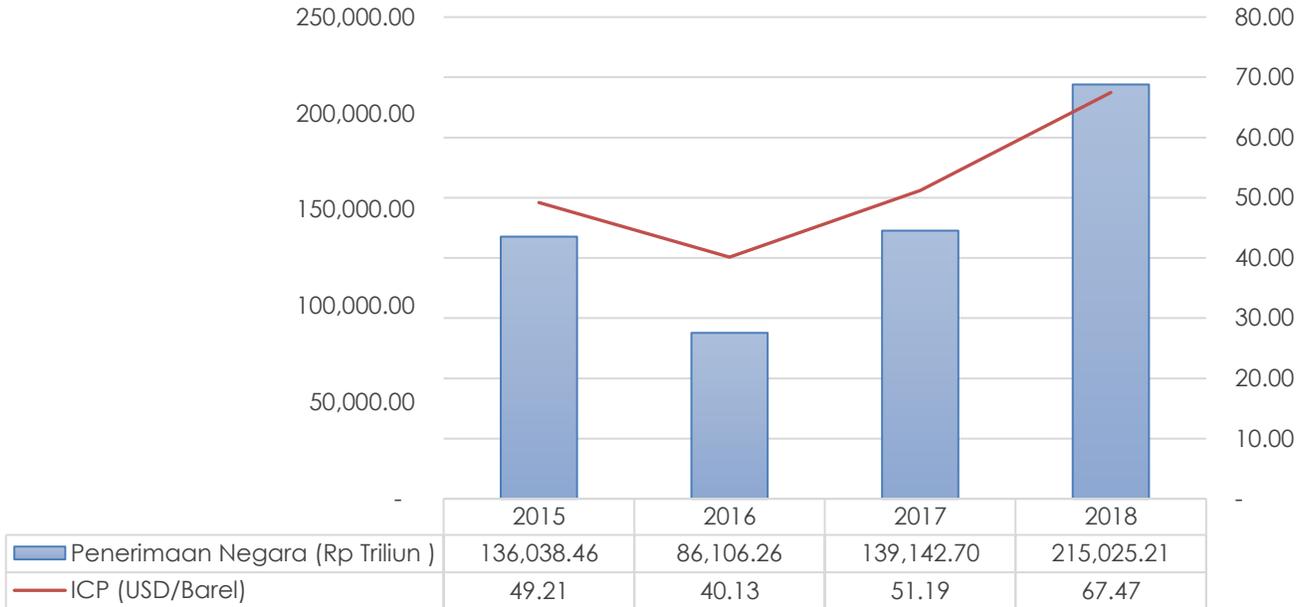


Diagram 57. Penerimaan negara vs ICP. Diagram ini menunjukkan bahwa kurva penerimaan negara sub sektor migas elastis kurva terhadap ICP

Perbandingan Rata-rata Harga Minyak Mentah Utama Dunia VS ICP Per Tahun (US\$/Barel) Periode 2014-2018



Diagram 58. Perbandingan rerata harga ICP, WTI dan Brent. Diagram ini menunjukkan bahwa rerata harga ICP per tahun hampir sama dengan rerata harga Brent dan WTI

Realisasi Penerimaan Negara Sub Sektor Migas Terhadap Target Renstra (Triliun Rp)

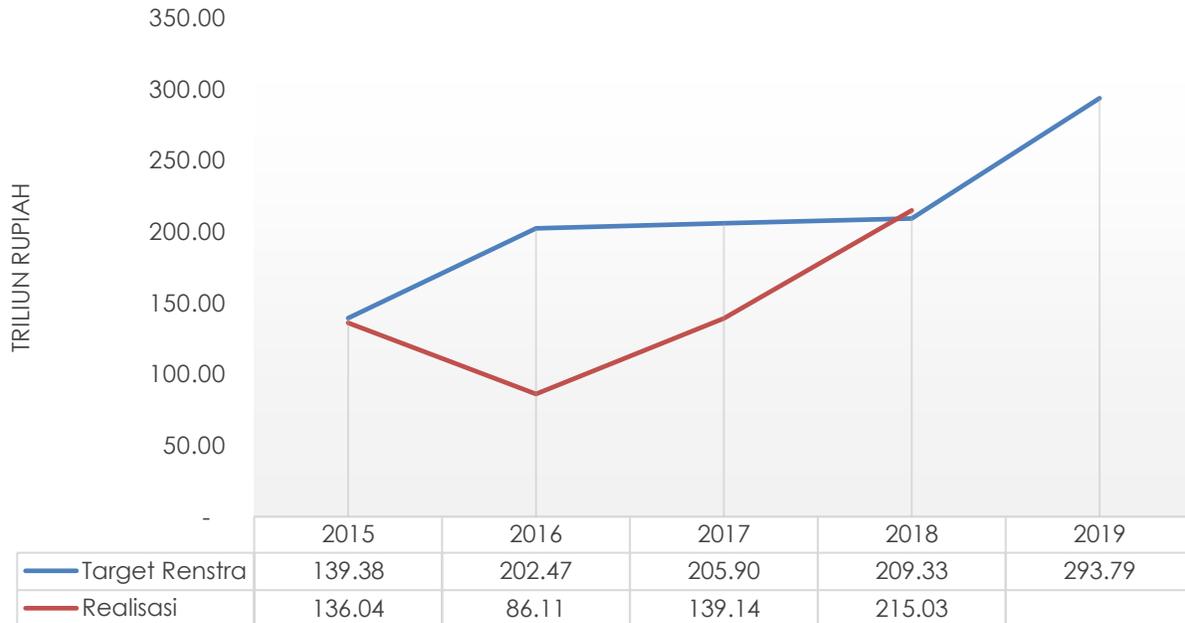


Diagram 59. Pencapaian indikator penerimaan negara tahun 2018 telah melebihi target yang telah ditetapkan dalam APBN 2018 dan Rencana Strategis Ditjen Migas 2015-2019

Ditjen Migas melalui Renstra 2015-2019 telah menyiapkan beberapa kebijakan strategis yang dapat meningkatkan produksi migas dalam negeri yang juga dapat menambah PNBPN yang berasal dari Kegiatan Usaha Hulu Migas. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain:

- a) Penyelesaian proyek migas strategis.
- b) Rencana Pemboran Eksplorasi Migas konvensional dan non konvensional.
- c) Penyiapan dan Penandatanganan Wilayah Kerja Migas.
- d) Penawaran Wilayah Kerja Migas Konvensional.
- e) Penyiapan Rekomendasi Penyiapan Wilayah Kerja Migas Konvensional dan Non Konvensional.
- f) Pelaksanaan Survei Geologi oleh Badan Geologi dalam rangka Penyiapan Wilayah Kerja Migas.
- g) Pelaksanaan Evaluasi Wilayah Potensi Migas oleh Badan Litbang ESDM.
- h) Peningkatan koordinasi kelembagaan antara Ditjen Migas, SKK Migas, Badan Geologi dan Lemigas dalam rangka Penyiapan Wilayah Kerja Migas dan Peningkatan Eksplorasi melalui Penambahan Wilayah Kerja dan Peningkatan Kualitas Wilayah Kerja.
- i) Penggunaan Teknologi *Enhanced Oil Recovery* (EOR).
- j) Penggunaan *Prototype Rig* CBM.

- k) Pembangunan Komersil *Prototype Rig* CBM.
- l) Penyiapan Kebijakan, Kerangka Regulasi dan Insentif.
- m) Koordinasi Pembinaan, Pengaturan dan Pengawasan Usaha Migas.
- n) Penyelesaian Rancangan Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi.
- o) Peningkatan Implementasi Peraturan terkait Produksi Migas, antara lain:
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177, 178, dan 179 Tahun 2007 dalam rangka peningkatan kepastian investasi jangka panjang.
 - Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2012 tentang Peningkatan Produksi Migas Nasional.
 - Permen ESDM Nomor 8 Tahun 2005 tentang Insentif Pengembangan Lapangan Minyak Bumi Marginal.
 - Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Minyak Bumi pada Sumur Tua.
- p) Peningkatan Keandalan Fasilitas Produksi.

3.5 Meningkatkan Investasi Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral

3.5.1 Jumlah Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Sub Sektor Minyak dan Gas Bumi Sesuai Program Legislasi Nasional

Sasaran	Indikator kinerja	Satuan	Realisasi
Menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan peraturan hukum, pertimbangan hukum, dan urusan hubungan masyarakat yang professional dan berbasis pelayanan hukum.	Jumlah Rancangan Peraturan Perundang-undangan Sektor Migas	Rancangan	23
	Jumlah pemberian Bantuan Hukum/Saksi Ahli dalam Kegiatan Usaha Migas	Bantuan	23
	Jumlah Laporan layanan Informasi yang diberikan	Laporan	

Sebanyak 23 rancangan peraturan perundang-undangan sub sektor migas sesuai dengan program legislasi nasional telah berhasil disusun oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Dengan target awal sebanyak 15 rancangan peraturan perundang-undangan yang disusun sesuai dengan program dimaksud, capaian Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi untuk

indikator kinerja dimaksud mencapai 153.33%. Hal ini merupakan prestasi tersendiri bagi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Terlebih lagi, selama tahun 2018, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi telah berhasil memberikan layanan sebanyak 23 bantuan hukum/saksi ahli dalam kegiatan usaha migas, dan berupaya memberikan layanan informasi kepada publik mengenai kegiatan usaha migas, baik melalui media sosial, maupun melalui sosialisasi langsung.

Jumlah layanan informasi yang diberikan

	Web	Total Visit Sampai dengan tanggal 4 Januari 2019 sebanyak 117386
Pelayanan Call Center 136 bidang migas		Dari 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 1302
Sosial media halo migas:	Instagram	<ul style="list-style-type: none"> • 1389 Followers
IG		
FB	Facebook :	<ul style="list-style-type: none"> • Friends Followers 5000 • Fanpage Followers 1323
Twitter	Twitter	<ul style="list-style-type: none"> • 1018 Follower
Kegiatan edukasi melalui Migas Goes To Campus		3 Kali : <ul style="list-style-type: none"> • MGTC Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) Jakarta • MGTC Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Yogyakarta • MGCT Universitas Lampung (UNILA) <p>TEMA : PENGENALAN GROSS SPLIT DAN CAPAIAN KESDM</p>
Sosialisasi aturan Migas ke Stakeholder		6 kali

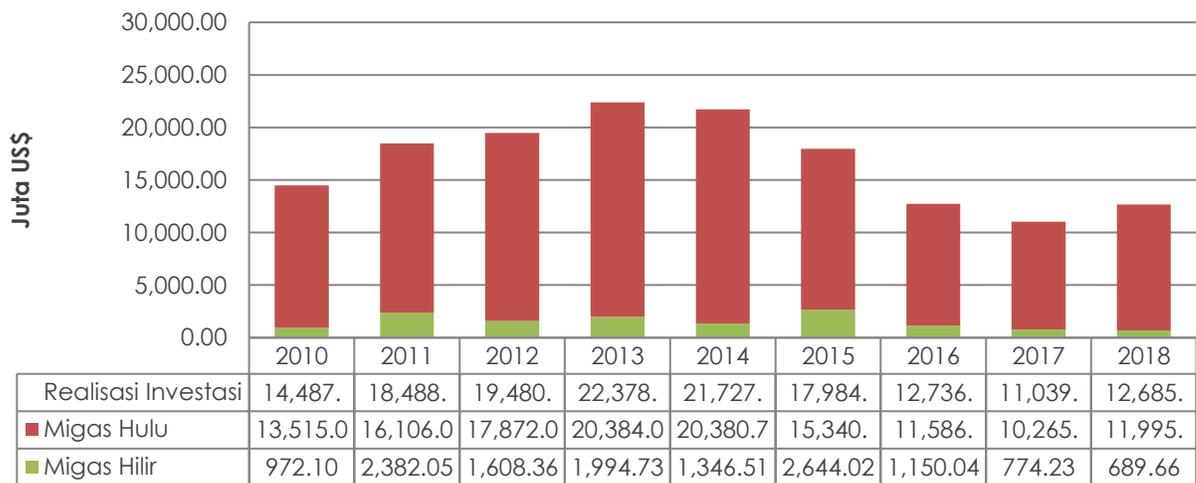
3.5.2 Investasi Sub Sektor Minyak dan Gas Bumi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi s.d Desember 2018	Persentase Capaian
Optimalnya Investasi Sektor ESDM dalam Penerimaan Negara	Jumlah Realisasi Investasi Subsektor Migas	US\$ Juta	15,420	12,685.18	82.26%

Realisasi investasi sub sektor minyak dan gas bumi di tahun 2018 sampai dengan Desember 2018 mencapai US\$ 12,685.18 Juta. Apabila dibandingkan dengan target investasi sub sektor minyak

dan gas bumi sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2018 yaitu sebesar US\$ 15,420 Juta, maka persentase capaian indikator kinerja investasi sub sektor minyak dan gas bumi adalah sebesar 82.26%. Dari segi distribusinya, total investasi minyak dan gas bumi didominasi oleh investasi hulu migas. Realisasi investasi minyak dan gas bumi di tahun 2018 sebesar US\$ 12,685.18 juta berasal dari sektor hulu sebesar US\$ 11,995.53 juta yang didapat dari *capital* dan *non-capital expenditure* KKKS Eksplorasi (PSC), KKKS Produksi (PSC), dan KKKS Produksi (GSC) dan US\$ 689.66 juta yang diperoleh dari badan usaha sektor hilir.

Realisasi Investasi Migas Tahun 2010 – 2018



Status:

*Hulu (Sumber: SKK Migas, Data TMT 11 Januari 2019)

*Hilir (Sumber: Laporan BU Hilir Migas, Data TMT 11 Januari 2019)

Diagram 60. Realisasi Investasi Migas Tahun 2010 – 2018

Struktur realisasi investasi hulu migas sendiri pada umumnya didominasi oleh investasi produksi hulu migas. Di tahun 2018, investasi produksi migas mencapai angka di atas delapan ribu juta USD. Ini menjadikan total investasi produksi hulu migas memberikan kontribusi sebesar 73% dari total jumlah investasi hulu migas di tahun 2018.

Realisasi Investasi Hulu Migas Tahun 2010 – 2018

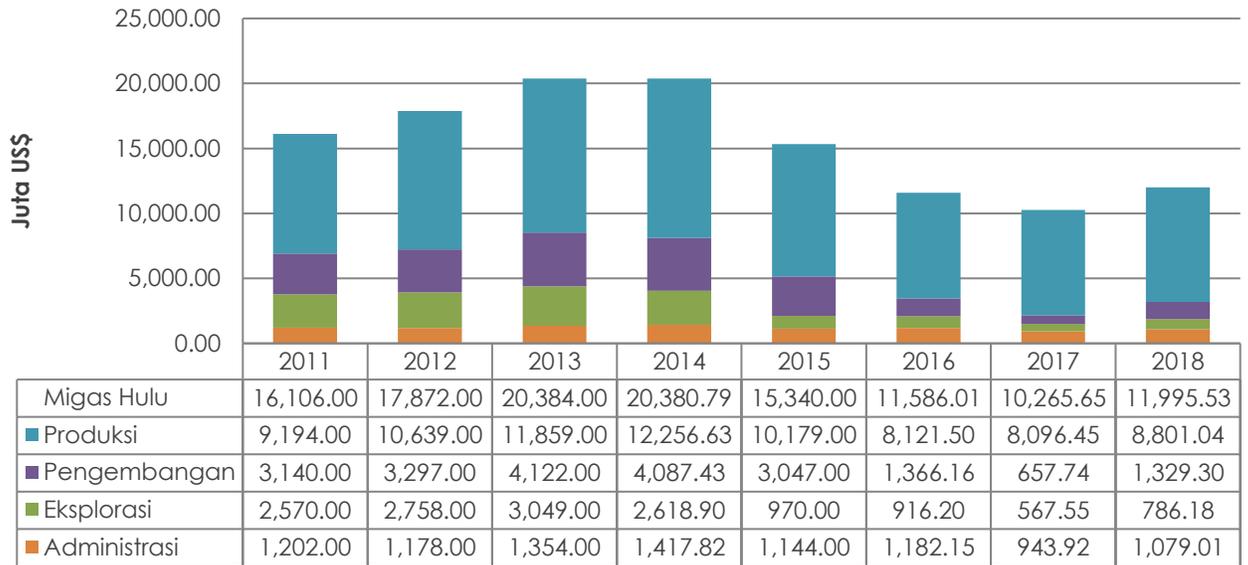


Diagram 61. Realisasi Investasi Hulu Migas Tahun 2010 – 2018



Diagram 62. WP&B vs Realisasi Investasi

Dalam 10 tahun terakhir, rata-rata pencapaian realisasi ialah 76% dari prognosa (WP&B awal tahun).

Kenaikan/penurunan nilai investasi migas disebabkan dari berbagai faktor antara lain kondisi investasi hulu dan hilir migas. Jika dilihat pada tahun 2010 – 2014, terjadi kenaikan

harga minyak dunia kemudian dilanjutkan sepanjang tahun 2015 terjadi penurunan signifikan harga minyak mentah sampai akhirnya menyentuh level terendah sebesar 27 US\$/barrel di Januari 2018. Perubahan harga minyak mempengaruhi keekonomian proyek yang telah direncanakan di awal tahun.

Realisasi Investasi Hilir Migas Tahun 2010 – 2018

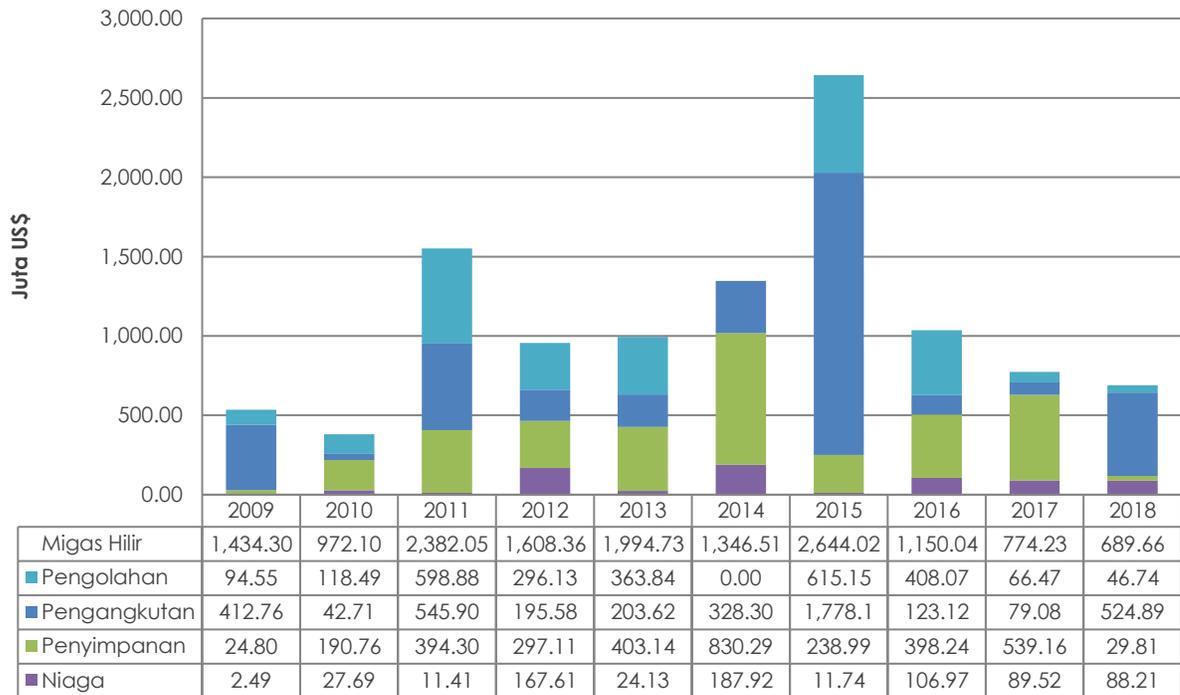


Diagram 63. Realisasi Investasi Hilir Migas Tahun 2010 – 2018

Realisasi investasi hilir merupakan *capital expenditure* BU Hilir migas. Realisasi investasi di kegiatan usaha penyimpanan pada tahun 2018 terhambat dikarenakan adanya kendala pendanaan pada proyek penyimpanan LNG di Cilegon. Selain itu adanya penundaan proyek pembangunan pipa transmisi gas *West Natuna Transportation System (WNTS) – Pemping* dikarenakan over supply pada pembangkit listrik di Batam juga menyebabkan target investasi hilir tidak tercapai.

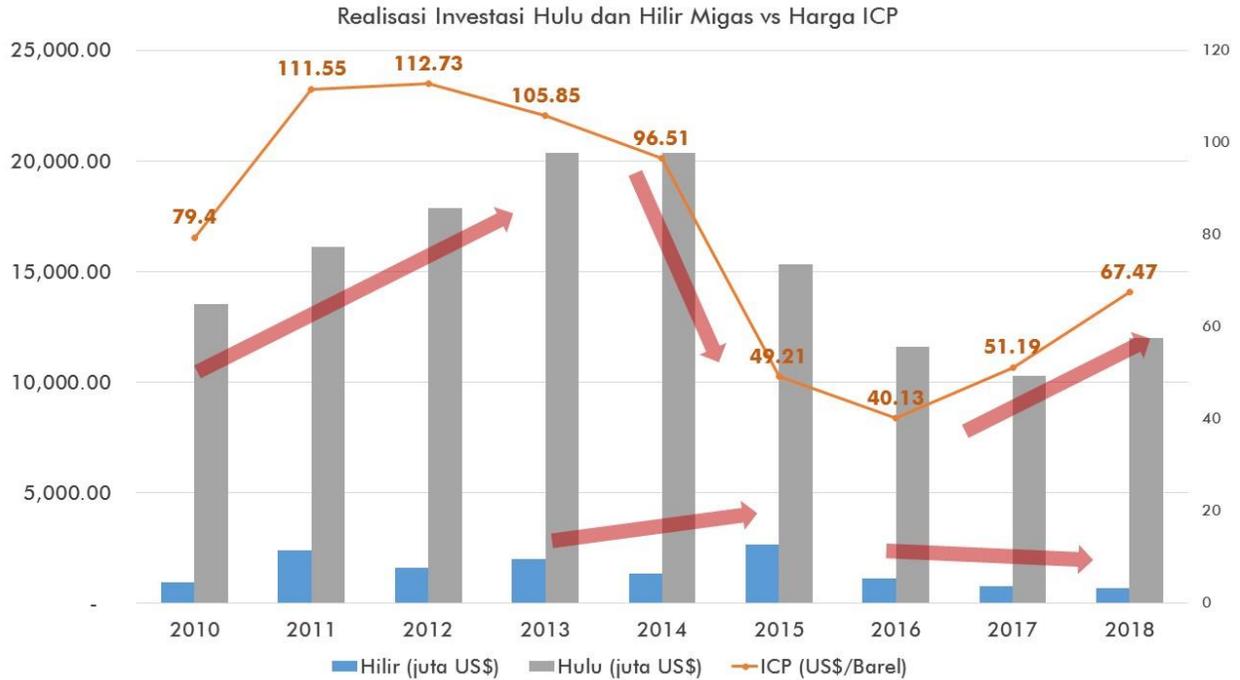


Diagram 64. Realisasi Investasi Hulu dan Hilir Migas vs ICP

Apabila dibandingkan dengan investasi hulu, realisasi investasi hilir lebih resisten terhadap dinamika perubahan harga minyak bumi. Dengan kata lain, naik turunnya harga minyak dalam satu tahun tidak semerta-merta mempengaruhi realisasi investasi hilir migas di tahun terkait maupun tahun selanjutnya. Hal ini berbeda dengan realisasi investasi hulu migas yang sangat responsif terhadap perubahan harga minyak bumi. Mengingat realisasi investasi migas didominasi oleh investasi hulu migas, maka total realisasi investasi migas menjadi sangat dipengaruhi oleh harga minyak bumi.

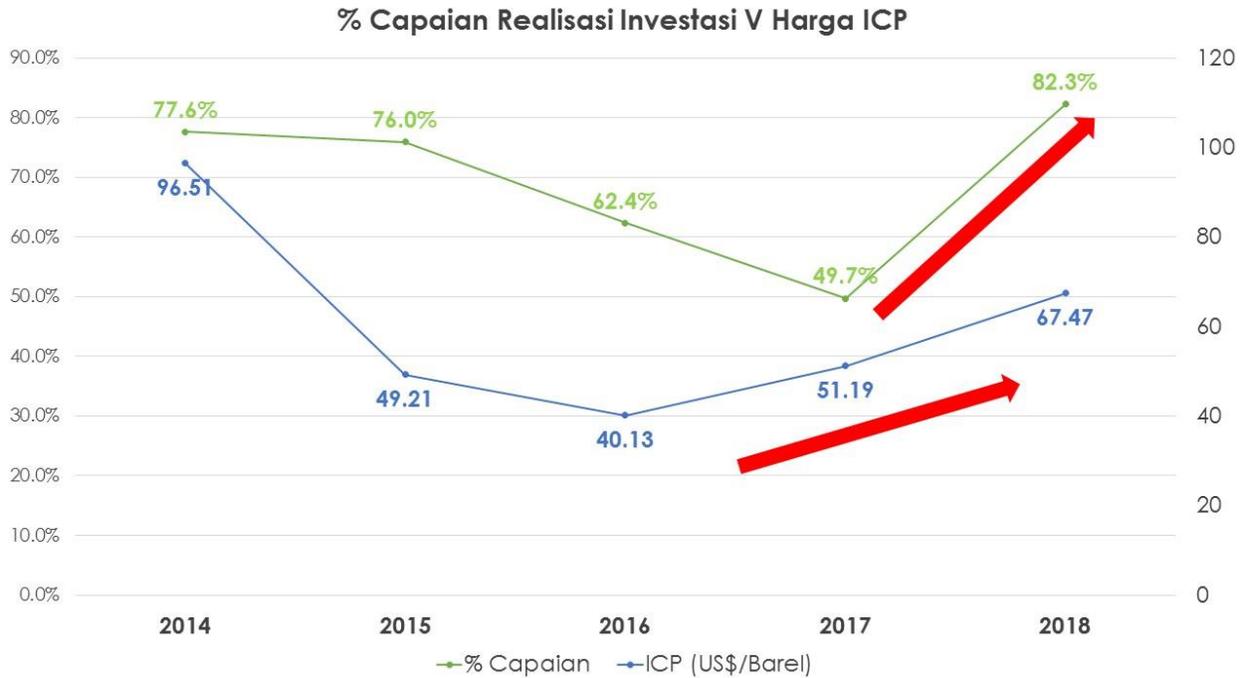


Diagram 65. % Capaian Realisasi Investasi Migas vs ICP

Realisasi investasi minyak dan gas bumi cukup sensitif terhadap harga minyak bumi. Berdasarkan data yang ada, peningkatan harga minyak bumi sering diikuti oleh peningkatan realisasi investasi minyak dan gas bumi. Sebagai akibatnya, pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi terkait dengan indikator investasi minyak dan gas bumi sangat dipengaruhi oleh harga minyak bumi.

3.6 Terwujudnya Lindung Lingkungan Keselamatan Operasi dan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi

3.6.1 Jumlah perusahaan yang melaksanakan keteknikan yang baik

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian
Terwujudnya lindungan lingkungan, keselamatan operasi dan usaha penunjang minyak dan gas bumi	Jumlah perusahaan yang melaksanakan keteknikan yang baik	50 Perusahaan	55 Perusahaan

Rantai bisnis minyak dan gas bumi yang dimulai dari kegiatan eksplorasi dan produksi, pengolahan, penyimpanan, pengangkutan dan penjualan minyak dan gas bumi mempunyai risiko kecelakaan dan kegagalan yang cukup tinggi. Terjadinya kecelakaan dan kegagalan dalam kegiatan minyak dan gas bumi menyebabkan timbulnya eksternalitas berupa pencemaran lingkungan, kerugian harta benda dan juga nyawa manusia. Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh rantai kegiatan minyak dan gas bumi berjalan dengan aman, dan ramah lingkungan.

Untuk mencapai tujuan kegiatan migas yang aman dan ramah lingkungan dilakukan melalui pengaturan dengan regulasi teknis agar perusahaan perusahaan maupun bentuk usaha tetap menerapkan kaidah keteknikan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang Undang No, 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Penerapan kaidah keteknikan yang baik adalah penerapan metoda rekayasa keteknikan yang telah terbukti, praktek-praktek, prosedur yang diterima secara luas, efisien dan memenuhi regulasi yang ada. Penerapan kaidah keteknikan yang baik dalam industri minyak dan gas bumi yang dijadikan tolok ukur adalah:

- 1) Dampak terhadap sumber daya dan lingkungan seperti program inovatif penurunan emisi melalui manajemen yang baik, substitusi bahan berbahaya, perawatan peralatan yang lebih baik
- 2) Pencegahan terbuangnya sumber daya, antara lain pemanfaatan gas suar bakar
- 3) Identifikasi risiko, mitigasi risiko dan kesiapsiagaan dalam penanggulangan dampak
- 4) Pemenuhan kewajiban pelaporan; kecelakaan, tumpahan minyak, pemakaian bahan kimia dan produksi limbah dan baku mutu emisi dan limbah.

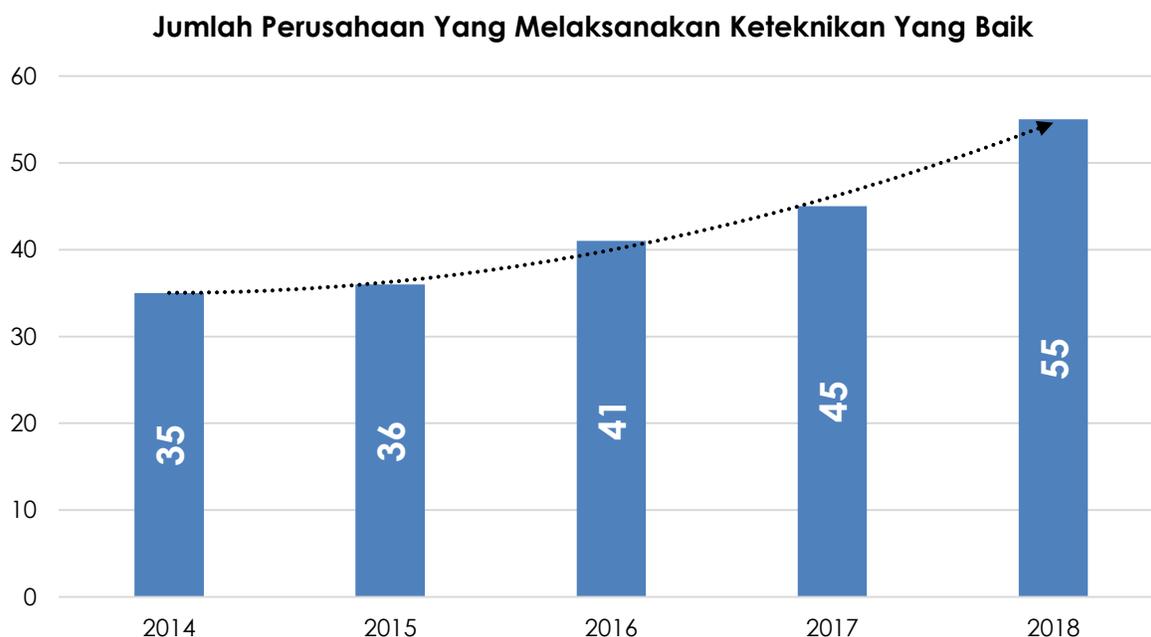


Diagram 66. Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Ketechnikan Yang Baik

Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan implementasi kadah ketechnikan yang baik dalam industri minyak dan gas bumi didasarkan pada peraturan yang berlaku, antara lain:

- a. Undang-Undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
- b. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1974 tentang Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Migas di Daerah Lepas Pantai.
- c. Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 1979 tentang Pengawasan Pelaksanaan Pemurnian dan Pengolahan Migas.
- d. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan.
- e. Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas.
- f. Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas.
- g. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- h. *Mijn Politie Reglement* No. 341 tahun 1930 tentang Peraturan Kepolisian Pertambangan.
- i. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 04/P/M/Pertamb/1973 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Perairan dalam Kegiatan Eksplorasi dan atau Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi.
- j. Peraturan Menteri No. 06.P/0746/M.PE/1991 tentang Pemeriksaan Keselamatan Kerja atas Instalasi, Peralatan dan Teknik yang Dipergunakan dalam Pertambangan Migas.

- k. Permen PE No. 02.P/075/M.PE/1992 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Eksplorasi dan Eksploitasi Migas.
- l. Permen LH No. 05 tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
- m. Permen ESDM No. 31 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pembakaran Gas Suar Bakar (*Flaring*) Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.
- n. Permen ESDM No. 38 Tahun 2017 tentang Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi

3.6.2 Jumlah Perusahaan Hulu Migas Yang Kegiatan Operasinya Tidak Terjadi Kecelakaan Fatal

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi 2018	% Capaian
<i>Terwujudnya lindung lingkungan, keselamatan operasi dan usaha penunjang migas</i>	Jumlah perusahaan hulu migas yang kegiatan operasinya tidak terjadi kecelakaan fatal	Perusahaan	100	100	100%
<i>Penerapan SMK M pada kegiatan usaha migas</i>	Jumlah Kontraktor atau Badan Usaha Hulu yang memiliki SMK M dengan rating nilai diatas 80	Perusahaan	10	13	100%

Kegiatan operasi hulu migas merupakan kegiatan yang tinggi resiko, biaya, dan teknologi. Kegiatan di sektor ini harus senantiasa diawasi dan dibina agar tidak menimbulkan kerugian yang besar, baik kerugian terhadap para pekerja, masyarakat umum, asset, ataupun lingkungan. Berbagai macam code dan standar serta peraturan telah diterbitkan berkaitan tentang kegiatan ini untuk mencapai kegiatan operasi hulu migas yang aman tanpa kecelakaan. Keselamatan adalah faktor utama yang harus mengilhami kegiatan operasi hulu migas.

Berdasarkan surat edaran Direktur Teknik Pertambangan Migas selaku Kepala Inspeksi Tambang Migas tanggal 25 Oktober 1996, terdapat empat klasifikasi kecelakaan tambang yaitu ringan, sedang, berat, dan fatal. Statistik kecelakaan operasi kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi tahun 2013 sampai dengan 2018 dapat dilihat pada diagram berikut ini:

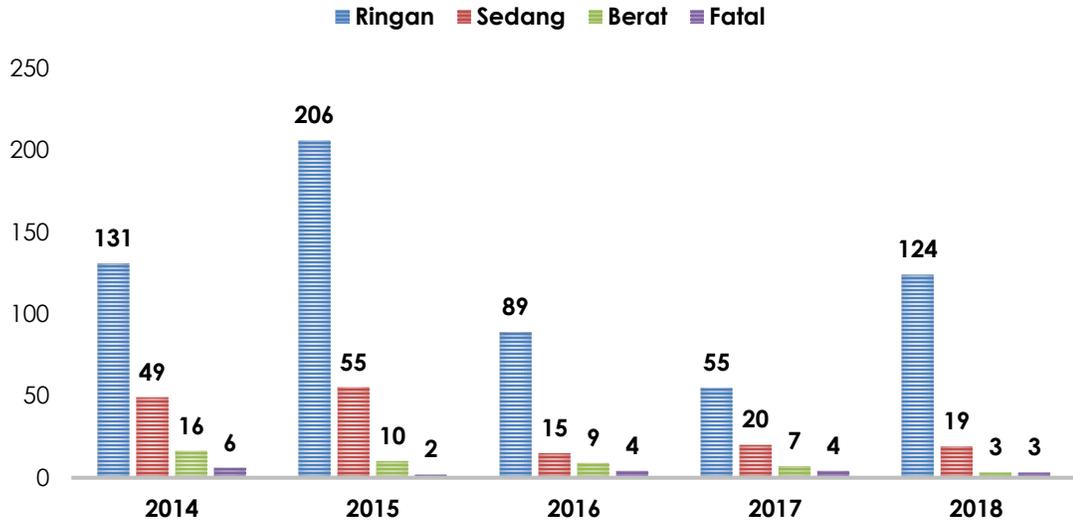


Diagram 67. Kecelakaan Operasi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi 2014 – 2018

Realisasi 5 Tahun ke belakang Jumlah perusahaan hulu migas yang kegiatan operasinya tidak terjadi kecelakaan fatal dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah perusahaan hulu migas yang kegiatan operasinya tidak terjadi kecelakaan fatal	70	80	90	100	-

Adapun target Rencana Strategis Direktorat Jenderal Migas selama 2015-2019 terkait Jumlah perusahaan hulu migas yang kegiatan operasinya tidak terjadi kecelakaan fatal dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah perusahaan hulu migas yang kegiatan operasinya tidak terjadi kecelakaan fatal	70	80	90	100	110
Jumlah Perusahaan yang memiliki nilai Audit SMK M dengan rating nilai di atas 80	3	7	8	10	2*

* Target Audit SMK M pada tahun 2019 menurun menjadi 2 Perusahaan karena disesuaikan dengan penurunan anggaran pada tahun 2019

Kecelakaan ringan adalah kecelakaan yang hanya mengakibatkan luka ringan tanpa menyebabkan kehilangan hari kerja sehingga kecelakaan ringan tidak dihitung sebagai kecelakaan tambang. Kecelakaan ringan pada tahun 2018 terjadi sebanyak 124 kali.

Kecelakaan sedang merupakan kecelakaan kerja pada kegiatan usaha hulu migas yang mengakibatkan pekerja kehilangan hari kerja kurang dari 21 hari kerja. Kecelakaan sedang pada tahun 2018 terjadi sebanyak 19 kecelakaan, terjadi penurunan yang tidak terlalu signifikan dari tahun sebelumnya.

Kecelakaan berat merupakan kecelakaan kerja pada kegiatan usaha hulu migas yang mengakibatkan cacat permanen atau kehilangan hari kerja lebih dari 21 hari. Jumlah kecelakaan kerja berat tambang pada 2018 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2017 yaitu dari 7 kecelakaan menjadi 3 kecelakaan berat tambang.

Kecelakaan fatal merupakan kecelakaan kerja pada kegiatan usaha hulu migas yang mengakibatkan nyawa pekerja ataupun masyarakat meninggal. Insiden kecelakaan fatal tambang pada tahun 2018 sebanyak 3 kecelakaan. Untuk itu harus dilakukan pengawasan terhadap penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Migas secara berkelanjutan untuk menekan angka kecelakaan kerja.

Disamping itu, terdapat 100 perusahaan hulu migas yang kegiatan operasinya tidak terjadi kecelakaan fatal. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada kegiatan usaha hulu migas perlu diterapkan lebih optimal.

Untuk terus dapat menurunkan angka kecelakaan perlu ditingkatkan beberapa faktor, sebagai berikut:

- a) Mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan di kegiatan hulu migas.
- b) Meningkatkan pemahaman BU/BUT terhadap tanggung jawab keselamatan kerja.
- c) Meningkatkan pemahaman pekerja terhadap aspek keselamatan kerja dan bahaya di lingkungan kerja.
- d) Menambah jumlah pegawai migas untuk dapat langsung melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kontraktor di kegiatan hulu migas.

Pada dasarnya kecelakaan merupakan kejadian yang tidak diharapkan dan direncanakan. Diharapkan kecelakaan sedapat mungkin tidak terjadi sehingga dilakukan upaya-upaya pencegahan dari segi pekerja dan umum, serta peralatan dan instalasi yang digunakan pada kegiatan usaha hulu migas.

Upaya-upaya dan strategi yang dilakukan untuk menghindari kecelakaan tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan keselamatan pada usaha hulu migas melalui inspeksi rutin dan insidental ke lapangan mengenai aspek keselamatan pekerja dan umum serta peralatan dan instalasi.
- b) Melakukan kegiatan pembinaan kepada para Kepala Teknik dan Wakil Kepala Teknik
- c) Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada BU.
- d) Melakukan kegiatan penghargaan keselamatan migas kategori jam kerja aman.

Jumlah Kontraktor atau Badan Usaha Hulu yang memiliki SMKM dengan rating nilai diatas 80

Audit SMKM yang telah dilakukan pada tahun 2018 adalah sebanyak 13 perusahaan. Triwulan II terdapat 8 perusahaan yang dilakukan Audit SMKM yaitu CNOOC SES Ltd. Exxon Mobil Cepu Ltd., Petrochina International Jabung, PT Pertamina EP Asset 2. PT PHE ONWJ, PT PHE WMO, PT PHM, Vico Indonesia.

Triwulan III terdapat 4 Perusahaan yang dilakukan audit SMKM adalah Kangean Energi Indonesia, BP Berau Ltd., PT Chevron Pacific Indonesia, Saka Indonesia Pangkah Ltd.

Pad triwulan IV terdapat 1 Perusahaan yang dilakukan audit SMKM adalah PT Medco E&P Malaka.

No	Kendala	Upaya yang dilakukan
1	Masih terdapat perbedaan persepsi dalam penafsiran pedoman analisis penilaian (<i>scoring</i>) audit SMKM	Melakukan pertemuan auditor dan penyamaan persepsi setiap poin pedoman penilaian Audit SMKM pada triwulan I
2	Keterbatasan anggaran DIPA	Melakukan revisi anggaran
3	Jumlah auditor yang terbatas dibandingkan banyaknya BU/BUT kegiatan usaha hulu migas	Melakukan audit dengan memprioritaskan BU/BUT hulu migas yang mempunyai fasilitas besar, bisa dijangkau dan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran

3.6.3 Jumlah Perusahaan Hilir Migas Yang Kegiatan Operasinya Tidak Terjadi Kecelakaan Fatal

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian
----	-------------------	--------	--------	---------

<i>Sasaran Strategis : Terwujudnya kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang efektif, efisien, andal dan aman serta ramah lingkungan</i>				
1	Jumlah perusahaan yang kegiatan operasinya tidak terjadi kecelakaan kerja (<i>zero accident</i>) dan kegagalan operasi (<i>unplanned shutdown</i>) Hilir	Perusahaan	200	200

Sepanjang tahun 2018, 200 badan usaha hilir migas yang dilakukan pengawasan oleh Ditjen Migas yang kegiatan operasinya tidak terjadi kecelakaan kerja, sehingga capaian adalah 100%.

Pada tahun 2018, telah dilaksanakan Audit Sistem Manajemen Keselamatan Migas pada 17 Badan usaha hilir migas oleh Ditjen Migas dan TIPKM sebagai berikut:

No	Lokasi
1	PT Perta Arun Gas
2	PT PGN GDM III Sumatera
3	PT Pertamina (Persero) MOR IV
4	PT Optima Sinergi Convestama
5	PT Pertamina (Persero) MOR V
6	PT Bina Bangun Wibawa Mukti
7	PT Nusantara Regas
8	PT Pertamina (Persero) RU VII
9	PT Pertamina (Persero) RU V Balikpapan
10	PT Pertamina (Persero) RU II Dumai
11	PT Pertamina (Persero) RU IV Cilacap
12	PT Pertamina (Persero) RU VI Balongan
13	PT Pertamina (Persero) Terminal Plumpang
14	PT Orbit Terminal Merak
15	PT Badak NGL
16	PT Pertamina (Persero) RU III Plaju
17	PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (Jawa Barat)

Beberapa capaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Subdirektorat Keselamatan Hilir Migas sepanjang tahun 2018 antara lain adalah sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	OUTPUT
1.	Sistem Keselamatan (K3) Migas (si-K3MI [®])	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Finalisasi si-K3MI[®] ▪ uji coba pada tanggal 9 dan 10 Juli 2018 di Bogor

NO	KEGIATAN	OUTPUT
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sosialisasi Sikemi (Sentul, Minggu ke-3 November)
3.	Pelatihan SDM	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Sharing season</i> perihal <i>commissioning</i> 23 Mei 2018 ▪ Bimtek Investigasi Kecelakaan tanggal 17 s.d 19 Oktober 2018
4.	Pelaksanaan <i>Safety Campaign</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Safety Campaign</i> dengan Katek/Wakatek Permurnian dan Pengolahan PT Pertamina (Persero) 22 Maret 2018 ▪ <i>Safety Campaign</i> dengan PT Pertamina MOR V di Bali 17 - 18 Mei 2018 ▪ <i>Safety Campaign</i> dengan Katek/Wakatek PT PGN (Persero) 23 Juli 2018 ▪ surat edaran Dirjen Migas tentang himbauan Keselamatan ▪ Video Keselamatan Migas
5.	Penyiapan Informasi Keselamatan Migas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Statistik Keselamatan Migas ▪ Informasi Peraturan Keselamatan dan Keteknikan ▪ Pembuatan buku "<i>Lesson Learn</i> Kecelakaan SPBU di Indonesia" ▪ Pembuatan buku saku "Keselamatan Hilir Migas"
5.	<i>Stakeholder Meeting</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Workshop</i> Pengamanan Instalasi Migas Lepas Pantai (Sentul, 4 September 2018) ▪ Koordinasi dan Pembinaan Perusahaan Inspeksi (Bandung, 15 s.d 16 Oktober 2018) ▪ Sosialisasi Pedoman Pemeriksaan Keselamatan SPBU (Surabaya, Minggu ke-4 November 2018)
6	TIPKM	<i>Workshop</i> TIPKM (Jogjakarta, 14 s.d November 2018)

3.7 Akuntabilitas Keuangan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi 2018

Bentuk akuntabilitas anggaran Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dapat dilihat dari segi perencanaan dimana penetapan pagu anggaran di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dipengaruhi oleh target capaian dan jumlah indikator pada tahun anggaran terkait. Secara kuantitas, jumlah indikator kinerja dan tingkat beban target kinerja mempengaruhi jumlah pagu anggaran tahun berjalan. Hal ini dapat terlihat dari adanya korelasi antara jumlah indikator kinerja dan pagu anggaran yang ditetapkan di tahun 2014-2017, dimana semakin banyak jumlah indikator kinerja tahun anggaran, maka relatif semakin tinggi pula pagu anggaran yang ditetapkan.

Adapun demikian, khusus untuk tahun 2018, terjadi penurunan pagu anggaran yang ditetapkan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, meskipun jumlah indikator kinerja yang ditetapkan sama. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan penurunan pagu di tingkat Kementerian. Selain itu, di tahun 2018, alokasi anggaran untuk pembangunan fisik diutamakan yang secara tidak langsung berdampak pada belanja non fisik lainnya.

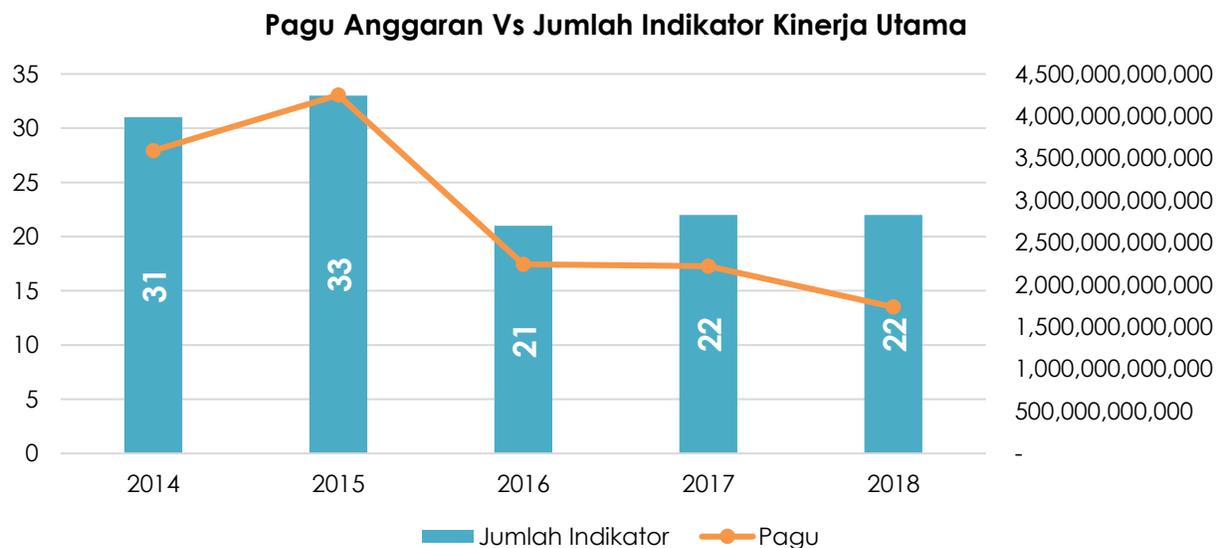


Diagram 68. Pagu Anggaran Vs Jumlah Indikator Kinerja Utama

Realisasi penyerapan anggaran oleh tahun 2014-2018 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tahun	Pagu	Realisasi	% Penyerapan Anggaran
2014	3,591,089,749,000	1,371,155,369,528	38.18%
2015	4,249,582,356,000	2,228,189,291,436	52.43%
2016	2,244,110,487,000	1,787,963,439,496	79.67%
2017	2,221,504,736,000	1,323,337,539,592	59.57%
2018	1,700,728,026,000	1,544,353,251,941	90.81%

Penyerapan anggaran Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi pada tahun anggaran 2018 mencapai 90.54%. Angka ini sangat tinggi apabila dibandingkan dengan persentase penyerapan anggaran selama lima tahun terakhir. Adapun demikian, perlu digarisbawahi bahwa pada tahun 2018, Pagu Anggaran yang ditetapkan tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya.

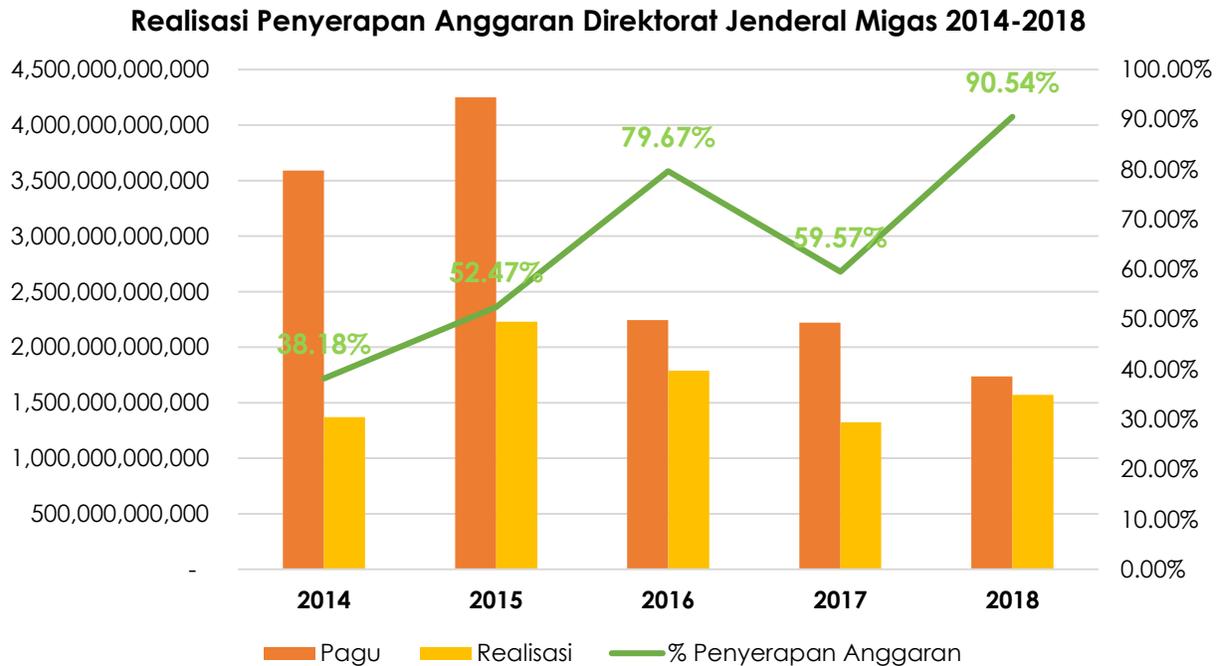


Diagram 69. Realisasi Penyerapan Anggaran Direktorat Jenderal Migas 2014-2018

Berdasarkan proporsinya, struktur anggaran Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi tahun 2018 terdiri dari belanja Pegawai sebesar Rp. 84.486.737.000, belanja barang sebesar Rp. 580.714.203.000, dan belanja modal sebesar Rp. 1.035.527.086.000. Ini berarti bahwa struktur anggaran Ditjen Migas tahun 2018 terdiri dari 5% belanja pegawai, 34% belanja pegawai, dan 61% belanja modal.

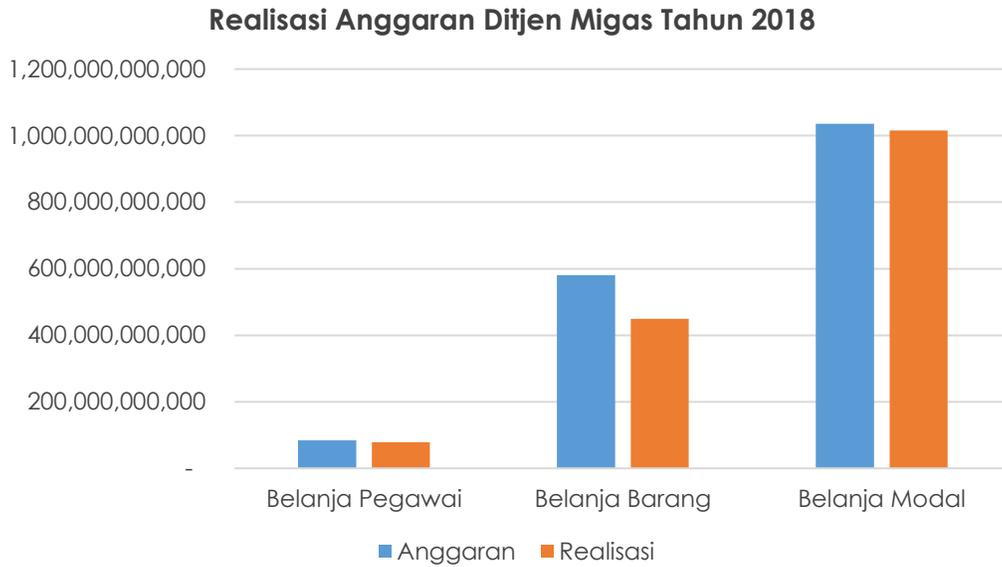


Diagram 70. Realisasi Anggaran Ditjen Migas Tahun 2018

Namun demikian, ketiga komponen anggaran sebagaimana disebutkan sebelumnya memiliki tingkat penyerapan yang berbeda-beda. Penyerapan belanja pegawai sebesar 93% atau sebesar Rp. 78.786.379.091 dari total anggarannya. Penyerapan belanja barang mencapai Rp. 449.760.,469.536 atau sebesar 77% dari total anggaran belanja barang. Sementara itu penyerapan belanja modal mencapai angka 98% dengan total realisasi sebesar Rp. 1.015.806.403.314.

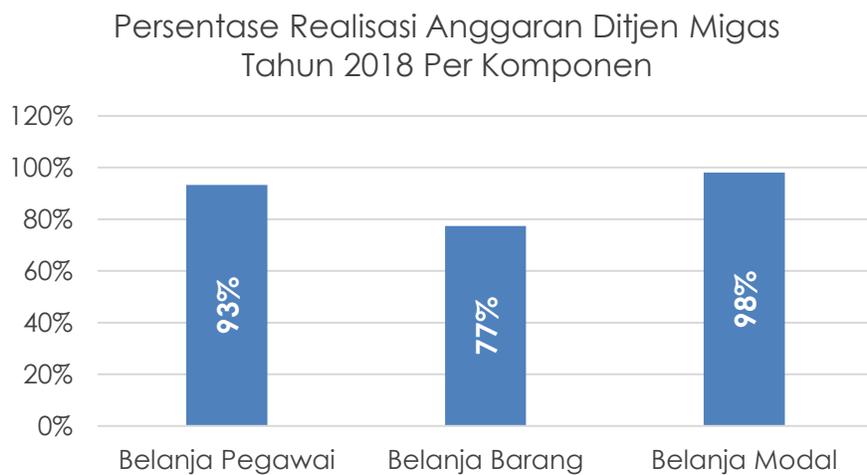


Diagram 71. Persentase Realisasi Anggaran Ditjen Migas Tahun 2018 Per Komponen

Dengan demikian, realisasi belanja modal mencapai 66% dari total penyerapan anggaran, penyerapan belanja barang mencapai 29% dari total penyerapan dan besar realisasi pegawai mencapai 5% dari total realisasi anggaran.

STRUKTUR ANGGARAN DITJEN MIGAS 2018

■ Belanja Pegawai ■ Belanja Barang ■ Belanja Modal

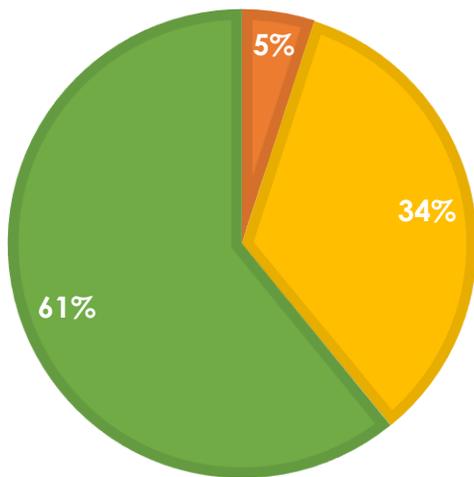


Diagram 72. Struktur Anggaran Ditjen Migas 2018

STRUKTUR REALISASI ANGGARAN DITJEN MIGAS 2018

■ Belanja Pegawai ■ Belanja Barang ■ Belanja Modal

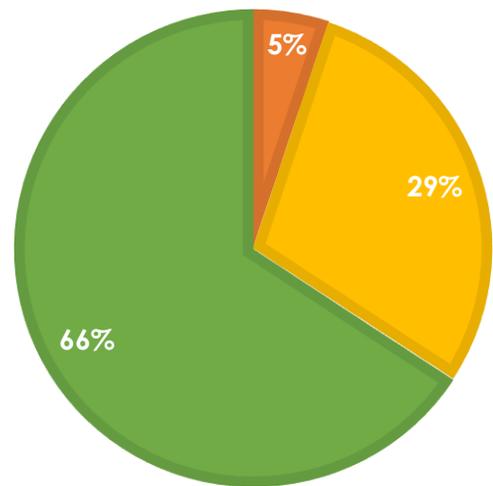


Diagram 73. Struktur Realisasi Anggaran Ditjen Migas 2018

3.8 Analisis Efisiensi Kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi 2018

Efisiensi kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dapat dilihat dari aspek penggunaan anggaran yang diberikan serta upaya yang dilakukan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam situs resminya, efisiensi dapat diartikan sebagai “ketepatan cara dalam menjalankan sesuatu dengan tidak membuang waktu, tenaga, biaya” atau “kemampuan menjalankan tugas dengan baik dan tepat dengan tidak membuang waktu, tenaga, biaya”. Ini menggarisbawahi bahwa efisiensi dapat dilihat dari waktu, tenaga, dan biaya.

3.8.1 Efisiensi Anggaran

Secara normatif, anggaran memiliki peran penting dalam pencapaian target kinerja Pemerintah mengingat alokasi anggaran yang sesuai mampu mendorong pelaksanaan kinerja Pemerintah dalam mencapai target yang telah ditentukan dalam proses perencanaan sebelumnya. Berdasarkan rekam jejak kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi selama lima tahun terakhir, faktor ketersediaan anggaran dan kebijakan alokasi anggaran mempengaruhi pencapaian beberapa indikator kinerja utama, khususnya terkait dengan pembangunan infrastruktur. Di tahun 2018, dengan total rencana anggaran keuangan sebesar Rp. 1.700.728.026.000, diperoleh hasil penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp. 13.178.842.775.664, investasi sub sektor migas sebesar USD 12.69 miliar, dan penerimaan negara sub sektor migas sebesar Rp. 215 triliun. Hal ini tentu merupakan prestasi tersendiri mengingat perolehan negara jauh lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah, yang menyiratkan adanya efisiensi dari pengelolaan anggaran belanja negara.

Realisasi Anggaran v Capaian Kinerja

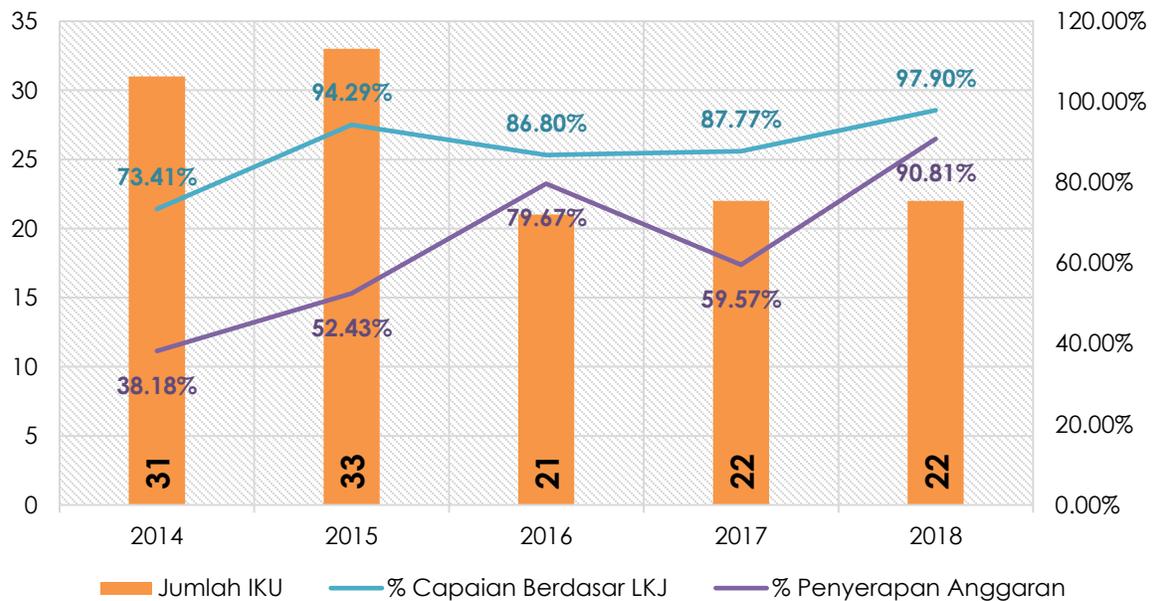


Diagram 74. Realisasi Anggaran v Capaian Kinerja

Namun demikian, perlu digarisbawahi bahwa anggaran semata bukan merupakan faktor satu satunya yang menentukan pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

Adanya perubahan pada alokasi anggaran dan penurunan pagu anggaran yang ditetapkan untuk tahun 2018 tidak sepenuhnya menurunkan kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Ini terlihat dari capaian kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi tahun 2018 yang justru meningkat dibandingkan dengan lima tahun sebelumnya, baik dari segi pencapaian target kinerja maupun penyerapan realisasi anggaran, terlepas dari penurunan pagu anggaran yang ditetapkan. Hal ini merupakan indikasi bahwa Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi berhasil melakukan efisiensi anggaran dan efisiensi kinerja terlepas dari penurunan jumlah pagu anggaran yang ditetapkan. Selain itu, kondisi ini juga menunjukkan adanya indikasi meskipun alokasi anggaran merupakan faktor penting yang mempengaruhi kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, masih terdapat faktor-faktor lain yang memiliki pengaruh cukup besar selain faktor ketersediaan anggaran.

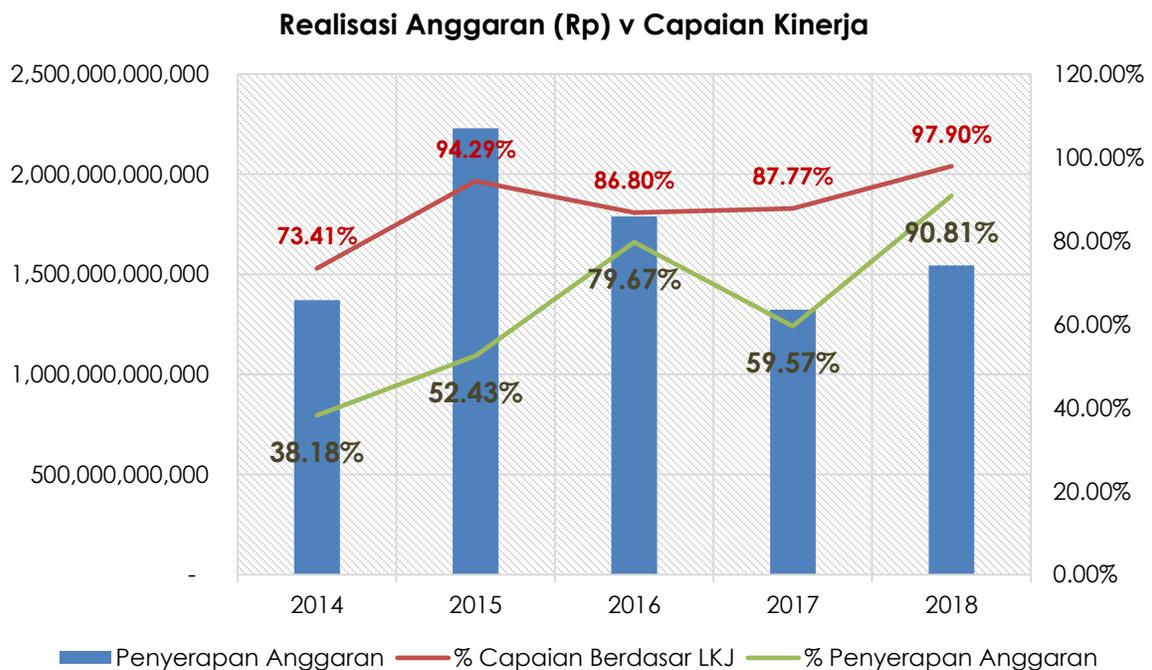


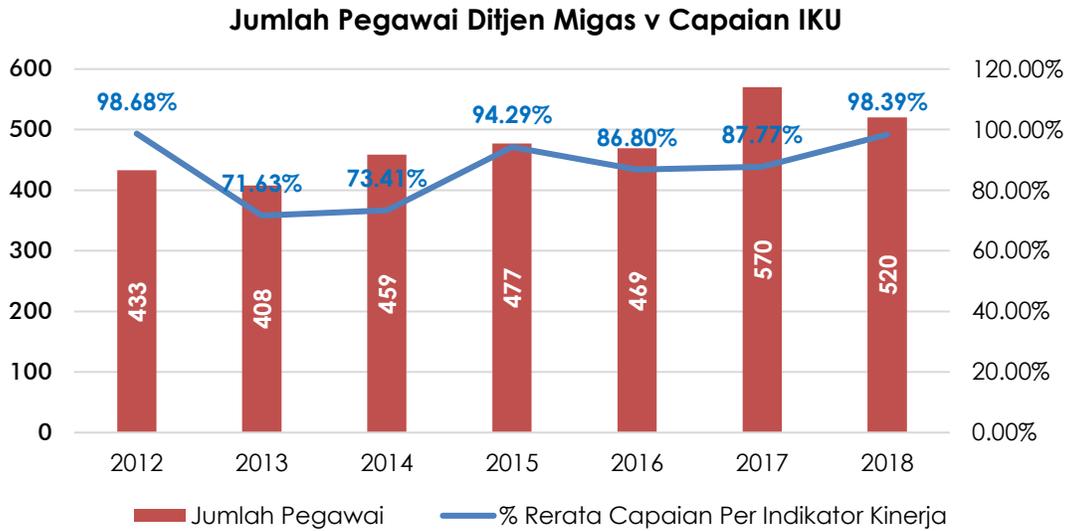
Diagram 75. Realisasi Anggaran (Rp) v Capaian Kinerja

3.8.2 Efisiensi Tenaga

Pada tahun 2018, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi belum melakukan efisiensi tenaga dalam meraih target perjanjian kinerja 2018. Efisiensi tenaga dapat dilihat dari jumlah tenaga atau sumber daya yang dikerahkan untuk meraih target kinerja. Dengan kata lain, secara

normatif, efisiensi tenaga dapat dilakukan dengan melakukan efisiensi beban kerja pegawai maupun melakukan perubahan struktur organisasi. Dari segi jumlah, di tahun 2018 terjadi perubahan jumlah pegawai yang cukup signifikan apabila dibandingkan dengan tahun 2017. Di tahun 2017 diberlakukan kebijakan perubahan status inspektur migas daerah menjadi inspektur migas berstatus pusat sehingga jumlah pegawai yang tercatat sebagai pegawai di Ditjen Migas mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Jumlah ini kemudian mengalami penurunan di tahun 2018 dikarenakan sejumlah inspektur migas yang berasal dari daerah memutuskan untuk kembali bekerja di daerah asalnya. Dengan demikian, perubahan pegawai yang ada tidak disebabkan adanya perubahan struktur organisasi sebagai langkah efisiensi sumber daya manusia.

Namun demikian, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi melakukan peningkatan kekuatan pegawai dengan harapan kekuatan pegawai yang mumpuni dari segi kualitas akan mempengaruhi kinerja instansi nantinya. Kekuatan sumber daya manusia merupakan unsur penting dalam pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Hal ini dikarenakan dengan adanya tantangan pengelolaan minyak dan gas bumi Nasional yang kompleks serta adanya dinamika kebijakan di luar lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, maka kompetensi pegawai migas yang mumpuni menjadi salah satu unsur yang diharap dapat menunjang kapasitas Direktorat Jenderal Migas untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta mencapai target kinerja yang ditetapkan. Terlebih lagi, berdasarkan *trend* yang ada, dalam implementasinya di lapangan jumlah pegawai tidak selalu mempengaruhi hasil pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi mengingat besarnya pengaruh eksternal, seperti harga minyak bumi, yang mempengaruhi capaian kinerja. Sehingga upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi di tahun 2018 untuk melakukan efisiensi tenaga kerja lebih terfokus pada kualitas pegawai dibandingkan dengan kuantitas pegawai.



**jumlah tidak termasuk pegawai dengan status diperbantukan di instansi lainnya*

Diagram 76. Jumlah Pegawai Ditjen Migas v Capaian IKU

3.8.3 Efisiensi Waktu

Upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dalam hal meningkatkan efisiensi waktu pencapaian kinerja adalah dengan meningkatkan pemanfaatan infrastruktur komunikasi internal dan infrastruktur perizinan *online*. Dari segi birokrasi internal, komunikasi menggunakan tata persuratan *online* semakin digalakkan sehingga pegawai dapat mengakses surat tugas kapanpun dan dimanapun. Ini merupakan salah satu upaya Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi untuk memangkas waktu yang habis dari adanya tatanan birokrasi yang berbelit.

Selanjutnya, efisiensi waktu juga dilakukan dari segi layanan Direktorat Jenderal Migas kepada publik. Tahun 2018, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi mengembangkan aplikasi keteknikan migas yang diharapkan dapat mempermudah layanan terkait penerbitan persetujuan layak operasi. Aplikasi ini diharapkan dapat mempersingkat komunikasi antara BU/BUT Migas dengan Direktorat Jenderal Migas terkait layanan sertifikasi keselamatan usaha migas, sehingga secara tidak langsung mendukung pencapaian sasaran "Terwujudnya lingkungan lingkungan, keselamatan operasi dan usaha penunjang minyak dan gas bumi". Disamping itu, sejak tahun 2016, Ditjen Migas telah mulai menggalakkan penggunaan aplikasi perizinan *online* yang diharapkan dapat mempermudah BU/BUT melakukan pengajuan izin usaha migas dan meningkatkan iklim investasi migas di Indonesia.

3.9 Analisis Efektivitas Kinerja Direktorat Jenderal Migas Tahun 2018

Sejauh apa kinerja yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Migas selama tahun 2018 untuk mencapai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2018 masih dapat diperdebatkan. Efektif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam situs resminya adalah dapat membawa hasil atau berhasil guna. Berdasarkan pemahaman ini, maka dalam konteks capaian, bisa dikatakan bahwa kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi cukup dapat mencapai hasil dengan nilai yang cukup tinggi apabila dibandingkan dengan empat tahun sebelumnya yaitu dengan rerata persentase capaian kinerja sebesar 97%. Ini dapat terlihat dari diagram berikut yang menunjukkan peningkatan persentase capaian kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi secara signifikan.

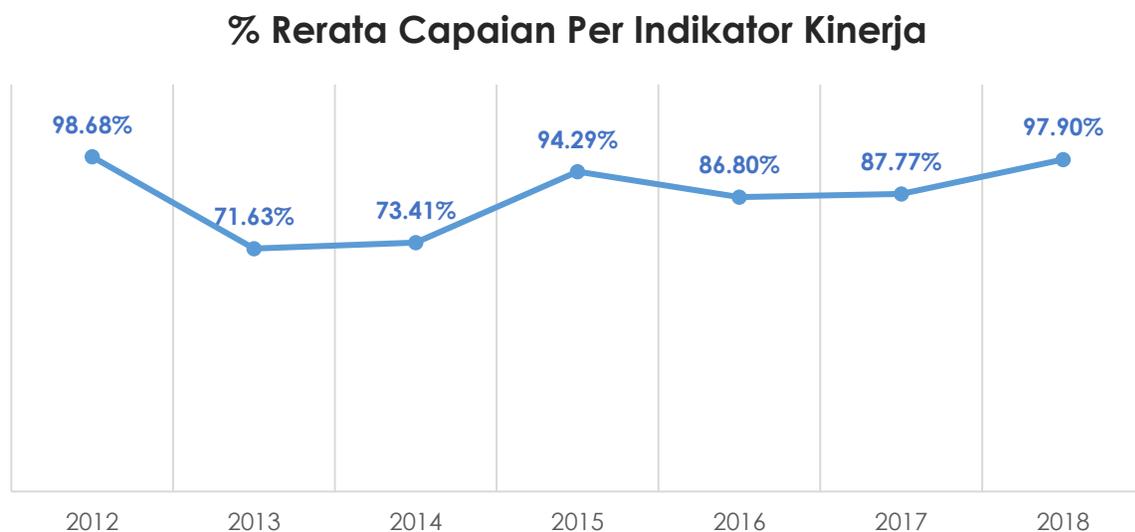


Diagram 77. Persentase Rerata Capaian Per Indikator Kinerja

Namun demikian, besarnya pengaruh eksternal, khususnya faktor harga minyak bumi terhadap hasil pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Migas dapat menganulir argumen efektivitas kinerja Direktorat Jenderal Migas selama tahun 2018. Beberapa indikator kinerja seperti *lifting* migas, penerimaan negara dari subsektor migas, penandatanganan wilayah kerja migas, cadangan migas, serta jumlah investasi migas secara tidak langsung dipengaruhi oleh iklim investasi yang dibentuk juga oleh harga minyak dunia. Harga minyak dunia yang meningkat dibandingkan dua

tahun sebelumnya diindikasikan menjadi faktor pendukung tercapainya capaian indikator-indikator dimaksud terhadap target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2018. Dengan demikian, pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi selama 2018 dapat dikatakan tidak murni disebabkan oleh peningkatan dukungan faktor internal tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal yang sangat mendukung pencapaian kinerja tahun 2018.

Sensitivitas Persentase Capaian Terhadap Harga Minyak

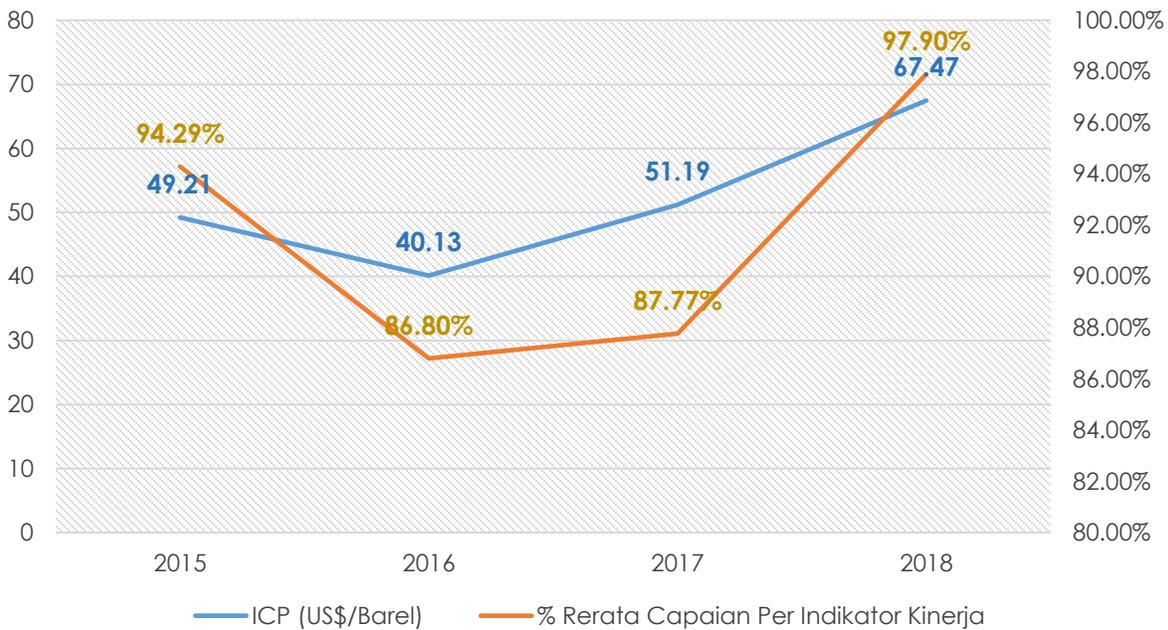


Diagram 78. Sensitivitas Persentase Capaian Terhadap Harga Minyak

Belajar dari *trend* yang ada yang memperlihatkan besarnya pengaruh eksternal terhadap pencapaian kinerja Pemerintah di subsektor migas, maka Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi senantiasa menjalankan kegiatan monitoring dan evaluasi berkala pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah di sub sektor migas. Hal ini dilakukan salah satunya untuk menjamin *adaptive capacity* program dan kegiatan Pemerintah yang responsif terhadap dinamika sub sektor migas. Dengan demikian, diharapkan Pemerintah dapat segera menyiasati perubahan iklim investasi maupun harga minyak dunia yang *volatil* sehingga target pembangunan dapat dicapai.

4 Penutup

Kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi di tahun 2018 dapat dikatakan cukup baik. Hal ini dikarenakan rerata capaian kinerja di tahun 2018 mencapai 97% dengan 13 dari 22 target indikator berhasil tercapai dengan capaian lebih atau sama dengan 100%. Bisa dikatakan bahwa tahun 2018 merupakan tahun dimana kondisi faktor eksternal, termasuk harga minyak bumi, cukup mendukung untuk pencapaian kinerja yang jauh lebih baik apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Khusus untuk pencapaian penandatanganan wilayah kerja, tahun 2018 juga merupakan tahun dimana Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi “memanen” hasil kinerja tahun sebelumnya sehingga pencapaian tahun 2018 menjadi tinggi meski upaya yang dilakukan telah dirintis dari tahun-tahun sebelumnya. Adapun hasil pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dapat dilihat pada tabel berikut:

Sasaran	No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Presentasi
Optimalisasi Penyediaan Energi Fosil	1	Lifting minyak dan gas bumi				
		a. Lifting minyak bumi (APBN 2016)	MBOPD	800	778	97.25%
		b. Lifting gas bumi (APBN 2016)	MBOEPD	1200	1139	94.92%
	2	Jumlah penandatanganan KKKS Migas				
		a. Konvensional	KKKS	6	11	183.33%
		b. Non konvensional	KKKS	2	0	0%
	3	Cadangan minyak dan gas bumi				
		a. Cadangan minyak bumi	MMSTB	6441	7512.22	116.63%
		b. Cadangan gas bumi	TCF	143	135.55	94.79%
Meningkatkan investasi sektor energi dan sumber daya mineral	4	Investasi sub sektor migas	Miliar US\$	15.42	12.69	82.26%
	5	Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan sub sektor migas sesuai prolegnas	Rancangan	15	23	153.33%
Meningkatkan alokasi migas domestik	6	Pemanfaatan gas bumi dalam negeri				
		a. Persentase alokasi gas domestik	%	63	60.3	95.71%
		b. Fasilitas pembangunan FSRU (Flating Storage Regasification Unit/Regasifikasi on-shore/LNG Terminal)	Unit	1	0	0%

Sasaran	No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Presentasi
Meningkatkan akses dan infrastruktur migas	7	Kapasitas kilang BBM				
		a. Produksi BBM dari kilang dalam negeri	Juta KL	39	44.6	114.36%
		b. Kapasitas kilang BBM dalam negeri	Ribu BCPD	1169	1169	100.00%
	8	Kapasitas terpasang kilang LPG	Juta MT	4.66	4.74	101.72%
	9	Pembangunan jaringan gas kota				
		a. Jumlah wilayah dibangun jaringan gas kota	Lokasi	16	18	112.50%
	b. Rumah tangga tersambung gas kota	SR	78315	89906	114.80%	
	10	Pembangunan infrastruktur sarana bahan bakar gas	Lokasi	1	0	0%
Mewujudkan subsidi energi yang lebih tepat sasaran	11	Volume BBM subsidi (APBN 2016)	Juta KL	16.23	16.1	100.80%
	12	Volume LPG subsidi (APBN 2016)	Juta MT	6.45	6.55	98.45%
Mengoptimalkan penerimaan negara dari sub sektor migas	13	Jumlah realisasi penerimaan negara dari sub sektor migas terhadap target APBN (APBN 2016)	Rp. Triliun	118.9	215.0	180.85%
Terwujudnya lindung lingkungan keselamatan operasi dan usaha penunjang migas	14	Jumlah perusahaan yang melaksanakan keteknikan yang baik	Perusahaan	50	55	110.00%
	15	Jumlah perusahaan hulu dan hilir migas yang kegiatan operasinya tidak terjadi kecelakaan fatal:				
		a. Jumlah perusahaan hulu migas yang kegiatan operasinya tidak terjadi kecelakaan fatal	Perusahaan	100	102	102.00%
	b. Jumlah perusahaan hilir migas yang kegiatan operasinya tidak terjadi kecelakaan fatal	Perusahaan	200	200	100.00%	

Berdasarkan dari hasil penelaahan yang telah dilakukan dari hasil capaian Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi di tahun 2018 terhadap target masing-masing indikator kinerja utama sebagaimana tertulis dalam Perjanjian Kinerja 2018, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Capaian kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi tergolong *outstanding* atau sangat memuaskan di tahun 2018 dibandingkan dengan kinerja selama lima tahun terakhir. Hal ini dapat terlihat dari persentase pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi di tahun 2018 yang mencapai angka 97% dan lebih tinggi dari persentase capaian tahun-tahun sebelumnya.
- 2) Faktor eksternal memiliki dampak yang sangat besar bagi keberhasilan pencapaian target kinerja Pemerintah di sub sektor migas. Faktor eksternal yang dimaksud disini meliputi faktor teknis dan faktor ekonomi global termasuk harga minyak dunia. Beberapa indikator kinerja yang sangat elastis terhadap faktor ini antara lain adalah lifting migas, penerimaan negara dari subsektor migas, penandatanganan wilayah kerja migas, cadangan migas, serta jumlah investasi migas. Harga minyak dunia yang meningkat dibandingkan dua tahun sebelumnya di tahun 2018 diindikasikan menjadi faktor pendukung tercapainya capaian indikator-indikator dimaksud terhadap target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2018.

Adapun beberapa saran yang dapat diberikan berkaitan dengan kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi belajar dari capaian kinerja tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- a) Perlunya peningkatan kepekaan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi terhadap kondisi pasar dan kondisi lapangan melalui peningkatan monitoring dan pengawasan;
- b) Perlu adanya pengembangan metode dan standar pengukuran efisiensi dan efektivitas kinerja Pemerintah di sub sektor minyak dan gas bumi;
- c) Perlu adanya pengembangan layanan *online* maupun penyederhanaan birokrasi terkait dengan layanan publik;
- d) Perlu adanya revisi indikator kinerja serta penyusunan indikator kinerja yang secara lebih akurat menjanjikan tolak ukur yang dapat menggambarkan kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.